



LAPORAN PENDAHULUAN

**KAJIAN STRATEGI  
PENINGKATAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA  
MENUJU PEKERJA KELAS MENENGAH KE ATAS  
UNTUK MENINGKATKAN PERTUMBUHAN  
EKONOMI BALI**



KERJASAMA  
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI  
DENGAN  
LPPM UNIVERSITAS UDAYANA

**2024**



## **LAPORAN PENDAHULUAN**

### **PEKERJAAN**

# **KAJIAN STRATEGI PENINGKATAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA MENUJU PEKERJA KELAS MENENGAH KE ATAS UNTUK MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI BALI**

**Kontrak :**

**Nomor:** B.29.000.9/1455/Bid.III/BRIDA (Pihak Pertama)  
B.337/UN.14.4.A/HK.07.00/2024 (Pihak Kedua)

**Antara:**

**BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI**

**Dengan**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT  
UNIVERSITAS UDAYANA**



**KAJIAN STRATEGI PENINGKATAN  
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA MENUJU  
PEKERJA KELAS MENENGAH KE ATAS UNTUK MENINGKATKAN  
PERTUMBUHAN EKONOMI BALI**

**TIM PENELITI**

**Dr. I Nyoman Mahaendra Yasa, S.E., M.Si.  
Dr. Putu Ayu Pramitha Purwanti, S.E., M.Si.  
Dr. Ni Nyoman Reni Suasih, S.IP., M.Si.  
Prof. Dr. Drs. Made Kembar Sri Budhi, M.P.  
Ni Made Rastini, S.E., M.M.  
Dr. Ida Bagus Putu Purbadharmaja, S.E., M.E.  
Dr. Ni Luh Gede Astariyani, S.H., M.H.  
I Gusti Agung Ayu Apsari Anandari, M.S.E.  
Dr. Gede Sentanu, S.E., M.M.**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS UDAYANA**

**2024**

**KONTRAK SWAKELOLA**

**ANTARA**

**BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI**

**DENGAN**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS UDAYANA**

**PEKERJAAN:**

**KAJIAN STRATEGI PENINGKATAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA  
MENUJU PEKERJA KELAS MENENGAH KE ATAS UNTUK MENINGKATKAN  
PERTUMBUHAN EKONOMI BALI**

**Nomor:** B.29.000.9/1455/Bid.III/BRIDA (Pihak Pertama)  
B.337/UN.14.4.A/HK.07.00/2024 (Pihak Kedua)

**TANGGAL : 2 MEI 2024**

## LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN BULAN MEI

Judul Pekerjaan : Kajian Strategi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Menuju Pekerja Kelas Menengah ke Atas Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Bali

Unit Lembaga Pengusul : Universitas Udayana

1. Identitas Ketua Tim Pengusul :

a. Nama : Dr. I Nyoman Mahaendra Yasa, SE., M.Si.

b. Jenis Kelamin : Laki-laki

c. NIDN : 0026066104

d. No. Handphone : 08123931081

e. Email : mahaendrayasa@unud.ac.id

2. Anggota Tim Peneliti 1 :

a. Nama : Dr. Putu Ayu Pramitha Purwanti, S.E., M.Si.

b. NIDN : 0017077811

3. Anggota Tim Peneliti 2 :

a. Nama : Dr. Ni Nyoman Reni Suasih, S.IP., M.Si.

b. NIDN : 0029066808

4. Anggota Tim Peneliti 3 :

a. Nama : Prof. Dr. Drs. Made Kembar Sri Budhi, M.P.

b. NIDN : 0012025808

5. Anggota Tim Peneliti 4 :

a. Nama : Ni Made Rastini, S.E., M.M.

b. NIDN : 0017016701

6. Anggota Tim Peneliti 5 :

a. Nama : Dr. Ida Bagus Putu Purbadharmaja, S.E., M.E.

b. NIDN : 0018066801

7. Anggota Tim Peneliti 6 :

a. Nama : Dr. Ni Luh Gede Astariyani, S.H., M.H.

b. NIDN : 0019037607

8. Anggota Tim Peneliti 7 :

c. Nama : I Gusti Agung Ayu Apsari Anandari, M.S.E.

d. NIDN : 0017039312

9. Anggota Tim Peneliti 8 :

c. Nama : Dr. Gede Sentanu, S.E., M.M.

d. NIDN : 0024076006

Bali, 7 Juni 2024  
Koordinator/Team Leader,



Dr. I Nyoman Mahaendra Yasa, SE., M.Si.  
NIP. 196106201986031001



## KATA PENGANTAR

*Om Swastiastu*

Segala puji syukur kami haturkan kehadapan Ida Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Pendahuluan pekerjaan **"Kajian Strategi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Menuju Pekerja Kelas Menengah ke Atas Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Bali"**. Penelitian ini merupakan kerjasama antara Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali dengan Universitas Udayana.

Kami juga mengucapkan terimakasih kepada para pihak yang telah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Bulan Mei kegiatan penelitian ini, antara lain:

1. Rektor Universitas Udayana, yang telah memberikan kesempatan untuk bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Bali.
2. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali, selaku mitra Kerjasama dan telah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan.
3. Ketua LPPM Universitas Udayana, yang telah memfasilitasi operasional kegiatan penelitian ini.
4. Badan Pusat Statistik, yang telah membantu dalam penyediaan data untuk menunjang penyusunan profil ketenagakerjaan.

Laporan Pendahuluan ini merupakan salah satu dari laporan yang kami sampaikan terkait hasil tahapan awal pelaksanaan kegiatan penelitian. Sehingga untuk kesempurnaan laporan ini, serta perbaikan dalam pelaksanaan penelitian, kami sangat mengharapkan masukan dari berbagai pihak terkait.

*Om Shanti Shanti Shanti Om*

Denpasar, 6 Juni 2024

Tim Peneliti



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN TIM PENELITI.....	iii
HALAMAN KONTRAK SWAKELOLA PENELITIAN .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Kegiatan .....	4
1.4 Landasan Hukum .....	5
1.5 Keluaran Kajian .....	7
1.6 Sistematika Penulisan .....	7
BAB II. KAJIAN LITERATUR.....	9
2.1 Paradigma Perencanaan Pembangunan Wilayah.....	9
2.2 Teori Produktivitas Tenaga Kerja .....	10
2.3 Faktor-faktor Terkait Produktivitas Tenaga Kerja.....	12
2.4 Ekonomi Kerthi Bali .....	15
BAB III. METODOLOGI PELAKSANAAN KEGIATAN.....	19
3.1 Data dan Metode Pengumpulan Data.....	19
3.2 Metode Analisis .....	22
3.3 Personil .....	32
3.4 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan.....	34
3.5 Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).....	35
3.6 Pelaporan.....	36
BAB IV. GAMBARAN UMUM/PROFIL KETENAGAKERJAAN PROVINSI BALI .	38
4.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) .....	38
4.2 Rasio Penduduk Bekerja terhadap Jumlah Penduduk Usia Kerja (Employment to Population Ratio-EPR).....	41



4.3	Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama .....	44
4.4	Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama .	47
4.5	Penduduk yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan Utama.....	51
4.6	Pekerja Paruh Waktu .....	54
4.7	Penduduk yang Bekerja Menurut Jam Kerja.....	55
4.8	Penduduk yang Bekerja pada Kegiatan Informal .....	56
4.9	Pengangguran .....	59
4.10	Pengangguran Menurut Pendidikan .....	62
4.11	Pengangguran pada Kelompok Umur .....	65
4.12	Pencapaian Pendidikan .....	68
4.13	Upah Minimum .....	70
BAB V.	PRIORITAS TENAGA KERJA PROVINSI BALI .....	72
5.1	Produktivitas Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor/Lapangan Usaha .....	72
5.2	Produktivitas Tenaga Kerja Berdasarkan Wilayah.....	79
REFERENSI	.....	81
LAMPIRAN	.....	83



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pandemi Covid-19 membuat perekonomian Bali sempat terpuruk sangat dalam dan berdampak serius terhadap kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pembatasan pergerakan masyarakat membuat aktivitas pariwisata sempat terhenti, padahal Bali mengandalkan sektor pariwisata sebagai penggerak utama perekonomian. Sektor pariwisata memang merupakan sektor yang rentan dengan shock kondisi makro. Hal tersebut juga menjadi pertimbangan penting bahwa Bali perlu melakukan transformasi ekonomi Bali agar ekonomi Bali lebih tangguh dan berkelanjutan.

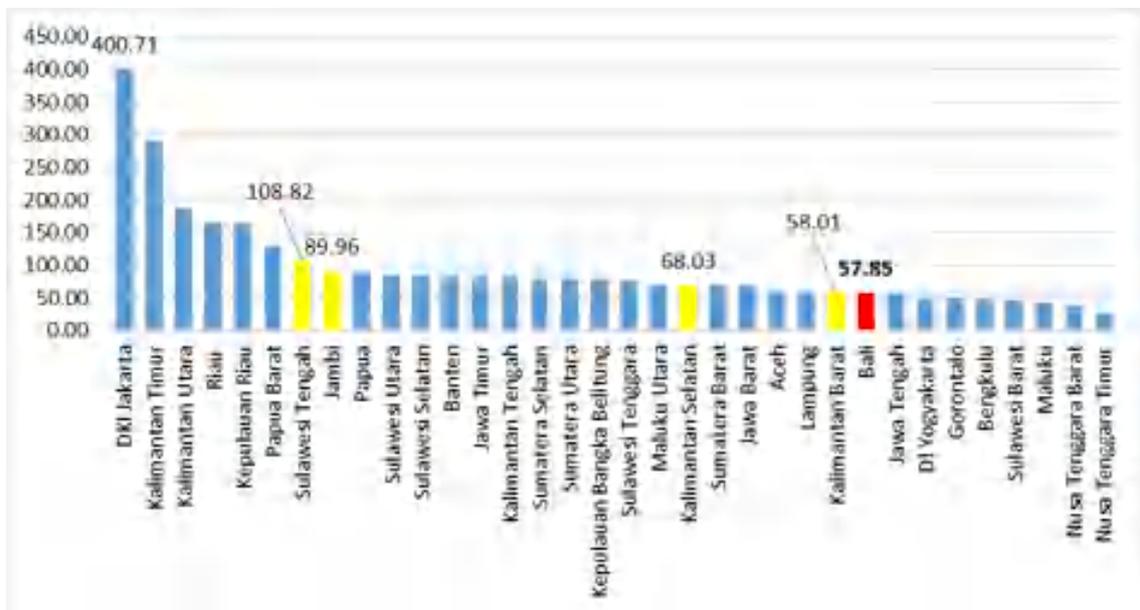
Seiring dengan upaya percepatan pemulihan ekonomi Bali, serta transformasi ekonomi Bali, Kementerian PPN/Bappenas bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Bali telah menyusun buku Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali menuju Bali Era Baru: Hijau Tangguh dan Sejahtera. Transformasi Ekonomi Bali merupakan proses Pembangunan ekonomi yang memiliki dampak jangka panjang, seiring dengan visi Indonesia Emas tahun 2045. Transformasi Ekonomi Bali mencakup enam strategi besar dan dijalankan dengan berbagai program Pembangunan, yaitu: 1. Bali Pintar dan Sehat, 2. Bali Produktif, 3. Bali Hijau, 4. Bali Terintegrasi, 5. Bali Smart Island, dan 6. Bali Kondusif.

Bappenas juga telah mengidentifikasi faktor penghambat pertumbuhan ekonomi Bali, yaitu faktor ketenagakerjaan. Sementara faktor lainnya seperti, SDM-pendidikan, aspek pembiayaan, SDM-kesehatan, daya saing ekonomi, makro dan fiskal regulasi dan institusi, serta infrastruktur dianggap bukan faktor penghambat. Sehingga faktor ketenagakerjaan perlu menjadi prioritas untuk evaluasi dan peningkatan dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali. Hal ini dikarenakan produktivitas total tenaga kerja (nilai tambah per tenaga kerja) Provinsi Bali lebih rendah dibandingkan daerah sebanding.



**Gambar 1.1**  
**Hasil Identifikasi Faktor Penghambat Pertumbuhan Ekonomi Bali**  
 Sumber: Bappenas, 2021

Secara lebih spesifik, *positioning* produktivitas tenaga kerja Provinsi Bali disajikan pada Gambar 1.2, sehingga dapat dikomparasi dengan daerah lain yang sebanding kondisi perekonomiannya (PDRB).



**Gambar 1.2**  
**Produktivitas Tenaga Kerja per Provinsi, 2022 (Juta Rp per Tenaga Kerja)**  
 Sumber: BPS, 2024



Dalam pelaksanaan Transformasi Ekonomi tersebut, produktivitas tenaga kerja merupakan salah satu indikator Bali Tangguh, dimana ditargetkan pada tahun 2045, produktivitas tenaga kerja sebesar 239,9 juta Rp per tenaga kerja per tahun. Sementara realisasi saat ini menunjukkan bahwa selama tahun 2020-2022 terjadi penurunan realisasi produktivitas tenaga kerja di Bali, yaitu 60,9 juta Rp per tenaga kerja per tahun menjadi 57,85 juta Rp per tenaga kerja per tahun. Penurunan produktivitas tersebut perlu menjadi perhatian dan dikasi penyebab serta Solusi untuk mengatasinya sehingga dapat mencapai target yang diharapkan.

Produktivitas tenaga kerja merupakan perbandingan antara output yang dicapai dengan peran serta tenaga kerja per satuan waktu. Sehingga peningkatan produktivitas tenaga kerja diharapkan dapat meningkatkan kelas tenaga kerja menjadi pekerja kelas menengah. Menurut laporan Bank Dunia dalam *Pathways to Middle-Class Jobs in Indonesia* (2021), pekerja kelas menengah (*middle class jobs*) adalah pekerja yang terbebas dari ancaman kemiskinan dengan penghasilan cukup untuk menghidupi 4 (empat) orang anggota keluarga yang mengkonsumsi gaya hidup kelas menengah atau 3,5 kali garis kemiskinan per kapita dikali 4.

Secara lebih dalam, apabila ditinjau berdasarkan produktivitas tenaga kerja pada lima lapangan usaha dengan jumlah tenaga kerja tertinggi di Provinsi Bali, maka dapat disajikan produktivitas tenaga kerja pada sektor utama tersebut (Gambar 1.3). Gambar 1.3 menunjukkan bahwa justru pada sektor yang padat karya, produktivitas masih rendah. Sedangkan produktivitas tertinggi masih di sektor akomodasi makan minum yang merupakan proksi sektor pariwisata.



**Gambar 1.3**  
**Produktivitas Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan Usaha Utama Tahun 2023**  
**(Juta Rp per Tenaga Kerja)**

Sumber: BPS Provinsi Bali (2023), diolah

Tinjauan tentang strategi peningkatan produktivitas tenaga kerja di Bali menjadi urgent untuk dilakukan. Apalagi Bali saat ini sedang memiliki bonus demografi yang akan memasuki periode *aging population* pada tahun 2035. Dimana diproyeksikan bahwa *share* penduduk lansia terhadap total populasi Provinsi Bali pada tahun 2035 berada pada peringkat keempat (*United Nations Population Fund, 2014*). Sehingga bonus demografi tentu perlu dioptimalkan dengan peningkatan kualitas tenaga kerja agar mampu diserap pasar tenaga kerja serta memiliki produktivitas tinggi.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan utama sebagai berikut.

- 1) Bagaimanakah kondisi eksisting ketenagakerjaan di Provinsi Bali?
- 2) Apakah penyebab rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja di Provinsi Bali?
- 3) Bagaimanakah dinamika kebutuhan tenaga kerja dan kesenjangan kompetensi tenaga kerja saat ini dan kebutuhan di masa depan?
- 4) Faktor-faktor apakah determinan produktivitas tenaga kerja di Provinsi Bali?



- 5) Bagaimanakah kebijakan serta strategi peningkatan produktivitas tenaga kerja menuju pekerja kelas menengah ke atas di Provinsi Bali?

### **1.3 Tujuan Kegiatan**

Tujuan utama dilaksanakan kegiatan kajian ini adalah untuk mewujudkan transformasi ekonomi Bali sesuai buku Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali. Lebih jelasnya, tujuan khusus dari kegiatan ini antara lain adalah sebagai berikut.

- 1) Untuk menganalisis kondisi eksisting ketenagakerjaan di Provinsi Bali.
- 2) Untuk menganalisis penyebab rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja di Provinsi Bali.
- 3) Untuk menganalisis dinamika kebutuhan tenaga kerja dan kesenjangan kompetensi tenaga kerja saat ini dan kebutuhan di masa depan.
- 4) Untuk menganalisis determinan produktivitas tenaga kerja di Provinsi Bali.
- 5) Untuk merumuskan kebijakan serta strategi peningkatan produktivitas tenaga kerja menuju pekerja kelas menengah ke atas di Provinsi Bali.

### **1.4 Landasan Hukum**

Penyusunan kajian Strategi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Menuju Pekerja Kelas Menengah ke Atas Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Bali ini merujuk pada beberapa regulasi yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Bali, khususnya terkait ketenagakerjaan. Berikut kelembagaan regulasi terkait yang diacu pada kajian ini:

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
- 3) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola.



- 4) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kerja Nasional Indonesia.
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
- 6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian.
- 7) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024.
- 8) Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: Kep.109/M.PPN/HK/08/2023 tentang Pembentukan Tim Pengelola Transformasi Ekonomi Kerthi Bali.
- 9) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023.
- 10) Peraturan Gubernur Bali Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
- 11) Peraturan Gubernur Bali Nomor 76 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Provinsi Tahun 2023, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 76 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Provinsi Tahun 2023.



## **1.5 Keluaran Kajian**

Keluaran kegiatan Kajian Strategi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Menuju Pekerja Kelas Menengah ke Atas Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Bali, meliputi:

- 1) Profil Ketenagakerjaan Provinsi Bali saat ini.
- 2) Standar kompetensi dan kebutuhan tenaga kerja kelas menengah di Provinsi Bali.
- 3) Strategi peningkatan produktivitas tenaga kerja (optimis, moderat, dan pesimis).
- 4) Peta Jalan (Roadmap) peningkatan produktivitas tenaga kerja menuju pekerja kelas menengah ke atas (2025-2030).

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan kajian Strategi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Menuju Pekerja Kelas Menengah ke Atas Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Bali ini disusun berdasarkan kebutuhan dari Pemerintah Provinsi Bali sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kaidah akademik. Berikut merupakan sistematika penulisan kajian.

### **Bab I Pendahuluan**

Pada bab I akan disajikan latar belakang, tujuan, landasan hukum serta Keluaran Kajian.

### **Bab II Kajian Literatur**

Pada bab II akan diuraikan mengenai ekonomi regional, ketenagakerjaan, serta roadmap Ekonomi Kerthi Bali yang digunakan untuk dasar analisis kajian ini.

### **Bab III Metodologi Pelaksanaan Kegiatan**

Pada bab III diuraikan mengenai data dan metode pengumpulan data, metode analisis, uraian penugasan personil, jadwal pelaksanaan dan pelaporan kegiatan.

### **Bab IV Gambaran Umum/Profil Ketenagakerjaan di Bali**

Pada bab IV diuraikan mengenai kondisi perekonomian dan kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Bali, antara lain meliputi ketersediaan tenaga kerja, peluang, tantangan, ketersediaan pasar, daya saing tenaga kerja, dan lain-lain.

### **Bab V Produktivitas Tenaga Kerja di Bali**



Pada bab V diuraikan mengenai produktivitas tenaga kerja di Bali berdasarkan lapangan usaha, termasuk penyebab rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja di Provinsi Bali.

### **Bab VI Kesenjangan Kebutuhan dan Kompetensi Tenaga Kerja di Bali**

Pada bab VI diuraikan mengenai dinamika kebutuhan tenaga kerja, serta hasil analisis kesenjangan kompetensi tenaga kerja antara kondisi saat ini dengan kompetensi yang dibutuhkan di masa depan.

### **Bab VII Determinan Produktivitas Tenaga Kerja di Provinsi Bali**

Pada bab VII diuraikan hasil analisis data makro mengenai pengaruh upah minimum, share sektor pertanian, share sektor industri, pembiayaan sektor pendidikan, tingkat pendidikan SMA, tingkat pendidikan SMK, dan angka harapan hidup terhadap produktivitas tenaga kerja di Provinsi Bali.

### **Bab VIII Kebijakan dan Strategi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja di Bali**

Pada bab VIII diuraikan mengenai kebijakan serta strategi untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja di Provinsi Bali menuju pekerja kelas menengah ke atas untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Bali.



## BAB II

### KAJIAN LITERATUR

#### 2.1 Paradigma Perencanaan Pembangunan Wilayah

Todaro dan Smith (2012) berpendapat pembangunan yang direncanakan sebagai *surest and direct route to economic growth*. Pada beberapa negara perencanaan dilaksanakan secara top down, yaitu semua perencanaan pembangunan ekonomi dibebankan kepada pemerintah pusat. Peran pemerintah dalam hal ini adalah mempersiapkan program pembangunan ekonomi nasional atau *roadmap* yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik negaranya. Dengan sistem terpusat, pembangunan ekonomi lebih terkendali hanya saja banyak kebijakan yang kurang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat atau daerah.

Ada juga yang berpendapat bahwa konsep perencanaan pembangunan suatu negara harus berorientasi pada prinsip keadilan atau *equity*. Konsep keadilan menurut pandangan ini adalah dengan lebih mendengarkan aspirasi masyarakat. Sehingga diharapkan dengan didengarnya aspirasi masyarakat dapat menghilangkan rasa ketidakadilan atas pelaksanaan kebijakan pemerintah karena kebijakan pembangunan sudah selaras dengan kebutuhan dan sumberdaya yang dimiliki (Al-Zawahreh dan AlMadi, 2012; Hatfield *et al.*, 2012).

Konsep *equity* nampaknya sejalan dengan model otonomi daerah dimana masyarakat (dalam hal ini pemerintah daerah) berhak mengelola sumberdaya daerahnya masing-masing. Selain itu konsep ini juga sejalan dengan teori perencanaan aplikatif, yaitu guna mewujudkan pembangunan suatu wilayah perlu sebuah peta rencana (*plan and guideline*) yang kemudian akan menjadi dasar pelaksanaan program guna mengatasi permasalahan dalam masyarakat (Prihatin *et al.*, 2019).

Melalui otonomi daerah, Indonesia mulai bergeser dalam menerapkan perencanaan pembangunan, yaitu menjadi *bottom-up*. Tujuannya agar semua aspirasi masyarakat daerah dapat terserap oleh pemerintah pusat dan pelaksanaan pembangunan sejalan dengan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut karena masyarakatlah yang paham dengan jelas tentang segala potensi yang dimiliki (Kim *et al.*, 2014). Tidak hanya paradigma pembangunan saat ini mengalami pergeseran, dari *top-*



down menjadi *bottom-up*, namun juga pembangunan menekankan pada aspek pemberdayaan masyarakat atau *people centered development*, pembangunan berbasis sumber daya lokal (*resource-based development*) dan pembangunan kelembagaan (Suswanto *et al.*, 2013).

## 2.2 Teori Produktivitas Tenaga Kerja

Peran penting faktor tenaga kerja dalam perekonomian dijelaskan oleh David Ricardo yang merupakan salah satu ahli ekonomi dari mazhab klasik. Pada dasarnya produktivitas tenaga kerja dapat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu akumulasi modal dan kemajuan teknologi. Kedua hal tersebut selain dapat meningkatkan produktivitas juga mampu menghambat adanya hukum kenaikan hasil yang semakin berkurang (*the law of diminishing returns*). Sehingga proses pertumbuhan dapat terjadi dari hasil dari tarik menarik antara hukum kenaikan hasil yang semakin berkurang (*the law of diminishing returns*) dengan kemajuan teknologi (Arsyad, 2010:79-81).

Hubungan produktivitas tenaga kerja dengan pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan melalui sudut pandang neoklasik Solow. Teori tersebut merupakan hasil pengembangan dari teori pertumbuhan Harrod Domar dengan menambahkan faktor tenaga kerja dan kemajuan teknologi. Perbedaan antara teori pertumbuhan Harrod Domar dan teori pertumbuhan neoklasik selain yang disebutkan di atas yaitu jika teori Harrod Domar mengisyaratkan adanya skala hasil tetap dengan koefisien baku, teori pertumbuhan neoklasik Solow menjelaskan adanya skala hasil yang berkurang (*the law of diminishing returns*) dari tenaga kerja dan modal apabila dilakukan analisis secara terpisah (Todaro dan Smith, 2006:150).

### 2.2.1 Teori Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Pertanian

Teori dualisme Lewis memberikan penjelasan bahwa di sektor pertanian produktivitas tenaga kerjanya cenderung rendah (Kuncoro, 2006:58). Hal ini disebabkan oleh kualitas tenaga kerja yang rendah namun kuantitas tenaga kerjanya relatif banyak. Sehingga terjadi surplus tenaga kerja dengan ditandai oleh nilai produk marginal (*marginal product*) tenaga kerja yang bernilai nol.

Kondisi tenaga kerja sektor pertanian di atas berarti bahwa fungsi produksi pada sektor pertanian telah mencapai kondisi berlakunya hukum *law of diminishing return*.



Pengurangan jumlah tenaga kerja tidak akan menyebabkan menurunnya jumlah output yang diproduksi. Sedangkan penambahan jumlah tenaga kerja tidak akan meningkatkan jumlah output yang diproduksi melainkan akan menurunkan total produksi yang ada. Menurut Gary Fields dalam Todaro dan Smith (2006:251), proses pertumbuhan yang berfokus dari sektor pertanian akan menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dan distribusi pendapatan yang lebih merata sehingga pada akhirnya akan mampu mengurangi tingkat kemiskinan. Jika dihubungkan dengan kurva Lorenz pertumbuhan yang tinggi pada sektor tradisional yaitu sektor pertanian akan mendorong kurva Lorenz bergeser ke atas atau menuju garis pemerataan.

### **2.2.2 Teori Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Industri**

Kuncoro (2006:58) menjelaskan mengenai teori pembangunan Arthur Lewis yang menyebutkan adanya tingkat produktivitas yang tinggi pada input sektor industri, termasuk di dalamnya adalah tenaga kerja. Nilai dari produk marginal tenaga kerja pada sektor industri masih bernilai positif. Sehingga peningkatan jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor ini akan meningkatkan tingkat produksi yang ada. Sedangkan penurunan dalam jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor ini akan mengakibatkan menurunnya tingkat produksi pada sektor tersebut. Menurut teori Lewis ini produktivitas tenaga kerja sektor industri adalah cukup tinggi. Hal ini disebabkan produk marginal (*marginal product*) bernilai positif. Pada saat produktivitas tenaga kerja tinggi maka akan berdampak pada tingginya pendapatan dan tingginya pertumbuhan ekonomi yang di dorong oleh sektor industri.

Menurut Gary Fields dalam Todaro dan Smith (2006:251), proses pertumbuhan yang berfokus dari sektor modern yaitu sektor industri akan menghasilkan distribusi pendapatan yang relatif tidak merata atau terjadi kesenjangan. Jika dihubungkan dengan kurva Lorenz pertumbuhan yang tinggi yang berasal dari sektor industri akan mendorong kurva Lorenz bergeser ke bawah atau menjauhi garis pemerataan.



## **2.3 Faktor-faktor Terkait Produktivitas Tenaga Kerja**

### **2.3.1 Upah Minimum (Wages)**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 1 angka 30 upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Jika mengacu pada definisi tersebut, satu hal yang menjadi poin penting dalam sistem pengupahan, yakni perjanjian kerja (kontrak kerja) dan kesepakatan (Boldrin dan Horvath, 1995).

Upah di lain sisi akan memperbaiki tingkat kesejahteraan pekerja, di lain pihak kenaikan upah akan meningkatkan biaya input produksi yang akan mengurangi laba perusahaan. Hubungan antara upah minimum dan pekerjaan tetap menjadi salah satu topik yang paling banyak dipelajari selama bertahun-tahun, apalagi dalam membangun kesepakatan dan perjanjian besaran upah biasanya diwarnai dengan perselisihan. Penyebabnya, pekerja menginginkan kenaikan upah yang tinggi, sementara perusahaan (pengusaha) mengharapkan kenaikan tidak signifikan untuk menjaga tingkat laba. Dasar pijakan yang selalu dipegang pemberi kerja yakni teori ekonomi neoklasik menghadirkan prediksi yang jelas dimana ketika harga tenaga kerja meningkat, pengusaha akan menuntut lebih sedikit tenaga kerja (Meer dan West, 2015).

Kenaikan upah minimum yang terlalu besar apalagi tidak diikuti dengan peningkatan produktivitas dapat mengganggu iklim investasi, sebab investor dapat melakukan relokasi investasi yang akan mengakibatkan ledakan pengangguran. Maka disini menjadi jelas bahwa kenaikan upah diharapkan dapat mendorong produktivitas tenaga kerja, studi tentang tingkat hubungan keduanya telah banyak dibuktikan secara empiris (Feldstein, 2008; Ramstetter, 2004).

### **2.3.2 Share Sektor Pertanian**

Sektor pertanian memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi berdampingan dengan sektor lainnya, dalam pembentukan PDB peranan sektor pertanian memang makin mengalami penurunan seiring dengan meningkatnya pangsa sektor industri dan jasa. Sekalipun pangsa sektor pertanian terus menurun secara



nasional, akan tetapi sebagian besar penduduk Indonesia masih menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian. Apalagi mayoritas daerah di Indonesia, sektor pertanian masih menjadi penopang pembentukan PDRB. Selain itu dilihat dari total ekspor Indonesia, produk pertanian merupakan penyumbang terbesar kedua setelah hasil industri.

Kemajuan ekonomi, pendapatan per kapita masyarakat makin meningkat memberikan efek terhadap meningkatnya kebutuhan lahan untuk pemukiman, kawasan industri dan kegiatan lainnya mengakibatkan alih fungsi lahan terus terjadi. Akibatnya lahan pertanian makin sempit, disaat yang sama pekerja di sektor pertanian masih tetap tinggi pada akhirnya produktivitas tenaga kerja disektor pertanian makin menurun. Menurut Restuccia, Tao dan Zhu (2008), produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian yang rendah secara agregat menyumbang dan bertanggungjawab di negara-negara miskin. Berbeda halnya dengan negara maju tingkat produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian cukup tinggi, sebagai dampak makin menurunnya jumlah pekerja di sektor pertanian bergeser ke sektor industri. Oleh sebab itu perbedaan produktivitas tenaga kerja ditentukan oleh modernisasi kegiatan pertanian, pangsa lapangan kerja dan produktivitas tenaga kerja di pertanian.

### **2.3.3 Share Sektor Industri**

Kegiatan industri sangat diperlukan dalam pembangunan ekonomi, sebab sektor ini memberikan multiplier effect, menyerap banyak tenaga kerja, sekaligus menandai perubahan struktur ekonomi dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern. Berangkat dari kondisi tersebut, maka industrialisasi sudah menjadi keharusan, sebab industrialisasi bertujuan meningkatkan nilai tambah seluruh sektor ekonomi dengan sektor industri pengolahan sebagai leading sector, artinya dengan adanya perkembangan industri maka akan memacu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor lainnya. Industrialisasi menjamin kelangsungan proses pembangunan ekonomi jangka panjang dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan yang menghasilkan pendapatan perkapita setiap tahun.

Secara agregat, pangsa sektor industri terus meningkat dari tahun ketahun, sekalipun demikian penyebaran kegiatan industri di tanah air masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Kegiatan industri ke depan tentu saja diharapkan terus tumbuh, namun



tantangannya cukup beragam termasuk produktivitas tenaga kerja di sektor industri masih rendah bila dibandingkan dengan negara lain. Padahal salah satu faktor penting meningkatkan sektor industri yakni investasi yang ditunjang oleh tenaga kerja produktif. Sebaliknya meningkatnya pangsa sektor industri akan mendorong produktivitas tenaga kerja. Holman, Joyeux dan Kask (2008) menjelaskan produktivitas tenaga kerja adalah indikator efisiensi produktif yang mengukur hubungan antara output industri dan jam kerja yang digunakan dalam memproduksi output.

### **2.3.4 Pembiayaan Sektor Pendidikan**

Produktivitas tenaga kerja sangat diperlukan dalam mendorong kemajuan ekonomi, sementara produktivitas ditentukan oleh mutu sumber daya manusia yang dihasilkan dari pendidikan yang berkualitas, penyediaan fasilitas sosial dan pengembangan *soft skill* yang keseluruhannya membutuhkan biaya. Negaranegara maju dan negara Asia Timur seperti, Jepang, Korea Selatan, Tiongkok dan menyusul Vietnam telah lama menjadikan sektor pendidikan sebagai prioritas utama pembiayaan. Sementara Indonesia baru mulai pasca reformasi tahun 1998, sektor pendidikan mendapatkan alokasi pembiayaan minimal 20 persen dalam APBN. Produktivitas kerja juga ditentukan oleh penggunaan teknologi serta pengalaman kerja, keseluruhannya juga membutuhkan biaya yang cukup besar. Hubungan antara pembiayaan sektor pendidikan dengan produktivitas tenaga kerja memiliki korelasi yang kuat, dimana pembiayaan makin meningkat dengan sendirinya akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga mereka makin produktif (Fadilah, Ananda dan Kaluge, 2018; Appiah, 2017; Annabi, N. Harvey, S. & Lan, 2011).

### **2.3.5 Tingkat Pendidikan Sekolah Menengah**

Pendidikan menjadi faktor penting untuk menciptakan kemajuan, dengan makin tinggi tingkat pendidikan akan melahirkan inisiatif untuk meningkatkan produktivitas pada akhirnya mendorong kemajuan ekonomi. Ozturk (2001) menjelaskan bahwa pendidikan salah satu faktor fundamental pembangunan, meningkatkan kualitas hidup mereka dan mengarah pada manfaat sosial yang luas bagi individu dan masyarakat. Pendidikan meningkatkan produktivitas dan kreativitas orang dan mempromosikan kewirausahaan dan kemajuan teknologi. Untuk selanjutnya, Sahlberg (2006), diasumsikan bahwa untuk meningkatkan daya saing ekonomi, warga negara harus



memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk keberhasilan warga negara dan ekonomi berbasis pengetahuan. Berangkat dari pemahaman tersebut banyak negara melakukan reformasi pendidikan berskala besar karena dianggap mendesak untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mempromosikan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi melalui perluasan dan peningkatan pendidikan.

### **2.3.5 Angka Harapan Hidup**

Tingkat kesehatan seseorang yang baik memberikan efek terhadap produktivitas, pekerja yang mengalami gangguan kesehatan maka pekerja tersebut bekerja tidak optimal. Ada beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan penduduk, seperti tingkat kematian bayi, angka kesakitan/morbiditas, angka harapan hidup, angka kematian kasar, fasilitas kesehatan. Untuk kajian ini indikator yang digunakan yakni angka harapan hidup, dari berbagai temuan menjelaskan bahwa peningkatan umur panjang menyebabkan tingkat aktivitas yang lebih tinggi di pasar tenaga kerja, dengan tingkat produktivitas yang lebih baik (Aísa, Pueyo dan Sanso, 2011), dan Bloom et al. (2007), menjelaskan angka harapan hidup yang lebih tinggi memiliki efek positif pada tingkat partisipasi orang tua di pasar tenaga kerja.

## **2.4 Ekonomi Kerthi Bali**

Konsep Ekonomi Kerthi Bali muncul guna memperkuat struktur dan fundamental perekonomian Bali. Ekonomi Kerthi Bali adalah ekonomi untuk mewujudkan Bali Berdikari dalam Bidang Ekonomi, dibangun dan dikembangkan berlandaskan nilai-nilai filosofi *Sad Kerthi* dengan menerapkan 11 (sebelas) prinsip, yaitu (Koster, 2021):

- 1) Ekonomi yang dibangun/dikembangkan dari sikap mensyukuri/memuliakan kekayaan, keunikan, dan keunggulan sumber daya lokal Alam Bali beserta isinya sebagai anugerah dari *Hyang* Pencipta.
- 2) Ekonomi yang dibangun/dikembangkan sesuai potensi sumber daya lokal Alam Bali beserta isinya.
- 3) Ekonomi yang dibangun/dikembangkan oleh *Krama* Bali secara inklusif, kreatif, dan inovatif.
- 4) Ekonomi yang dibangun/dikembangkan berbasis nilai-nilai adat, tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal Bali.



- 5) Ekonomi yang dibangun/dikembangkan dengan menjaga ekosistem Alam dan Budaya secara berkelanjutan.
- 6) Ekonomi yang dibangun/dikembangkan untuk meningkatkan kapasitas perekonomian lokal Bali, berkualitas, bernilai tambah, dan berdaya saing.
- 7) Ekonomi yang dibangun/dikembangkan dengan mengakomodasi penerapan/perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta teknologi digital.
- 8) Ekonomi yang memberi manfaat nyata guna meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan *Krama* Bali secara *sakala-niskala*.
- 9) Ekonomi yang dibangun/dikembangkan dengan asas gotong-royong.
- 10) Ekonomi yang dibangun/dikembangkan untuk meningkatkan ketangguhan menghadapi dinamika perkembangan zaman secara lokal, nasional, dan global.
- 11) Ekonomi yang menumbuhkan spirit *jengah* dan cinta/bangga sebagai *Krama* Bali.

Berdasarkan keorisinilan dan keunggulan sumber daya lokal Bali (alam, *krama*, dan kebudayaan Bali), maka konsep Ekonomi Kerthi Bali menjabarkan 6 (enam) sektor unggulan sebagai pilar perekonomian Bali, yaitu (Koster, 2021):

- 1) sektor pertanian dalam arti luas, termasuk peternakan dan perkebunan;
- 2) sektor kelautan/perikanan;
- 3) sektor industri;
- 4) sektor Industri kecil Menengah (IKM), Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dan Koperasi;
- 5) sektor ekonomi kreatif dan digital; dan
- 6) sektor pariwisata.

Seperti yang sudah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya bahwa pandemi COVID-19 berdampak negatif terhadap pembangunan di Provinsi Bali yang rentan terhadap guncangan di sektor pariwisata. Oleh karena itu, selain strategi pemulihan juga diperlukan strategi transformasi ekonomi agar Provinsi Bali mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Strategi transformasi tersebut diharapkan dapat memperkuat ketahanan ekonomi Bali supaya lebih terdiversifikasi dan tidak tergantung hanya kepada pariwisata serta membangun EKONOMI KERTHI BALI menuju BALI ERA BARU yang HIJAU, TANGGUH DAN SEJAHTERA sekaligus mendukung tercapainya Visi Indonesia 2045.



Strategi transformasi ekonomi menuju Bali era baru yang hijau, tangguh dan sejahtera meliputi beberapa agenda transformasi yaitu:

1) Bali Pintar dan Sehat

Manusia adalah pelaku sekaligus penerima manfaat utama dalam proses pembangunan ekonomi. Sehingga pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah bagian terpenting dalam pembangunan ekonomi. Penguatan kapasitas dan kapabilitas SDM adalah tujuan akhir dari pembangunan. Dengan demikian transformasi ekonomi Bali memerlukan SDM yang pintar dan sehat agar pembangunan ekonomi dapat berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2) Bali Produktif

Peningkatan produktivitas berperan penting untuk mencapai perekonomian yang mampu tumbuh tinggi dan berkelanjutan. Peningkatan produktivitas perlu dilakukan pada seluruh sektor (*within sector*), diiringi dengan pergeseran struktur ekonomi menuju sektor-sektor bernilai tambah tinggi (*between sectors*). Pada dasarnya Provinsi Bali memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan produktivitas dengan melakukan peningkatan kualitas tenaga kerja dan diversifikasi sektor ekonomi. Upaya peningkatan produktivitas dilakukan dengan melakukan peningkatan produktivitas tenaga kerja, modernisasi pertanian, industrialisasi, penguatan pariwisata, serta penguatan UMKM dan ekonomi kreatif.

3) Bali Hijau

Transformasi ekonomi Bali perlu memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga sumber daya alam Bali dapat dikembangkan secara optimal untuk kebutuhan saat ini maupun untuk generasi mendatang, yang diwujudkan ke dalam pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkualitas, dan berkelanjutan. Hal tersebut dapat dicapai dengan meningkatkan penggunaan energi baru terbarukan, pemanfaatan transportasi yang ramah lingkungan, memperbaiki pengelolaan sampah dan limbah berbahaya, melakukan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta menerapkan pembangunan *blue economy*.

4) Bali Terintegrasi

Terciptanya integrasi ekonomi internal Bali dan antara Bali dengan wilayah lain merupakan komponen penting dalam transformasi ekonomi Bali. Integrasi ekonomi



dapat membantu upaya diversifikasi ekonomi serta meningkatkan aktivitas perdagangan domestik dan internasional. Hal tersebut dicapai dengan memperkuat konektivitas internal Bali dan antara Bali dengan luar negeri dan kawasan lain seperti Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan bagian timur Jawa Timur, serta penguatan Bali sebagai bagian dari rantai pasok domestik dan global.

5) Bali Smart Island

Digitalisasi di berbagai bidang tidak bisa dihindari di masa depan karena sudah menjadi sebuah keniscayaan untuk akselerasi peningkatan ekonomi, termasuk bagi Bali yang memiliki potensi di pariwisata. Digitalisasi berpotensi mendorong inovasi, menghasilkan efisiensi ekonomi dan lingkungan, serta meningkatkan produktivitas, termasuk di sektor pariwisata (OECD, 2017). Kondisi tersebut sejalan dengan keunggulan komparatif (*comparative advantage*) Provinsi Bali di sektor pariwisata. Digitalisasi di Bali menuju Bali Smart Island dicapai dengan mempercepat pembangunan infrastruktur digital, meningkatkan kualitas SDM digital, mempercepat pemanfaatan teknologi digital di berbagai sektor, dan menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan ekosistem digital termasuk regulasi dan kebijakan yang mendukung.

6) Bali Kondusif

Untuk melaksanakan berbagai agenda transformasi ekonomi Bali dengan baik, diperlukan kondisi Bali yang kondusif. Hal tersebut diupayakan melalui penguatan berbagai faktor pengungkit (*enabler*) di antaranya penguatan keuangan daerah, peningkatan pembiayaan inovatif, perbaikan kemudahan berusaha, serta percepatan reformasi birokrasi dan kelembagaan.



## **BAB III**

### **METODOLOGI PELAKSANAAN KEGIATAN**

#### **3.1 Data dan Metode Pengumpulan Data**

Penyusunan kajian ini menggunakan pendekatan *mix method* (kualitatif serta kuantitatif) secara *embedded*. Pendekatan kualitatif akan digunakan dalam menganalisis dan merumuskan kebijakan serta strategi untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja di Bali. Sedangkan pendekatan kuantitatif akan digunakan untuk melakukan analisis atas data-data makro maupun mikro dengan pendekatan statistik dan ekonometrika.

Data merupakan kumpulan fakta, angka, objek, simbol dan peristiwa yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Dalam kajian ini, data yang digunakan dibedakan berdasarkan sifatnya yaitu:

- 1) Data kuantitatif menunjukkan kuantitas, bentuk angka absolut (*parametric*) sehingga dapat ditentukan magnitudenya (besarannya). Data kuantitatif yang digunakan adalah berbagai ukuran terkait dengan perekonomian, ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, dan lainnya.
- 2) Data kualitatif merupakan data yang berupa penjelasan-penjelasan menunjukkan kualitas, bentuk angka *non-parametric (ordinal dan nominal)*, memiliki ciri terdiri dari dua atau lebih atribut, tidak mempunyai ranking atau peringkat. Data kualitatif dalam penelitian ini adalah berupa penjelasan atau gambaran mengenai deskripsi kebijakan maupun program-program terkait dengan ketenagakerjaan.

Berdasarkan sumber data, kajian ini menggunakan data sekunder yang didukung dengan data primer:

- 1) Data Sekunder adalah data yang dikumpulkan dan dipublikasikan oleh pihak lain. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari instansi-instansi diantaranya dari Badan Pusat Statistik (BPS) termasuk data SAKERNAS (Survei Angkatan Kerja Nasional), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bali, Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali, dan instansi lainnya termasuk di Pemerintah Kabupaten/Kota. Data pendukung lainnya diperoleh melalui publikasi ilmiah, buku, dan media internet yang kredibel.



- 2) Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti. Data primer yang digunakan pada penelitian diperoleh dari kuesioner, wawancara mendalam dengan *expert* dan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan pengambil kebijakan yang berkaitan dengan strategi peningkatan produktivitas tenaga kerja di Provinsi Bali. Sedangkan kuesioner akan disampaikan kepada tenaga kerja *krama Bali* untuk memperoleh potret tentang kondisi tenaga kerja *krama Bali*, dimana data SAKERNAS belum memisahkan klasifikasi tenaga kerja tersebut.

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara (Sugiyono, 2018). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam kajian ini adalah teknik studi pustaka dan dokumentasi, wawancara mendalam, observasi non partisipan, dan FGD.

- Studi pustaka dan dokumentasi

Studi kepustakaan (*library research*) merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian yang berasal dari buku, jurnal-jurnal ilmiah, literatur-literatur, dan publikasi-publikasi lain yang layak dijadikan sumber untuk penelitian yang akan diteliti (Moto, 2019). Selaras dengan hal tersebut, Arikunto (2002) menjelaskan bahwa dokumentasi merupakan pencarian data mengenai hal-hal atau variabel penelitian bersumber dari berbagai media cetak. Informasi dokumen, literatur, dan data yang diamati dominan tentang ketenagakerjaan, termasuk publikasi dengan data yang berasal dari hasil SAKERNAS. SAKERNAS merupakan survei pendekatan rumah tangga yang dilakukan BPS dan secara khusus digunakan untuk mengumpulkan data ketenagakerjaan secara periodik. Tujuan umum SAKERNAS adalah menyediakan data pokok ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Sedangkan tujuan khususnya adalah memperoleh estimasi data jumlah penduduk bekerja, jumlah pengangguran, dan indikator pokok ketenagakerjaan serta perkembangannya di tingkat provinsi maupun nasional.

Adapun jumlah responden data SAKERNAS selama 5 (lima) tahun terakhir disajikan pada Tabel 3.1.



**Tabel 3.1**  
**Jumlah Responden SAKERNAS Provinsi Bali Tahun 2019-2023**

No	Tahun	Jumlah Responden (rumah tangga)
1	2019	5.815
2	2020	5.777
3	2021	5.723
4	2022	5.779
5	2023	5.430
	<b>Jumlah</b>	<b>28.524</b>

Sumber: BPS, 2024

- Kuesioner

Adapun *sample size* ditentukan dengan *quota and proportional sampling*, dimana *quota* ditentukan bahwa jumlah sampel sebanyak 500 orang. Sedangkan teknik proporsional dilakukan dengan menghitung secara proporsional berdasarkan jumlah krama mipil desa adat pada kabupaten/kota di Bali. Selanjutnya proporsi juga ditentukan berdasarkan persentase tenaga kerja pada tiap sektor, dimana sektor pertanian sebesar 18 persen, sektor industry pengolahan 14 persen, sektor akomodasi dan makan minum (pariwisata) 14 persen, serta sektor perdagangan dan lainnya sebesar 54 persen, dengan sebaran sebagaimana Tabel 3.2.

**Tabel 3.2**  
**Jumlah Sampel-Responden Tenaga Kerja Krama Bali**

No	Kabupaten/ Kota	Responden				Jumlah
		Sektor Pertanian	Sektor Manufaktur	Sektor Pariwisata	Sektor Perdagangan dan Lainnya	
1	Jembrana	5	4	4	17	30
2	Tabanan	2	1	1	6	10
3	Badung	6	5	5	19	35
4	Gianyar	34	27	27	102	190
5	Klungkung	9	7	7	26	49
6	Bangli	4	3	3	11	21
7	Karangasem	3	2	2	9	16
8	Buleleng	2	2	2	6	12
9	Denpasar	25	19	19	74	137
	<b>Provinsi Bali</b>	<b>90</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>270</b>	<b>500</b>



- Wawancara mendalam (*indepth interview*)  
Wawancara mendalam (selanjutnya disebut wawancara) merupakan kegiatan mengumpulkan data dari informan, baik untuk studi pendahuluan atau memperoleh informasi dari pihak-pihak yang memahami permasalahan penelitian (Sugiyono, 2010). Wawancara akan dilakukan dengan stakeholders ketenagakerjaan, dunia usaha, dan pendidikan (terutama vokasi).
- Observasi non partisipan  
Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak pada suatu gejala-gejala objek penelitian (Arischa dan Zulkarnain, 2019). Dimana dalam penelitian ini, peneliti tidak melibatkan dirinya dalam sistem yang diamati, sehingga disebut observasi non partisipan.
- *Focus Group Discussion* (FGD)  
FGD merupakan diskusi intensif yang dilaksanakan dengan para ahli yang memahami topik penelitian (Wijaya *et al.*, 2022). FGD akan dilaksanakan dengan melibatkan berbagai stakeholders terkait, seperti instansi pemerintah, akademisi, pengelola lembaga pendidikan dan pelatihan, serta asosiasi pelaku usaha.

## 3.2 Metode Analisis

### 3.2.1 Analisis Statistik Deskriptif

Pemetaan potensi lokal adalah aktivitas untuk mengidentifikasi dan menyusun potensi sosio-ekonomi dan potensi budaya komunitas lokal atau untuk mengetahui sebagai aktivitas yang berorientasi sosial (Runtunuwu *et al.*, 2022). Data yang terkumpul mengenai potensi data selanjutnya dianalisis dengan teknik analisis statistik deskriptif dalam bentuk rata-rata dan persentase. Sehingga hasil analisis tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan data-data terkait ketenagakerjaan.

Adapun 15 (lima belas) indikator utama yang akan disajikan dalam **profil tenaga kerja Provinsi Bali** berdasarkan data SAKERNAS, antara lain:

#### **Indikator 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)**

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah ukuran proporsi penduduk umur kerja yang terlibat aktif di pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan, yang memberikan indikasi ukuran relatif dari pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk



terlibat dalam produksi barang dan jasa. Rincian angkatan kerja menurut jenis kelamin dan kelompok umur memberikan profil distribusi penduduk yang aktif secara ekonomi. Secara umum, indikator ini digunakan untuk mengindikasikan besarnya penduduk umur kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah, dan menunjukkan besaran relatif pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk umur kerja.

### **Indikator 2. Rasio Penduduk Bekerja terhadap Jumlah Penduduk Usia Kerja (*Employment to Population Ratio-EPR*)**

Rasio penduduk yang bekerja terhadap jumlah penduduk usia kerja (*Employment to Population Ratio-EPR*) didefinisikan sebagai proporsi penduduk umur kerja suatu negara yang bekerja terhadap penduduk umur kerja. Rasio yang tinggi berarti sebagian besar penduduk suatu negara adalah bekerja, sementara rasio rendah berarti sebagian besar penduduk tidak terlibat langsung dalam kegiatan yang berhubungan dengan pasar, karena mereka menganggur atau (lebih mungkin) tidak termasuk dalam angkatan kerja, yang sering disebut sebagai Bukan Angkatan Kerja (BAK).

### **Indikator 3. Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama**

Kategorisasi status pekerjaan utama dapat membantu memahami dinamika pasar tenaga kerja dan tingkat pembangunan suatu negara. Selama bertahun-tahun, dengan kemajuan pembangunan, suatu negara biasanya akan mengharapkan untuk dapat melihat pergeseran pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa, dengan peningkatan jumlah penduduk bekerja yang digaji (buruh/karyawan/pegawai) dan penurunan jumlah pekerja keluarga yang sebelumnya berkontribusi/bekerja di sektor pertanian. Status pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan. Informasi mengenai status dalam pekerjaan utama dalam Sakernas adalah: Berusaha sendiri; Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar; Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar; Buruh/karyawan/pegawai; Pekerja bebas di pertanian; Pekerja bebas di nonpertanian; dan Pekerja keluarga/tak dibayar.

### **Indikator 4. Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama**



Informasi sektoral biasanya berguna untuk mengidentifikasi pergeseran yang besar dalam ketenagakerjaan dan tingkat pembangunan. Dalam literatur pembangunan ekonomi, tenaga kerja bergeser dari pertanian dan aktivitas tenaga kerja intensif lainnya ke sektor industri dan akhirnya menuju ke sektor jasa. Dalam prosesnya, penduduk yang bekerja berpindah dari desa ke kota. Klasifikasi lapangan pekerjaan disajikan dalam 17 kategori yang mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 yang berdasarkan *International Standard Industrial Classification (ISIC) revisi 4*. 17 kategori yang dimaksud adalah: A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; B. Pertambangan dan Penggalian; C. Industri Pengolahan; D. Pengadaan Listrik dan Gas; E. Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas Remediasi; F. Konstruksi; G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; H. Pengangkutan dan Pergudangan; I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum; J. Informasi dan Komunikasi; K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi; L. Real Estat; M,N. Aktivitas Profesional dan Perusahaan; O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; P. Pendidikan; Q. Aktivitas Kesehatan dan Kegiatan Sosial; R,S,T,U. Aktivitas Jasa Lainnya.

#### **Indikator 5. Penduduk yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan Utama**

Klasifikasi jenis pekerjaan menggunakan Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI) 2014 yang mengacu kepada International Standard Classification of Occupation (ISCO) 2008 dengan uraian jenis pekerjaan yang lebih rinci. Dalam penyajian publikasi ini klasifikasi tersebut dikonversikan ke Klasifikasi Jabatan Indonesia (KJI) 1982. Dengan kategori sebagai berikut: 0/1. Tenaga profesional, teknisi, dan yang sejenis; 2. Tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan; 3. Tenaga tata usaha dan yang sejenis; 4. Tenaga usaha penjualan; 5. Tenaga usaha jasa; 6. Tenaga usaha pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan; 7/8/9. Tenaga produksi, operator alat-alat angkutan, dan pekerja kasar; X/00. Lainnya.

#### **Indikator 6. Pekerja Patuh Waktu**

Jumlah jam kerja berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan orang yang bekerja serta tingkat produktivitas dan biaya tenaga kerja yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Mengukur tingkat dan tren jam-jam bekerja di masyarakat, untuk berbagai



kelompok penduduk bekerja dan penduduk bekerja secara individu, menjadi penting ketika melakukan pemantauan kerja dan kondisi hidup maupun ketika menganalisis perkembangan ekonomi. Indikator pekerja paruh waktu fokus pada individu dengan jumlah jam kerja kurang dari pekerjaan penuh-waktu (full time), yang merupakan proporsi dari total penduduk yang bekerja. Dalam hal ini, pekerja paruh waktu yang dimaksud adalah penduduk bekerja dengan jam kerja di bawah jam kerja penuh-waktu/normal, tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain. Untuk kasus Indonesia, batas yang digunakan adalah kurang dari 35 jam seminggu.

### **Indikator 7. Penduduk yang Bekerja Menurut Jam Kerja**

Indikator ini dapat menyajikan persentase penduduk bekerja menurut kelompok jam bekerja (biasanya atau sebenarnya): 0 jam, 1-34 jam, 35-48 jam, dan > 48jam.

### **Indikator 8. Penduduk yang Bekerja pada Kegiatan Informal**

Persentase penduduk bekerja di kegiatan informal adalah perkiraan jumlah orang yang bekerja di kegiatan informal dibandingkan dengan jumlah orang bekerja. Dalam ukuran dan pertumbuhan, kegiatan informal merupakan bagian penting dari kehidupan ekonomi, sosial, dan politik di sebagian besar negara berkembang, serta beberapa negara maju. Di negara-negara dengan tingkat pertumbuhan penduduk atau urbanisasi yang tinggi, ekonomi informal cenderung tumbuh untuk menyerap sebagian besar tenaga kerja. Secara sederhana kegiatan formal dan informal dari penduduk bekerja dapat diidentifikasi berdasarkan status pekerjaan utama (ICLS ke-13). Saat ini, BPS menentukan penduduk yang bekerja di kegiatan formal/informal berdasarkan status dalam pekerjaan utama. Penduduk yang bekerja pada kegiatan formal mencakup status berusaha dengan dibantu buruh tetap dan buruh/karyawan/pegawai, sisanya termasuk penduduk yang bekerja pada kegiatan informal.

### **Indikator 9. Pengangguran**

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) atau biasa disebut tingkat pengangguran menggambarkan proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif mencari dan bersedia untuk bekerja. Ini tidak boleh disalahartikan sebagai kesulitan ekonomi, meskipun korelasi antara tingkat pengangguran dan kemiskinan sering ada



dan cenderung memiliki korelasi negatif (tingkat pengangguran relatif rendah pada orang-orang miskin). Penganggur adalah penduduk yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, dan bersedia untuk bekerja. Bersama dengan rasio penduduk bekerja terhadap jumlah penduduk, tingkat pengangguran menyediakan indikator situasi pasar tenaga kerja di negara-negara yang mengumpulkan informasi tentang tenaga kerja. Secara spesifik, penganggur terbuka dalam Sakernas, terdiri atas: Penduduk tidak bekerja dan mencari pekerjaan; Penduduk tidak bekerja dan mempersiapkan usaha; Penduduk tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; Penduduk tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja, tetapi belum mulai bekerja.

### **Indikator 10. Pengangguran Menurut Pendidikan**

Tingkat pengangguran menurut pendidikan memberikan gambaran adanya penawaran tenaga kerja yang tidak terserap pada tingkat pendidikan tertentu. Kategori yang digunakan dalam indikator ini secara konseptual adalah berdasarkan tingkat Standar Internasional Klasifikasi Pendidikan (International Standard Classification of Education-ISCED-97) dengan penyesuaian. Pengelompokan tingkat pendidikan berdasarkan ISCED-97 adalah sebagai berikut: 1. Tidak pernah bersekolah adalah penduduk yang tidak/belum pernah bersekolah sama sekali; 2. Tingkat dasar, yaitu penduduk yang memiliki pendidikan tidak/belum tamat SD, SD/Ibtidaiyah, Paket A, SMP/Tsanawiyah, SMP Kejuruan, dan Paket B; 3. Tingkat menengah, yaitu penduduk dengan pendidikan SMA/Aliyah, SMK, dan Paket C; 4. Tingkat tinggi, yaitu penduduk yang memiliki ijazah Diploma I/II, Diploma III, Diploma IV/S1, dan S2/S3.

### **Indikator 11. Pengangguran pada Kelompok Umur**

Tingkat pengangguran penduduk umur muda memberikan gambaran proporsi angkatan kerja pada kelompok umur muda dengan kondisi: (a) tidak memiliki pekerjaan, (b) secara aktif mencari pekerjaan, dan (c) tersedia untuk bekerja dalam pasar tenaga kerja. Penduduk umur muda yang menganggur merupakan salah satu masalah yang memerlukan kebijakan khusus bagi banyak negara. Istilah "umur muda" yang digunakan dalam indikator ini mencakup orang yang berumur 15 sampai 24 tahun, sedangkan "orang dewasa" didefinisikan sebagai orang yang berumur 25 tahun ke atas. Rasio umur



muda terhadap umur dewasa menunjukkan TPTumur mudaterhadapTPTpenduduk dewasa.

### **Indikator 12. Setengah Penganggur (*Underemployment*)**

Setengah penganggur adalah penduduk bekerja dengan jumlah jam kerja di bawah ambang batas jam kerja normal (bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu yang lalu), dengan kondisi: 1. Penduduk yang dengan sukarela mencari pekerjaan tambahan, meliputi: a. Penduduk yang menginginkan pekerjaan lain untuk menambah jam kerjanya dari pekerjaannya yang sekarang; b. Penduduk yang menginginkan mendapat ganti dari pekerjaannya yang sekarang dengan pekerjaan lain yang mempunyai jam kerja lebih banyak. 2. Penduduk yang bersedia menerima pekerjaan tambahan.

### **Indikator 13. Tingkat Ketidakpastian**

Tingkat ketidakaktifan adalah proporsi penduduk umur kerja suatu negara yang tidak terlibat aktif dalam pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan (bukan angkatan kerja). Tingkat ketidakaktifan ini jika dijumlahkan dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) maka hasilnya adalah 100 persen. Dengan kata lain tingkat ketidakaktifan sama dengan 100 dikurangi dengan TPAK.

### **Indikator 14. Pencapaian Pendidikan**

Informasi tingkat pencapaian pendidikan saat ini merupakan indikator terbaik untuk melihat tingkat keahlian tenaga kerja. Pendidikan merupakan salah satu faktor penentu penting dalam menilai kemampuan suatu negara untuk bersaing dengan sukses di pasar dunia dan membuat efisiensi penggunaan kemajuan teknologi yang cepat. Indikator ini dikategorikan dalam empat tingkat pendidikan, yaitu tidak pernah bersekolah, tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat tinggi. Disamping itu, disajikan pula pencapaian pendidikan angkatan kerja menurut kelompok umur: umur muda (15-24 tahun), pemuda (16-30 tahun), dan "dewasa"berumur 25 tahun ke atas.

### **Indikator 15. Rata-rata Upah**

Indikator ini memberikan gambaran mengenai tingkat kesejahteraan penduduk bekerja. Salah satu keterbatasan variabel Sakernas adalah hanya menanyakan upah/pendapatan sebulan terakhir pada status pekerjaan tertentu. Sehingga yang dapat disajikan hanya



rata-rata upah/pendapatan sebulan terakhir buruh/karyawan/pegawai. Biaya kompensasi tidak dapat disajikan dalam laporan ini.

### 3.2.2 Analisis SWOT

Analisis SWOT merupakan alat analisis untuk mengidentifikasi serta merumuskan strategi berbasis pada faktor internal, yaitu kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*), serta faktor eksternal, baik peluang (*opportunities*) maupun tantangan (*threats*) (Wijaya et al., 2020). Hasil identifikasi faktor tersebut dituangkan dalam matriks SWOT.

**Tabel 3.3**  
**Matriks SWOT**

Faktor Internal Faktor Eksternal	Strengths (S) Daftar kekuatan yang dimiliki bisnis atau perusahaan	Weakness (W) Daftar kelemahan yang dimiliki bisnis atau perusahaan
Opportunities (O) Daftar peluang yang dimiliki bisnis dan dapat diidentifikasi	SO (Strengths-Opportunities) Memfaatkan kekuatan bisnis sebagai pembuka peluang usaha	WO (Weakness-Opportunities) Meminimalisir kelemahan agar dapat memanfaatkan peluang secara maksimal
Threats (T) Daftar seluruh ancaman bisnis yang dapat diidentifikasi	ST (Strengths-Threats) Memfaatkan kekuatan untuk mengatasi ancaman yang ada	WT (Weakness-Threats) Meminimalisir kelemahan dan hindari ancaman

### 3.2.3 Model Analisis Determinan Produktivitas Tenaga Kerja

Adapun faktor-faktor yang diasumsikan dapat berpengaruh terhadap produktivitas tenaga kerja antara lain kinerja makroekonomi, yang didalamnya terdiri dari unsur: 1) Upah Minimum Kabupaten/Kota (*wages*), variabel ini diasumsikan memiliki pengaruh yang kuat untuk mendorong peningkatan produktivitas pekerja. 2) Kontribusi sektor pertanian dan sektor industri, dimana makin besar kontribusi sektor pertanian pada umumnya produktivitas tenaga kerjanya relatif rendah, dan sebaliknya produktivitas tenaga kerja di sektor industri pengolahan relatif lebih tinggi. 3) Variabel pendidikan diukur dari pembiayaan (pengeluaran) pemerintah bidang pendidikan, kemudian Tingkat pendidikan penduduk masing-masing provinsi, khususnya Sekolah Menengah Umum dan Sekolah Menengah Kejuruan (*vokasi*). Asumsinya, bila pembiayaan pendidikan terus meningkat maka tingkat pendidikan masyarakat setiap



provinsi juga terus meningkat yang dapat mendorong produktivitas tenaga kerja. 4) Variabel kesehatan diukur dari angka harapan hidup, dimana seseorang angka harapan hidupnya yang tinggi menggambarkan kehidupan seseorang makin berkualitas sehingga kemampuan produktivitasnya tidak terganggu. Adapun model persamaan dari studi dapat dituliskan seperti berikut ini.

$$\frac{PDRB}{L}it = LnW_{it} + SAgr_{it} + SIndus_{it} + LnEducExp_{it} + SHSGen_{it} + SHSVoc_{it} + LE_{it} + \varepsilon$$

Keterangan:

$\frac{PDRB}{L}$	=	Produktivitas tenaga kerja masing-masing kab./kota (Rupiah)
W (wages)	=	Upah Minimum Kab./Kota (Rupiah)
SAgri	=	Share sektor pertanian masing-masing kab./kota (persen)
SIndus	=	Share sektor industri masing-masing kab./kota (persen)
EducExp	=	Pembiayaan sektor pendidikan masing-masing kab./kota (Rupiah)
SHSGen	=	Tingkat pendidikan SMA masing-masing kab./kota (jiwa)
SHSVoc	=	Tingkat pendidikan SMK masing-masing kab./kota (jiwa)
LE	=	Angka Harapan Hidup masing-masing kab./kota (persen)

Untuk analisis data berdasarkan hasil pengujian pemilihan teknik dalam pengolahan data panel telah dilakukan pengujian statistik melalui uji Hausman dan uji Chow.

### 3.2.4 Model Analisis Kesenjangan Kompetensi dan Kebutuhan

Pengangguran salah satunya terjadi akibat adanya kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki tenaga kerja dan kebutuhan dunia kerja. Sehingga diajukan model yang akan merepresentasikan beberapa faktor yang menentukan seseorang menganggur atau bekerja.



**Tabel 3.4**  
**Variabel Dalam Analisis Kesenjangan Kompetensi dan Kebutuhan**

Variabel	Notasi	Kategori
<b>Variabel Dependen</b>		
Status menganggur lulusan SMK/SMA	Y	0 = Bekerja 1 = Menganggur
<b>Variabel Independen</b>		
Umur	$X_1$	Numerik
Klasifikasi tempat tinggal	$X_2$	0 = Perkotaan 1 = Perdesaan
Status perkawinan	$X_3$	0 = Pernah kawin 1 = Belum kawin
Periode lulus	$X_4$	0 = Lulus lebih dari setahun yang lalu 1 = Lulus maksimal setahun yang lalu
Status disabilitas	$X_5$	0 = Nondisabilitas 1 = Disabilitas
Keikutsertaan pelatihan kerja	$X_6$	0 = Pernah mengikuti 1 = Tidak pernah mengikuti
Klasifikasi jurusan	$X_7$	0 = Lainnya 1 = Pariwisata 2 = Manajemen, bisnis, administrasi 3 = Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Model yang digunakan adalah model regresi logistik biner.

$$\text{logit}[P(Y = 1)] = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_{21} + \beta_3 x_{31} + \beta_4 x_{41} + \beta_5 x_{51} + \beta_6 x_{61} + \beta_7 x_{71} + \beta_8 x_{72} + \beta_9 x_{73}$$

dengan  $\beta_0$  adalah konstanta,  $\beta_j$  adalah koefisien regresi untuk variabel dummy ke- $j$  ( $j = 1, 2, \dots, 9$ ),  $x_1$  adalah umur, dan  $x_{21}$  sampai  $x_{73}$  adalah variabel independen dummy ke-2 sampai ke-7 dengan kategori tiap variabel dummy adalah 1, 2, atau 3 sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.4.

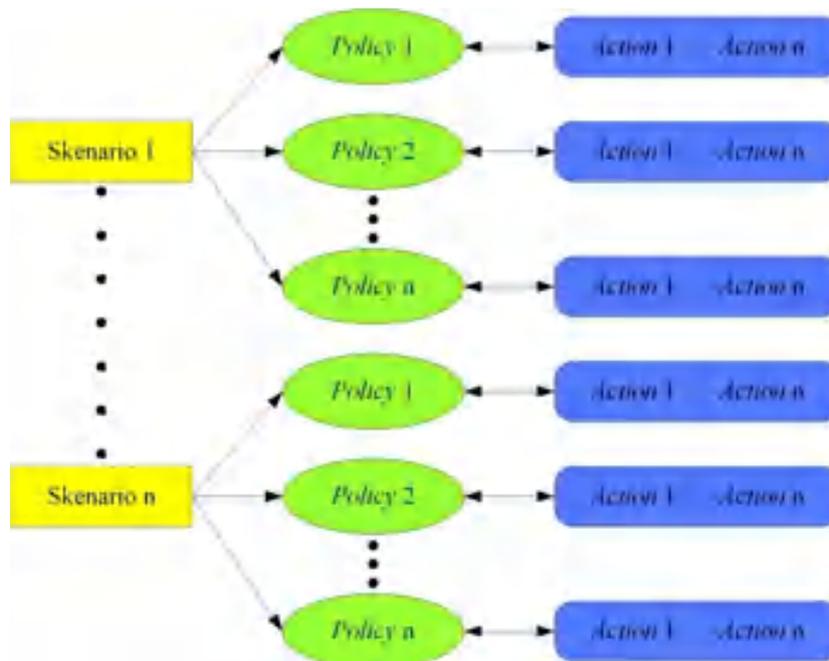
### 3.2.5 Analisis Kebijakan Berbasis Multi Criteria - MULTIPOL

Teknik analisis prospektif yang akan digunakan adalah analisis MULTIPOL. MULTIPOL yang dimaksud adalah "MULTI-criteria" dan "POLicy" dengan pendekatan *integrated participatory*. Tiga unsur utama pada analisis MULTIPOL yaitu *scenario*, *policy* (arah kebijakan), *actions* yang dijelaskan lebih lanjut pengertiannya oleh Fauzi (2019).

- 1) Skenario, merupakan pengembangan terstruktur yang bisa dilakukan di masa mendatang dimana tujuan dapat dicapai.

- 2) Kebijakan/*policy*, yaitu strategi yang diperlukan untuk mendukung skenario.
- 3) Program kegiatan/*actions*, dikenal juga dengan *policy measures* atau cara untuk mencapai tujuan yang merupakan potensi intervensi yang ditujukan untuk implementasi kebijakan.

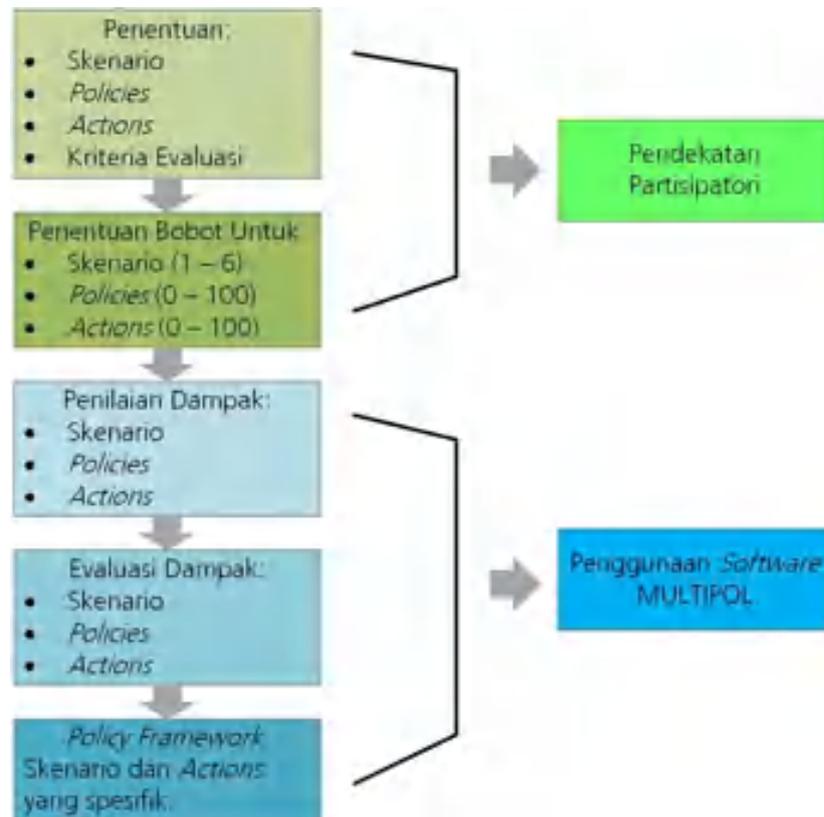
Jalur potensial kebijakan yang dapat disusun atas ketiga unsur utama melalui analisis MULTIPOL sebagaimana ditampilkan pada Gambar 3.1.



Sumber: Fauzi (2019)

**Gambar 3.1**  
**Jalur Potensial Kebijakan (*Hierarchy Policy*)**

Selanjutnya dapat dijelaskan langkah-langkah dalam analisis MULTIPOL yang terdiri dari lima tahap, sebagaimana Gambar 3.2. Tahap/blok pertama dan kedua yaitu penentuan skenario, *actions*, *policy*, kriteria, serta bobot, dimana tahap ini menggunakan pendekatan partisipatif. MULTIPOL menggunakan bobot yang berbeda untuk tiga unsur utama tersebut. Hal inilah yang membedakan MULTIPOL dengan pendekatan multi kriteria lainnya. Tahap berikutnya (blok ketiga sampai blok kelima) merupakan blok perangkat MULTIPOL, dimana *software* yang akan menentukan hierarki Tindakan (*actions*).



Sumber: Fauzi (2019)

**Gambar 3.2**  
**Tahapan Penggunaan MULTIPOL**

### 3.3 Personil

Kualifikasi tenaga yang akan dilibatkan dalam kajian adalah sebagai berikut:

#### 1. Tenaga Profesional

- a) Ketua Tim/Team Leader, dengan pendidikan S3 Ekonomi, dan memiliki pengalaman/keahlian di bidang pekerjaan/penelitian paling sedikit 5 (lima) tahun.
- b) Ahli Ketenagakerjaan, sebanyak 2 (dua) orang dengan pendidikan sekurang-kurangnya S2 Ekonomi Pembangunan yang kompeten dalam bidang ketenagakerjaan, dan memiliki pengalaman/keahlian di bidang pekerjaan/penelitian paling sedikit 3 (tiga) tahun.
- c) Ahli Perencanaan Strategis, sebanyak 1 (satu) orang dengan pendidikan sekurang-kurangnya S2 Ilmu Ekonomi Pembangunan yang kompeten dalam



- bidang perencanaan strategis/pembangunan, dan memiliki pengalaman/keahlian di bidang pekerjaan/penelitian paling sedikit 3 (tiga) tahun.
- d) Ahli Manajemen Bisnis, sebanyak 1 (satu) orang dengan pendidikan sekurang-kurangnya S2 Manajemen yang kompeten di bidang manajemen bisnis, dan memiliki pengalaman/keahlian di bidang pekerjaan/penelitian paling sedikit 3 (tiga) tahun.
  - e) Ahli Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, sebanyak 1 (satu) orang dengan pendidikan sekurang-kurangnya S2 Pendidikan Vokasi atau ilmu terapan atau yang kompeten di bidang pendidikan dan pelatihan vokasi, dan memiliki pengalaman/keahlian di bidang pekerjaan/penelitian paling sedikit 3 (tiga) tahun.
  - f) Ahli Kebijakan Publik, sebanyak 1 (satu) orang dengan pendidikan sekurang-kurangnya S2 Kebijakan Publik/Ilmu Ekonomi Pembangunan yang kompeten dalam bidang kebijakan publik, dan memiliki pengalaman/keahlian di bidang pekerjaan/penelitian paling sedikit 3 (tiga) tahun.
  - g) Ahli Hukum, sebanyak 1 (satu) orang dengan pendidikan sekurang-kurangnya S2 Hukum yang kompeten di bidang hukum ketenagakerjaan, dan memiliki pengalaman/keahlian di bidang pekerjaan/penelitian paling sedikit 3 (tiga) tahun.
  - h) Ahli Statistik, sebanyak 1 (satu) orang dengan pendidikan sekurang-kurangnya S2 Statistik/Ilmu Ekonomi Pembangunan yang kompeten di bidang statistik, dan memiliki pengalaman/keahlian di bidang pekerjaan/penelitian paling sedikit 3 (tiga) tahun.
2. Tenaga Pembantu Ahli/*Sub Professional Staff*  
Pencari data/surveyor, sebanyak 10 (sepuluh) orang, dengan pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana/Diploma dan berpengalaman minimal 1 (satu) tahun dalam pekerjaan sejenis. Surveyor bertugas melaksanakan *survey* dengan menyoal responden tenaga kerja *krama Bali* yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Bali, serta terbagi dalam tiga klaster lapangan usaha utama, yaitu tenaga kerja sektor pertanian, sektor industri manufaktur, dan sektor pariwisata.
3. Tenaga Pendukung/*Supporting Staff*



- a) Tenaga Administrasi dan Keuangan, sebanyak 2 (dua) orang dengan pendidikan sekurang-kurangnya lulusan SMA/SMK dan memiliki pengalaman/keahlian dalam bidang administrasi dan keuangan paling sedikit 1 (satu) tahun.

**Tabel 3.5**  
**Rencana Penggunaan Personil**

No	Jabatan	Nama
1.	Ketua Tim /Team Leader	1. Dr. I Nyoman Mahaendra Yasa, SE., M.Si.
2.	Ahli Ketenagakerjaan	1. Dr. Putu Ayu Pramitha Purwanti, SE., M.Si.
		2. Dr. Ni Nyoman Reni Suasih, S.IP., M.Si.
3.	Ahli Perencanaan Strategis	1. Prof. Dr. Drs. Made Kembar Sri Budhi, MP.
4.	Ahli Manajemen Bisnis	1. Ni Made Rastini, S.E., M.M.
5.	Ahli Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	1. Dr. Gede Sentanu, S.E., M.M.
6.	Ahli Kebijakan Publik	1. Dr. Ida Bagus Putu Purbadharmaja, S.E., M.E.
7.	Ahli Hukum	1. Dr. Ni Luh Gede Astariyani, S.H., M.H.
8.	Ahli Statistik	1. I Gusti Agung Ayu Apsari Anandari, M.S.E.
<b>Tenaga Sub Profesional</b>		
1.	Pencari data/surveyor	1. I Wayan Gita Ayu Kusuma, S.E., M.Si.
		2. Wika Mandala Warsita, S.E., M.M.
		3. Ni Putu Ganish Sanjiwani, S.E.
		4. Putu Wanda Agnestia, S.E.
		5. Pande Bagus Dharma Kusuma Putra Astawa, S.E.
		6. Ni Kadek Suarni, S.Pd.
		7. Putu Ari Mulyani, S.E., M.Si.
		8. Ida Ayu Dwi Udiyani, S.S.
		9. Ni Luh Putu Diah Cantika Wibawa, S.E.
		10. I Ketut Oka Purnawan, S.Sos.
<b>Tenaga Pendukung/Supporting Staff</b>		
1.	Tenaga Administrasi	1. Ni Wayan Ari Sudiartini, SE., M.Si.
2.	Tenaga Keuangan	2. Ni Ketut Rumini, SE.

### 3.4 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan selama dua bulan pada bulan Mei-Oktober 2024, dengan rincian sebagaimana disajikan pada Tabel 3.6.

**Tabel 3.6**  
**Jadwal Pelaksanaan Kegiatan**

No	Uraian Kegiatan	Bulan ke-					
		I	II	III	IV	V	VI
1	Persiapan operasional kegiatan						
2	Rapat tim dalam rangka persiapan pengumpulan data melalui kuesioner						
3	Pengumpulan data survei tenaga kerja krama Bali melalui kuesioner						
4	Penyediaan dan pengolahan data tenaga kerja (SAKERNAS)						
5	Rapat tim dalam rangka penyusunan profil tenaga kerja						
6	Rapat laporan bulanan I						
7	Presentasi laporan pendahuluan						
8	Revisi profil tenaga kerja dan laporan pendahuluan						
9	Rapat laporan bulanan II						
10	FGD perumusan strategi peningkatan kelas tenaga kerja						
11	Pembahasan tim dalam rangka penyusunan hasil FGD						
12	Rapat laporan bulanan III						
13	Presentasi laporan antara						
14	Revisi laporan antara						
15	Rapat laporan bulanan IV						
16	Tabulasi data survei tenaga kerja krama Bali						
17	Pembahasan hasil survei tenaga kerja krama Bali						
18	Rapat laporan bulanan V						
19	Presentasi laporan akhir						
20	Revisi laporan akhir						
21	Finalisasi laporan akhir dan administrasi						
22	Rapat laporan bulanan VI						

### 3.5 Rencana Anggaran dan Biaya (RAB)

Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) yang diusulkan untuk kegiatan Kajian Strategis Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Menuju Pekerja Kelas Menengah ke Atas Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Bali sebesar Rp294.256.550,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah). Secara garis besar penggunaan anggaran dan biaya tersebut adalah



untuk honorarium, belanja habis pakai (ATK), konsumsi kegiatan, pembelian data, hingga pencetakan dokumen. RAB disusun berdasarkan pada:

- 1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
- 2) Peraturan Gubernur Bali Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas.
- 3) Peraturan Gubernur Bali Nomor 76 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Provinsi Tahun 2023, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 76 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Provinsi Tahun 2023.
- 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.

Adapun rincian RAB disajikan pada lampiran.

### **3.6 Pelaporan**

Pelaporan kegiatan Kajian Strategis Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Menuju Pekerja Kelas Menengah ke Atas Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Bali disajikan secara bertahap meliputi:

#### **1. Laporan Bulanan**

Laporan bulanan memuat kemajuan/*progress* pekerjaan berupa fisik, administrasi, dan keuangan sampai dengan laporan dibuat, pekerjaan harian tenaga ahli yang bertugas, rencana pekerjaan berikutnya, kendala yang dihadapi, solusi yang diambil dan hal-hal lain yang perlu disampaikan. Laporan diserahkan selambat lambatnya hari ke 5 (lima) bulan berikutnya dan diterbitkan sebanyak 1 (satu) jilid setiap bulannya.



## **2. Laporan Pendahuluan**

Laporan pendahuluan diserahkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah SPMK dan sesudah mengadakan persiapan, pengumpulan data, dan peninjauan lapangan. Laporan pendahuluan yang diserahkan berisi garis besar kondisi pekerjaan; pemahaman terhadap KAK. Laporan pendahuluan juga berisi lampiran notulensi, absensi dan foto pelaksanaan diskusi pendahuluan. Laporan dicetak sebanyak 1 (satu) jilid.

## **3. Laporan Antara/Interim**

Pada pertengahan waktu pelaksanaan pekerjaan, tim peneliti wajib untuk menyerahkan Laporan Antara/Interim yang isinya memuat latar belakang, maksud dan tujuan, lokasi pekerjaan serta struktur laporan, kondisi lokasi pekerjaan, konsep perencanaan peneliti terhadap daerah pekerjaan, metode yang akan dipakai dan hasil analisis sementara sesuai dengan kajian yang telah dilaksanakan. Laporan dicetak sebanyak 1 (satu) jilid.

## **4. Laporan Akhir**

Laporan akhir adalah laporan hasil keseluruhan kegiatan sesuai dengan lingkup pekerjaan yang dimaksud dalam KAK dan sudah mendapat persetujuan dari pemilik pekerjaan. Laporan ini memuat latar belakang penyusunan laporan, maksud dan tujuan penyusunan laporan, lokasi pekerjaan serta struktur penulisan laporan, kondisi lokasi pekerjaan dan hasil keseluruhan kegiatan mulai dari pengumpulan data, perencanaan teknis beserta analisis hingga rekomendasi. Laporan dicetak sebanyak 1 (satu) jilid.

## **5. Softcopy Eksternal Hardisk 1 TB**

Keseluruhan laporan, foto dan aktivitas lain yang dilaksanakan oleh peneliti harus dikumpulkan dalam media penyimpanan data dengan kapasitas 1 (satu) TB dan dikumpulkan sebanyak 1 buah Eksternal Hardisk.



## BAB IV

### GAMBARAN UMUM/PROFIL KETENAGAKERJAAN PROVINSI BALI

Profil ketenagakerjaan Provinsi Bali dalam laporan ini menyajikan informasi statistik mengenai indikator utama ketenagakerjaan, berdasarkan data SAKERNAS tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Adapun indikator ketenagakerjaan yang dianalisis meliputi: (1) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK); (2) Rasio Penduduk Bekerja terhadap Jumlah Penduduk Usia Kerja (Employment to Population Ratio-EPR); (3) Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama; (4) Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama; (5) Penduduk yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan Utama; (6) Pekerja Patuh Waktu; (7) Penduduk yang Bekerja Menurut Jam Kerja; (8) Penduduk yang Bekerja pada Kegiatan Informal; (9) Pengangguran; (10) Pengangguran Menurut Pendidikan; (11) Pengangguran pada Kelompok Umur; (12) Setengah Penganggur (*Underemployment*); (13) Tingkat Ketidakpastian; (14) Pencapaian Pendidikan; dan (15) Rata-rata Upah.

#### 4.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Provinsi Bali dikenal sebagai destinasi wisata internasional yang menarik banyak pengunjung dari berbagai penjuru dunia. Hal ini turut mempengaruhi dinamika angkatan kerja di provinsi ini. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Bali menunjukkan variasi yang signifikan antar kabupaten dan kota, mencerminkan perbedaan kondisi ekonomi dan sosial di setiap daerah. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Bali dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sektor ekonomi dominan, tingkat pendidikan, dan infrastruktur. Data TPAK Bali dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan tren yang berbeda di setiap wilayah. Tabel 4.1 berikut ini menunjukkan Tingkat Partisipasi Tenaga Kerja menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali selama lima tahun terakhir.



**Tabel 4.1**  
**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Bali**  
**Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2019-2023 (Persen)**

Kabupaten/Kota	TPAK (Persen)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jembrana	67.36	75.92	81.26	80.6	80.05
Tabanan	75.42	75.47	74.98	76.93	74.16
Badung	72.6	72.69	72.52	72.8	73.79
Gianyar	76.11	71.27	69.88	80.26	77.26
Klungkung	76.05	75.27	72.83	79.81	79.88
Bangli	83.11	82.2	82.09	83.36	83.04
Karangasem	80.61	80.75	81.15	85.39	86.01
Buleleng	69.51	75.07	73.08	75.38	75.49
Denpasar	71.7	70.91	68.67	72.37	73.13
<b>Provinsi Bali</b>	<b>73.77</b>	<b>74.32</b>	<b>73.54</b>	<b>76.86</b>	<b>77.08</b>

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2024

Bila dilihat berdasarkan Tabel 4.1, maka dapat diketahui perkembangan TPAK Kabupaten/Kota selama lima tahun terakhir. Kabupaten Jembrana mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2020 dengan TPAK sebesar 75.92% dari 67.36% di tahun 2019. Tren ini terus meningkat hingga mencapai puncaknya pada tahun 2021 dengan 81.26%, meskipun sedikit menurun pada tahun-tahun berikutnya hingga 80.05% di tahun 2023. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh pengembangan sektor pertanian dan perikanan di wilayah tersebut.

Kabupaten Tabanan menunjukkan stabilitas TPAK yang relatif tinggi namun fluktuatif, mulai dari 75.42% di tahun 2019, sedikit meningkat menjadi 76.93% di tahun 2022, namun turun ke 74.16% di tahun 2023. Kabupaten ini dikenal dengan sektor pertaniannya yang kuat, namun mungkin menghadapi tantangan dalam menarik tenaga kerja muda yang lebih memilih peluang di sektor lain. Kabupaten Badung, dengan sektor pariwisata yang dominan, menunjukkan TPAK yang stabil di sekitar 72-73% selama lima tahun terakhir. Angka ini mencerminkan stabilitas ekonomi di kawasan pariwisata utama seperti Kuta dan Nusa Dua, yang terus menyediakan banyak lapangan pekerjaan.

Kabupaten Gianyar, yang terkenal dengan Ubud sebagai pusat seni dan budaya, mengalami fluktuasi TPAK yang cukup tajam. Dari 76.11% di tahun 2019 turun menjadi



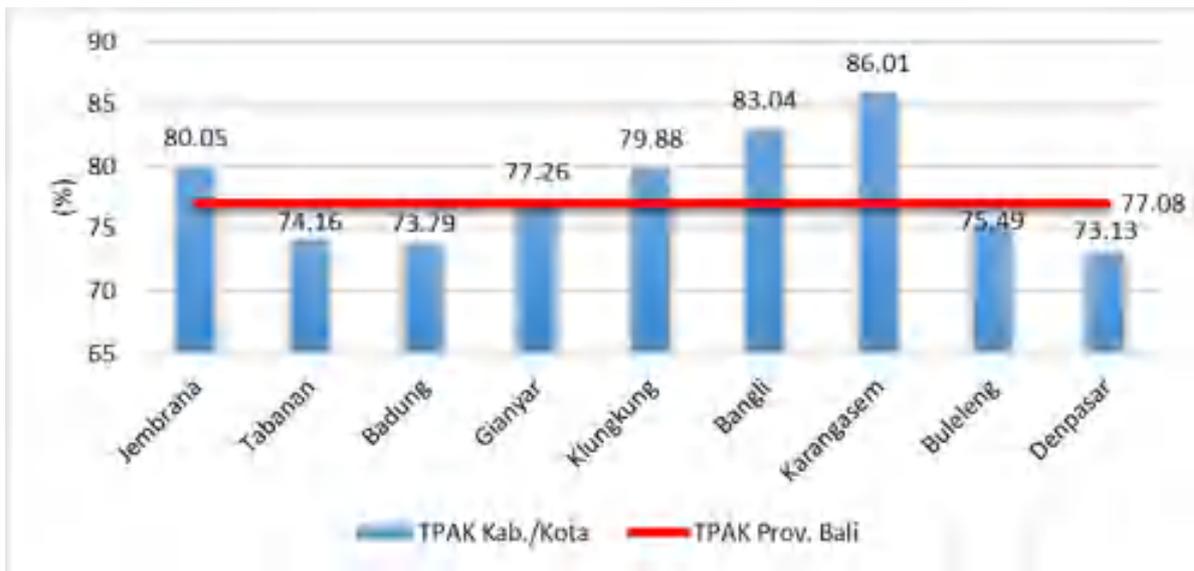
69.88% di tahun 2021, namun melonjak kembali ke 80.26% di tahun 2022. Hal ini mungkin mencerminkan dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor pariwisata dan seni yang menjadi andalan kabupaten ini. Kabupaten Klungkung juga menunjukkan pola TPAK yang mirip dengan Gianyar, dengan penurunan di tengah-tengah periode dan pemulihan cepat. Dari 76.05% di tahun 2019, turun ke 72.83% di tahun 2021, dan naik kembali ke 79.88% di tahun 2023. Ini bisa disebabkan oleh upaya revitalisasi pariwisata dan usaha kecil menengah.

Kabupaten Bangli menunjukkan tingkat TPAK yang sangat tinggi dan stabil, di atas 82% selama periode tersebut, mencapai puncaknya pada 83.36% di tahun 2022. Dimana di Kabupaten Bangli sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian. Kabupaten Karangasem mencatatkan peningkatan TPAK yang konsisten dari 80.61% di tahun 2019 menjadi 86.01% di tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan keberhasilan dalam penyerapan tenaga kerja di sektor-sektor seperti pertanian dan pariwisata.

Kabupaten Buleleng menunjukkan tren peningkatan dari 69.51% di tahun 2019 menjadi 75.49% di tahun 2023. Peningkatan ini mungkin disebabkan oleh pengembangan infrastruktur dan sektor pariwisata di bagian utara Bali. Kota Denpasar, sebagai ibu kota provinsi, menunjukkan fluktuasi TPAK dengan angka terendah 68.67% di tahun 2021 dan pemulihan ke 73.13% di tahun 2023. Variasi ini mungkin mencerminkan dampak ekonomi dari pandemi serta pergeseran di sektor jasa dan perdagangan.

Secara keseluruhan, Provinsi Bali menunjukkan peningkatan TPAK dari 73.77% di tahun 2019 menjadi 77.08% di tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dan penyerapan tenaga kerja yang lebih baik pasca pandemi COVID-19. Variasi antar kabupaten/kota mencerminkan perbedaan dalam kondisi ekonomi lokal dan upaya pengembangan masing-masing daerah.

Apabila ditinjau berdasarkan kondisi TPAK terkini (tahun 2023), Gambar 4.1 berikut memberikan gambaran komparasi antara TPAK Kabupaten/Kota dengan TPAK Provinsi Bali.



**Gambar 4.1**  
**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Bali**  
**Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2023 (Persen)**

Berdasarkan Gambar 4.1 dapat diketahui Kota Denpasar merupakan daerah dengan TPAK terendah (73,13%), sedangkan Kabupaten Karangasem dengan TPAK tertinggi (86,01%). Terdapat 4 (empat) Kabupaten/Kota yang memiliki TPAK di bawah TPAK Provinsi Bali, yaitu Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Tabanan, dan Kabupaten Buleleng. Sedangkan 5 (lima) kabupaten lainnya memiliki nilai TPAK lebih tinggi dari Provinsi Bali.

#### **4.2 Rasio Penduduk Bekerja terhadap Jumlah Penduduk Usia Kerja (*Employment to Population Ratio-EPR*)**

Rasio Penduduk Bekerja terhadap Jumlah Penduduk Usia Kerja adalah sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur proporsi penduduk yang aktif bekerja dibandingkan dengan seluruh penduduk yang berada dalam kelompok usia kerja. Kelompok usia kerja umumnya didefinisikan sebagai penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. Data rasio penduduk bekerja terhadap jumlah penduduk usia kerja memberikan gambaran tentang seberapa besar bagian dari populasi usia kerja yang berhasil memperoleh pekerjaan. Tingkat rasio yang tinggi menunjukkan pasar tenaga kerja yang sehat dengan banyak penduduk yang memiliki pekerjaan. Rasio yang tinggi dapat



menunjukkan ekonomi yang kuat, sementara rasio yang rendah dapat menunjukkan masalah dalam penciptaan lapangan kerja.

Data ini membantu dalam perencanaan dan pembuatan kebijakan. Pemerintah dapat menggunakan informasi ini untuk mengidentifikasi kebutuhan akan program pelatihan kerja, pendidikan, atau kebijakan penciptaan lapangan kerja. Rasio ini juga berguna untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas program-program yang bertujuan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan, seperti program pelatihan keterampilan atau insentif untuk investasi. Ada beberapa hal yang mempengaruhi tinggi rendahnya rasio penduduk bekerja terhadap jumlah penduduk kerja, antara lain kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, kebijakan pemerintah dibidang ketenagakerjaan, struktur usia penduduk, serta perubahan teknologi dan inovasi. Tabel 4.2 menunjukkan variasi rasio penduduk bekerja terhadap jumlah penduduk usia kerja di Provinsi Bali dari tahun 2019 hingga 2023 antar kabupaten dan kota.

**Tabel 4.2**  
**Rasio Penduduk Bekerja terhadap Jumlah Penduduk Usia Kerja Provinsi Bali (EPR) Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2019-2023 (Persen)**

Kabupaten/Kota	EPR (Persen)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jembrana	66.39	72.49	77.92	77.42	78.03
Tabanan	74.45	72.29	72.03	73.98	72.20
Badung	72.31	67.66	67.50	67.80	71.78
Gianyar	75.00	65.91	65.05	74.82	74.97
Klungkung	74.86	71.19	68.93	78.24	78.85
Bangli	82.48	80.67	80.62	82.73	82.41
Karangasem	80.11	78.79	79.26	82.75	83.76
Buleleng	67.34	71.17	69.15	71.46	72.77
Denpasar	70.06	65.51	63.85	68.70	71.05
<b>Provinsi Bali</b>	<b>72.61</b>	<b>70.14</b>	<b>69.59</b>	<b>73.17</b>	<b>75.00</b>

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2024

Kabupaten Jembrana mencatat peningkatan yang signifikan dalam rasio penduduk bekerja, dari 66.39% pada tahun 2019 menjadi 78.03% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan peningkatan kesempatan kerja yang stabil di kabupaten ini. Sementara itu, Kabupaten Tabanan mengalami fluktuasi dengan rasio yang sedikit menurun dari



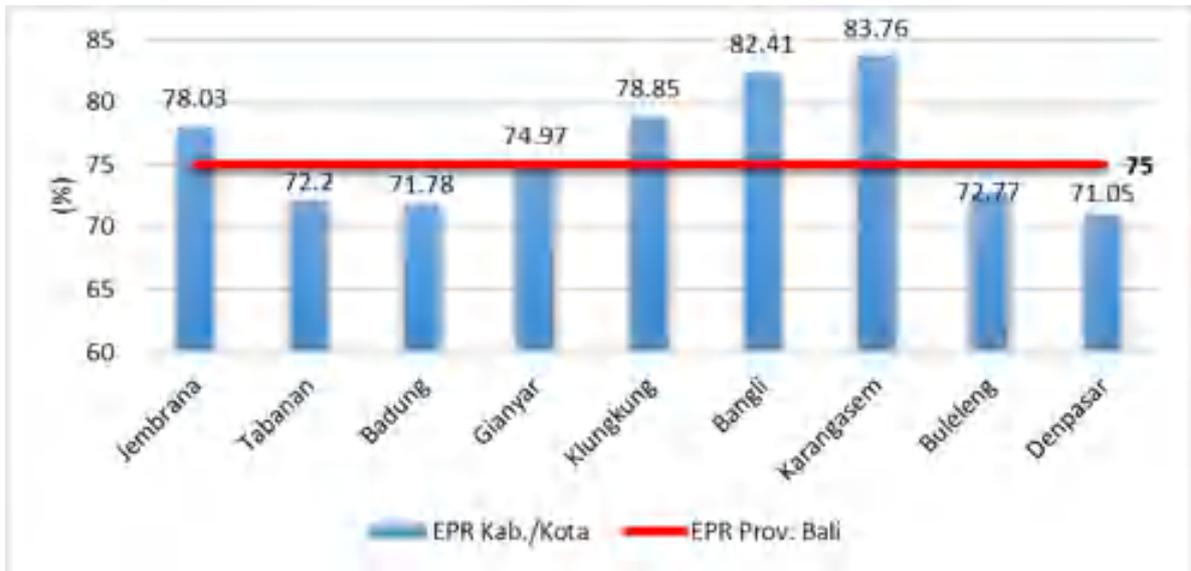
74.45% pada tahun 2019 menjadi 72.20% pada tahun 2023, setelah mengalami peningkatan sementara pada tahun 2022.

Kabupaten Badung menunjukkan tren penurunan pada awal periode, dari 72.31% pada tahun 2019 turun ke titik terendah 67.50% pada tahun 2021, namun pulih kembali menjadi 71.78% pada tahun 2023. Kabupaten Gianyar juga mencatat penurunan signifikan dari 75.00% pada tahun 2019 ke 65.05% pada tahun 2021, sebelum meningkat kembali ke 74.97% pada tahun 2023, mencerminkan pemulihan ekonomi pasca pandemi.

Kabupaten Klungkung mengalami peningkatan dalam rasio penduduk bekerja dari 74.86% pada tahun 2019 menjadi 78.85% pada tahun 2023, menunjukkan perbaikan dalam penyerapan tenaga kerja. Kabupaten Bangli mempertahankan rasio yang sangat tinggi dan stabil di atas 80% selama periode tersebut, dengan sedikit penurunan dari 82.73% pada tahun 2022 menjadi 82.41% pada tahun 2023. Kabupaten Karangasem menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari 80.11% pada tahun 2019 menjadi 83.76% pada tahun 2023, mencerminkan stabilitas dan pertumbuhan kesempatan kerja di wilayah tersebut.

Kabupaten Buleleng, setelah mengalami penurunan pada tahun 2021 ke 69.15%, kembali meningkat menjadi 72.77% pada tahun 2023. Pada Kota Denpasar, menunjukkan fluktuasi dengan rasio terendah pada 63.85% pada tahun 2021 dan meningkat kembali menjadi 71.05% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan dampak pandemi COVID-19 dan pemulihan berikutnya dalam kesempatan kerja di kota ini.

Secara keseluruhan, rasio penduduk bekerja di Provinsi Bali meningkat dari 72.61% pada tahun 2019 menjadi 75.00% pada tahun 2023. Data ini menunjukkan perbaikan dalam penyerapan tenaga kerja di Bali, mencerminkan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kesempatan kerja di berbagai kabupaten/kota. Apabila ditinjau berdasarkan kondisi EPR terkini (tahun 2023), Gambar 4.2 berikut memberikan gambaran komparasi antara EPR Kabupaten/Kota dengan EPR Provinsi Bali.



**Gambar 4.2**  
**Rasio Penduduk Bekerja terhadap Jumlah Penduduk Usia Kerja (EPR)**  
**Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2023 (Persen)**

Berdasarkan Gambar 4.2 diketahui bahwa saat ini (tahun 2023), EPR tertinggi yaitu di Kabupaten Karangasem (83,76%), sedangkan yang terendah adalah EPR Kota Denpasar (71,05%). Dimana terdapat 4 (empat) kabupaten yang memiliki nilai EPR di atas rata-rata EPR Provinsi Bali, yaitu Kabupaten Karangasem, Kabupaten Bangli, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Jembrana, sedangkan 5 (lima) Kabupaten/Kota lainnya memiliki nilai EPR di bawah rata-rata Provinsi Bali.

### 4.3 Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

Penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan utama adalah pengelompokan tenaga kerja berdasarkan jenis atau kategori pekerjaan utama yang mereka jalani. Status pekerjaan utama ini mencerminkan posisi atau peran seseorang dalam dunia kerja, yang mencakup berbagai bentuk hubungan kerja dan jenis pekerjaan yang dilakukan. Berikut adalah data penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut status pekerjaan utama di Provinsi Bali.



**Tabel 4.3**  
**Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Provinsi Bali (Orang)**

Status Dalam Pekerjaan Utama	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Provinsi Bali (Orang)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Berusaha Sendiri	407.568	389.571	394.473	449.057	478.358
Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Tidak Dibayar	368.398	423.321	446.591	413.995	380.853
Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar	91.657	70.473	72.273	75.983	82.005
Buruh/Karyawan	1.156.125	979.017	975.370	1.138.045	1.165.405
Pekerja Bebas Pertanian	62.809	69.253	46.865	63.474	64.390
Pekerja Bebas Non Pertanian	109.136	106.801	97.005	104.432	97.451
Pekerja Tak Dibayar/Pekerja Keluarga	273.313	384.983	409.277	362.084	349.354
<b>Jumlah</b>	<b>2.469.006</b>	<b>2.423.419</b>	<b>2.441.854</b>	<b>2.607.070</b>	<b>2.617.816</b>

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2024

Penduduk yang berusaha sendiri menunjukkan peningkatan yang konsisten selama periode ini, dari 407.568 orang pada tahun 2019 menjadi 478.358 orang pada tahun 2023. Ini mengindikasikan bahwa semakin banyak orang yang memilih untuk menjalankan usaha secara mandiri, yang bisa menjadi refleksi dari semangat kewirausahaan yang kuat di Bali. Sementara itu, jumlah penduduk yang berusaha dibantu buruh tidak tetap atau tidak dibayar mengalami fluktuasi. Jumlahnya meningkat signifikan dari 368.398 orang pada tahun 2019 menjadi 446.591 orang pada tahun 2021, namun kemudian menurun menjadi 380.853 orang pada tahun 2023. Hal ini mencerminkan ketidakpastian atau perubahan dalam model bisnis yang bergantung pada buruh tidak tetap.

Jumlah penduduk yang berusaha dibantu buruh tetap atau dibayar menunjukkan sedikit variasi, dengan jumlah terendah tercatat pada tahun 2020 sebanyak 70.473 orang dan meningkat menjadi 82.005 orang pada tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan adanya stabilitas dan kemungkinan peningkatan skala usaha yang membutuhkan tenaga kerja tetap.



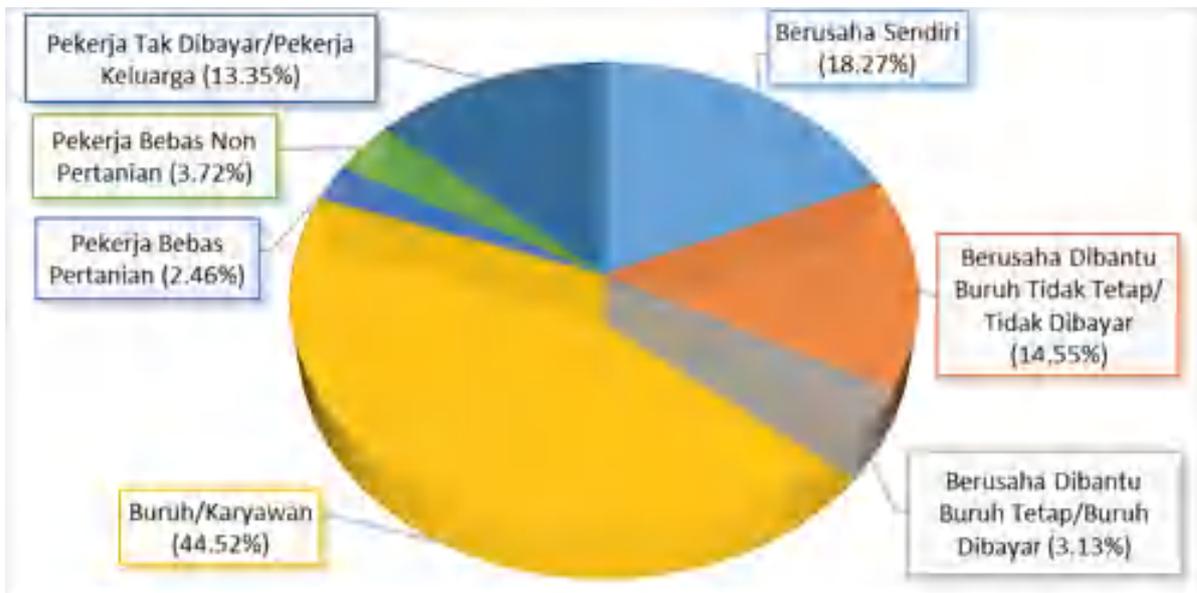
Buruh atau karyawan mengalami penurunan signifikan pada tahun 2020, turun dari 1.156.125 orang pada tahun 2019 menjadi 979.017 orang. Namun, jumlah ini pulih kembali dan bahkan melampaui jumlah tahun 2019 dengan mencapai 1.165.405 orang pada tahun 2023, mencerminkan pemulihan ekonomi dan peningkatan kesempatan kerja di sektor formal.

Pekerja bebas di sektor pertanian menunjukkan fluktuasi dengan penurunan pada tahun 2021 sebanyak 46.865 orang, namun kembali meningkat menjadi 64.390 orang pada tahun 2023. Tren serupa terlihat pada pekerja bebas non-pertanian yang mengalami penurunan pada tahun 2021 sebanyak 97.005 orang dan sedikit peningkatan hingga 97.451 orang pada tahun 2023.

Pekerja tak dibayar atau pekerja keluarga mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2020 hingga mencapai 384.983 orang dan puncaknya pada tahun 2021 sebanyak 409.277 orang, namun kemudian menurun menjadi 349.354 orang pada tahun 2023. Kondisi ini mencerminkan fluktuasi dalam sektor-sektor yang bergantung pada kerja keluarga atau ketidakstabilan ekonomi yang mendorong peningkatan kerja keluarga pada tahun-tahun tertentu.

Secara keseluruhan, jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja di Provinsi Bali meningkat dari 2.469.006 orang pada tahun 2019 menjadi 2.617.816 orang pada tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja yang berkelanjutan di Bali, meskipun dengan variasi di berbagai status pekerjaan utama.

Gambar 4.3 berikut menyajikan grafik persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut status pekerjaan utama di Provinsi Bali saat ini (tahun 2023). Dimana dominan status pekerjaan utama saat ini adalah sebagai buruh/karyawan (44,52%), berusaha sendiri (18,27%), berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar (14,55%), dan pekerja tak dibayar/pekerja keluarga sebesar 13,35%. Sedangkan sisanya adalah pekerja bebas non pertanian (3,72%), berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar (3,13%), dan pekerja bebas pertanian (2,46%).



**Gambar 4.3**  
**Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Provinsi Bali Tahun 2023 (Persen)**

#### 4.4 Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama

Penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama di Provinsi Bali menunjukkan variasi yang mencerminkan kompleksitas struktur ekonomi di wilayah tersebut. Sektor pertanian, misalnya, mungkin memiliki andil yang signifikan terutama di daerah rural, sementara sektor pariwisata dan jasa mungkin menjadi penyumbang utama lapangan pekerjaan di daerah yang lebih urban seperti Kota Denpasar atau Badung.

Selama beberapa tahun terakhir, tren pergeseran lapangan pekerjaan utama juga dapat tercermin dalam data ini. Misalnya, terjadi penurunan jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian seiring dengan meningkatnya urbanisasi dan diversifikasi ekonomi ke sektor-sektor lain seperti pariwisata, jasa, atau manufaktur. Pada saat yang sama, terjadi peningkatan jumlah penduduk yang bekerja di sektor jasa atau perdagangan sebagai respons terhadap pertumbuhan sektor tersebut.

Selain itu, perubahan dalam lapangan pekerjaan utama juga dapat mencerminkan dinamika ekonomi global dan nasional, seperti perubahan dalam permintaan pasar global, perkembangan teknologi, atau perubahan regulasi yang memengaruhi berbagai sektor ekonomi. Analisis mendalam terhadap data ini dapat



memberikan wawasan yang berharga tentang arah dan kebijakan yang dapat diambil untuk memperkuat sektor-sektor yang strategis dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

Data penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja menurut lapangan usaha di Provinsi Bali ditunjukkan pada tabel 4.4 berikut ini.

**Tabel 4.4**  
**Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha (17 Kategori) di Provinsi Bali (Orang)**

Lapangan Usaha	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha (Orang)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	462871	545533	534705	518584	495732
Pertambangan dan Penggalian	9627	9013	7859	6250	6093
Industri Pengolahan	368947	381746	394125	403698	384323
Pengadaan Listrik dan Gas	5709	5473	3703	6480	5202
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11870	8324	6486	8928	18255
Konstruksi	162469	159554	155461	176488	174496
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	480622	495533	511721	553557	559836
Transportasi dan Pergudangan	77347	59540	57669	85949	99521
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	327609	236386	233811	314733	357657
Informasi dan Komunikasi	12805	14360	16494	16943	12649
Jasa Keuangan dan Asuransi	71061	62230	62708	62632	55658
Real Estat	4092	3094	2738	3559	4629
Jasa Perusahaan	58490	42832	33764	51297	46330
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	125316	114051	136969	125737	114436



Lapangan Usaha	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha (Orang)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jaminan Sosial Wajib					
Jasa Pendidikan	100014	103537	109449	97073	109176
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	54886	51303	56262	60284	49101
Jasa lainnya	135271	130910	117930	114878	124722
<b>Jumlah</b>	<b>2469006</b>	<b>2423419</b>	<b>2441854</b>	<b>2607070</b>	<b>2617816</b>

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2024

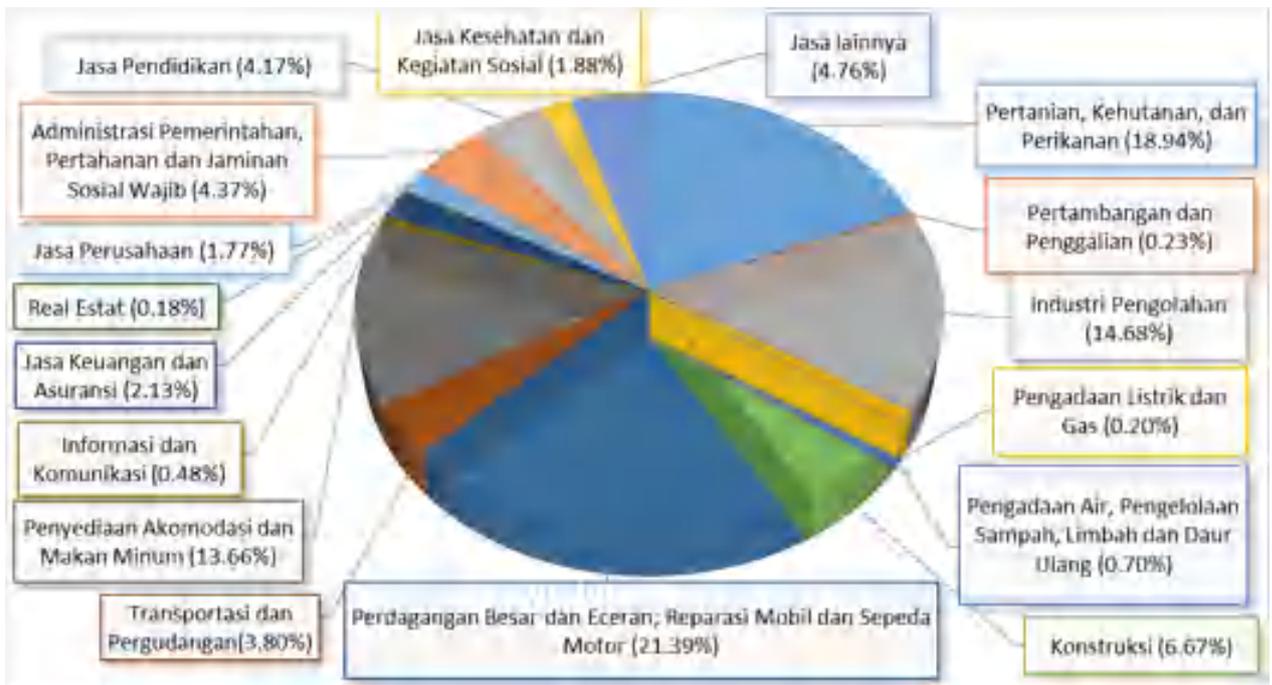
Data mengenai penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan usaha di Provinsi Bali dari tahun 2019 hingga 2023 memberikan gambaran yang mendalam tentang struktur ekonomi dan distribusi tenaga kerja di wilayah tersebut. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tetap menjadi salah satu penyumbang utama lapangan pekerjaan di Bali, meskipun terjadi penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, sektor ini menyediakan lapangan pekerjaan bagi 462.871 orang, namun turun menjadi 495.732 orang pada tahun 2023. Penurunan ini mungkin mencerminkan adanya urbanisasi dan pergeseran fokus ekonomi ke sektor lain.

Sektor perdagangan besar dan eceran, termasuk reparasi mobil dan sepeda motor, mengalami peningkatan signifikan dalam penyerapan tenaga kerja selama periode ini. Jumlah penduduk yang bekerja dalam sektor ini naik dari 480.622 orang pada tahun 2019 menjadi 559.836 orang pada tahun 2023. Hal ini mencerminkan pertumbuhan sektor perdagangan sebagai respons terhadap perkembangan ekonomi dan peningkatan konsumsi di Bali.

Sektor transportasi dan pergudangan juga menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam penyerapan tenaga kerja. Jumlah penduduk yang bekerja dalam sektor ini meningkat dari 77.347 orang pada tahun 2019 menjadi 99.521 orang pada tahun 2023. Peningkatan ini mungkin terkait dengan perkembangan infrastruktur dan pariwisata di Bali yang membutuhkan lebih banyak tenaga kerja di sektor transportasi dan pergudangan. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum juga mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam penyerapan tenaga kerja. Jumlah penduduk yang bekerja dalam sektor ini naik dari 327.609 orang pada tahun 2019 menjadi 357.657

orang pada tahun 2023. Ini mencerminkan perkembangan industri pariwisata dan hospitality di Bali yang terus berkembang. Meskipun tidak termasuk sektor swasta, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib juga menjadi salah satu penyumbang tenaga kerja yang signifikan di Bali. Jumlah penduduk yang bekerja dalam sektor ini mengalami fluktuasi namun cenderung stabil dari tahun ke tahun, dengan total mencapai 114.436 orang pada tahun 2023. Hal ini mencerminkan peran penting pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja di sektor publik.

Secara keseluruhan, data menunjukkan pertumbuhan keseluruhan jumlah penduduk yang bekerja dari 2.469.006 orang pada tahun 2019 menjadi 2.617.816 orang pada tahun 2023. Ini menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja yang berkelanjutan di Bali selama periode ini, walaupun dengan variasi dalam penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor ekonomi. Analisis lebih lanjut terhadap data ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang tren ekonomi dan peluang pembangunan di Provinsi Bali.



**Gambar 4.4**  
**Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Bali, Tahun 2023 (Persen)**

Secara lebih jelas, Gambar 4.4 menunjukkan bahwa saat ini dominan penduduk usia kerja bekerja pada lapangan usaha perdagangan besar dan eceran (21,39%);



pertanian, kehutanan, dan perikanan (18,94%), industry pengolahan (14,68%); serta sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (13,66%).

#### **4.5 Penduduk yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan Utama**

Selain data-data di atas, untuk mengetahui kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Bali, juga perlu dilihat berdasarkan jumlah penduduk usia kerja 15 tahun ke atas menurut jenis pekerjaan/jabatan dalam pekerjaan utama. Data mengenai penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut jenis pekerjaan atau jabatan utama di Provinsi Bali dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan tren yang mencerminkan dinamika pasar kerja dan adaptasi terhadap perubahan ekonomi. Berikut adalah analisis mendalam dari setiap kategori pekerjaan/jabatan utama selama periode tersebut.

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa jumlah tenaga profesional, teknisi, dan tenaga lain yang berhubungan mengalami fluktuasi dari 199.811 orang pada tahun 2019, menurun hingga 170.694 orang pada tahun 2022, kemudian meningkat kembali menjadi 190.371 orang pada tahun 2023. Fluktuasi ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perubahan kebutuhan industri dan dampak pandemi terhadap sektor-sektor profesional.

Jumlah tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan juga menunjukkan variasi, dari 38.807 orang pada tahun 2019 menurun hingga 28.278 orang pada tahun 2021, kemudian meningkat signifikan menjadi 45.383 orang pada tahun 2022 sebelum sedikit menurun menjadi 40.658 orang pada tahun 2023. Ini mungkin mencerminkan reorganisasi dalam sektor manajemen serta pemulihan dari dampak pandemi. Kategori ini memiliki jumlah yang cukup stabil, dari 235.580 orang pada tahun 2019, meningkat sedikit hingga 214.357 orang pada tahun 2022, lalu menurun menjadi 202.142 orang pada tahun 2023. Stabilitas ini menunjukkan bahwa sektor administrasi dan tata usaha memiliki permintaan yang relatif konsisten.

Jumlah tenaga usaha penjualan terus meningkat dari 435.812 orang pada tahun 2019 hingga mencapai puncaknya pada 537.926 orang pada tahun 2022, sebelum sedikit menurun menjadi 526.045 orang pada tahun 2023. Pertumbuhan ini mencerminkan peningkatan aktivitas perdagangan dan penjualan di Bali, sejalan dengan pemulihan ekonomi dan peningkatan konsumsi.



**Tabel 4.5**  
**Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan/Jabatan**  
**Dalam Pekerjaan Utama di Provinsi Bali, Tahun 2019-2023 (Orang)**

Jenis Pekerjaan/ Jabatan	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan/Jabatan Dalam Pekerjaan Utama (Orang)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Tenaga Profesional, Teknisi, dan Tenaga Lain ybdi	199811	178278	171201	170694	190371
Tenaga Kepemimpinan dan Ketatalaksanaan	38807	31685	28278	45383	40658
Pejabat Pelaksana, Tenaga Tata Usaha, dan Tenaga ybdi	235580	204809	207855	214357	202142
Tenaga Usaha Penjualan	435812	471123	498585	537926	526045
Tenaga Usaha Jasa	208710	189511	166545	212552	237895
Tenaga Usaha Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	455300	534550	523684	511599	488229
Tenaga Produksi, Operator Alat-alat Angkutan, dan Pekerja Kasar	828732	760587	787687	862263	888128
Lainnya	66254	52876	58019	52296	44348
<b>Jumlah</b>	<b>2469006</b>	<b>2423419</b>	<b>2441854</b>	<b>2607070</b>	<b>2617816</b>

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2024

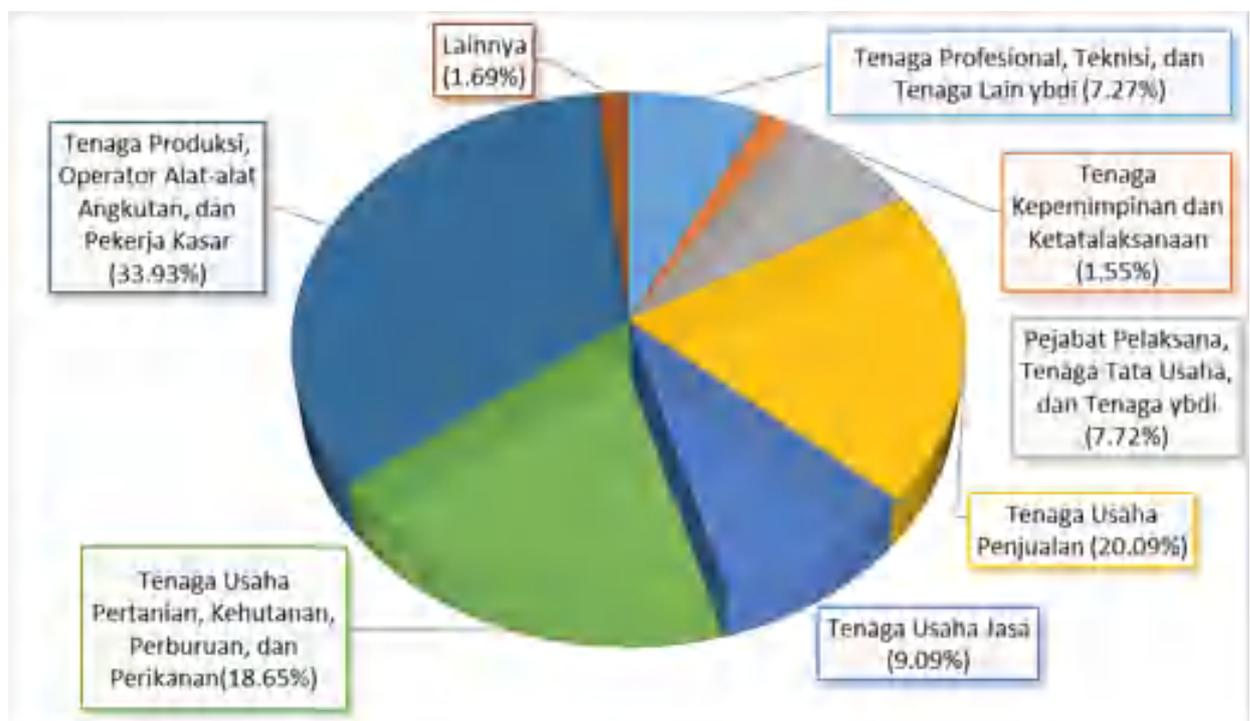
Jumlah tenaga usaha jasa menunjukkan tren yang meningkat dari 208.710 orang pada tahun 2019 menjadi 237.895 orang pada tahun 2023, setelah sempat mengalami penurunan pada tahun 2021. Pertumbuhan ini mencerminkan peran penting sektor jasa dalam perekonomian Bali, terutama dengan meningkatnya permintaan akan layanan jasa. Kategori ini memiliki jumlah yang relatif tinggi tetapi mengalami sedikit penurunan dari 455.300 orang pada tahun 2019 menjadi 488.229 orang pada tahun 2023. Penurunan ini mungkin dipengaruhi oleh pergeseran tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor lain yang menawarkan peluang lebih besar.

Kategori ini mencakup sebagian besar tenaga kerja, dengan peningkatan dari 828.732 orang pada tahun 2019 menjadi 888.128 orang pada tahun 2023. Kenaikan ini menunjukkan tingginya permintaan untuk tenaga kerja di sektor produksi dan

transportasi, yang merupakan pilar penting dalam perekonomian Bali. Jumlah pekerja dalam kategori lainnya mengalami penurunan dari 66.254 orang pada tahun 2019 menjadi 44.348 orang pada tahun 2023. Kategori ini mencakup pekerjaan yang tidak masuk dalam kategori utama lainnya dan menunjukkan tren menurun yang mungkin mencerminkan penyempitan lapangan kerja yang tidak terklasifikasi dengan baik.

Secara keseluruhan, jumlah penduduk yang bekerja di Bali menunjukkan peningkatan dari 2.469.006 orang pada tahun 2019 menjadi 2.617.816 orang pada tahun 2023. Peningkatan ini menandakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Bali, serta peningkatan partisipasi tenaga kerja dalam berbagai sektor pekerjaan. Analisis ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang dinamika tenaga kerja di Provinsi Bali, yang penting untuk perencanaan dan pengembangan kebijakan ketenagakerjaan yang efektif.

Apabila ditinjau berdasarkan jenis pekerjaan/jabatan dalam pekerjaan utama penduduk di Provinsi Bali saat ini (tahun 2023), Gambar 4.5 berikut memberikan gambaran komparasi antara tiap jenis pekerjaan.



**Gambar 4.5**  
**Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan/Jabatan Dalam Pekerjaan di Provinsi Bali, Tahun 2023 (Persen)**



Berdasarkan Gambar 4.5 Diagram pie tersebut menggambarkan distribusi tenaga kerja di suatu wilayah berdasarkan kategori pekerjaan. Bagian terbesar dari tenaga kerja, sebesar 33.93%, berada dalam kategori Tenaga Produksi, Operator Alat-alat Angkutan, dan Pekerja Kasar, menunjukkan dominasi pekerjaan manual dan operasional di wilayah tersebut. Sektor penjualan juga memiliki kontribusi signifikan dengan 20.09% tenaga kerja, menandakan pentingnya perdagangan dalam ekonomi setempat. Sektor pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan mencakup 18.65% tenaga kerja, mencerminkan ketergantungan ekonomi pada sumber daya alam. Tenaga usaha jasa melibatkan 9.09% tenaga kerja, menunjukkan diversifikasi dalam jenis pekerjaan.

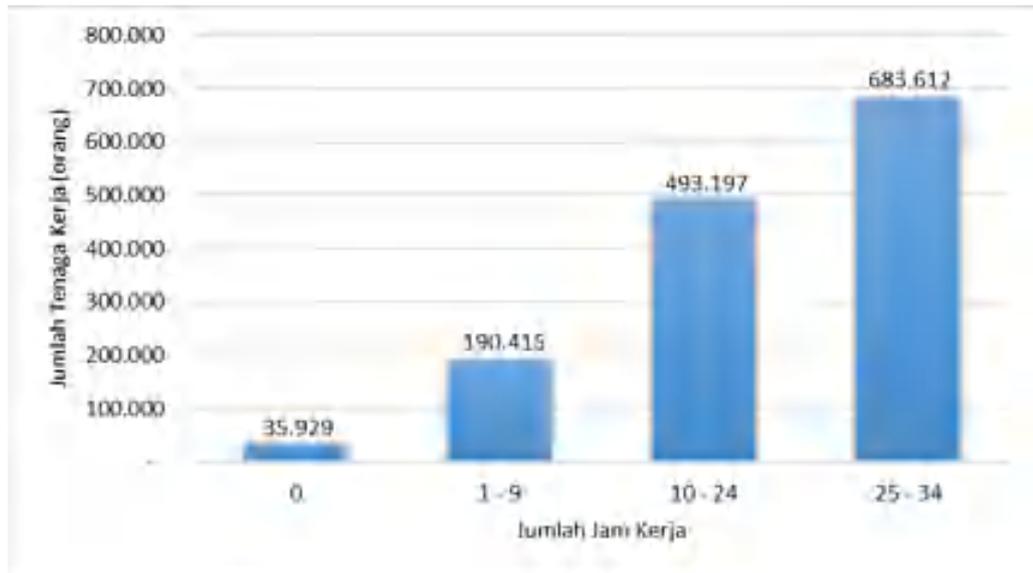
Pejabat pelaksana, tenaga tata usaha, dan tenaga lain mencakup 7.72% tenaga kerja, penting untuk administrasi dan pelaksanaan tugas. Tenaga profesional, teknisi, dan tenaga lain ybdi mencakup 7.27%, menandakan kehadiran pekerjaan yang memerlukan keterampilan khusus. Bagian kecil lainnya, sebesar 1.69%, mencakup pekerjaan yang tidak termasuk dalam kategori utama. Sementara itu, tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan hanya mencakup 1.55% tenaga kerja, menunjukkan bahwa posisi manajemen relatif sedikit. Secara keseluruhan, distribusi ini memberikan gambaran yang jelas tentang berbagai sektor pekerjaan dan proporsi tenaga kerja yang terlibat di masing-masing sektor dalam wilayah tersebut.

#### 4.6 Pekerja Paruh Waktu

Pekerja paruh waktu merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari jam kerja normal atau 35 jam dalam seminggu.

**Tabel 4.7**  
**Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja di Bawah Jam Kerja Normal Atau Kurang Dari 35 Jam Seminggu (Orang)**

Jumlah Jam Kerja	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
0	90.145	67.271	27.853	35.929
1 - 9	268.546	306.625	166.039	190.415
10 - 24	623.059	721.893	709.701	493.197
25 - 34	891.605	1.028.518	875.740	683.612
<b>Jumlah</b>	<b>1.873.355</b>	<b>2.124.307</b>	<b>1.779.333</b>	<b>1.403.153</b>



**Gambar 4.6**  
**Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja di Bawah Jam Kerja Normal Atau Kurang dari 35 Jam Seminggu di Provinsi Bali, Tahun 2023 (Orang)**

Apabila ditinjau dari alokasi waktu pekerja paruh waktu di Bali tahun 2023, sesungguhnya sudah didominasi oleh tenaga kerja dengan alokasi waktu kerja mendekati jam kerja normal.

#### 4.7 Penduduk yang Bekerja Menurut Jam Kerja

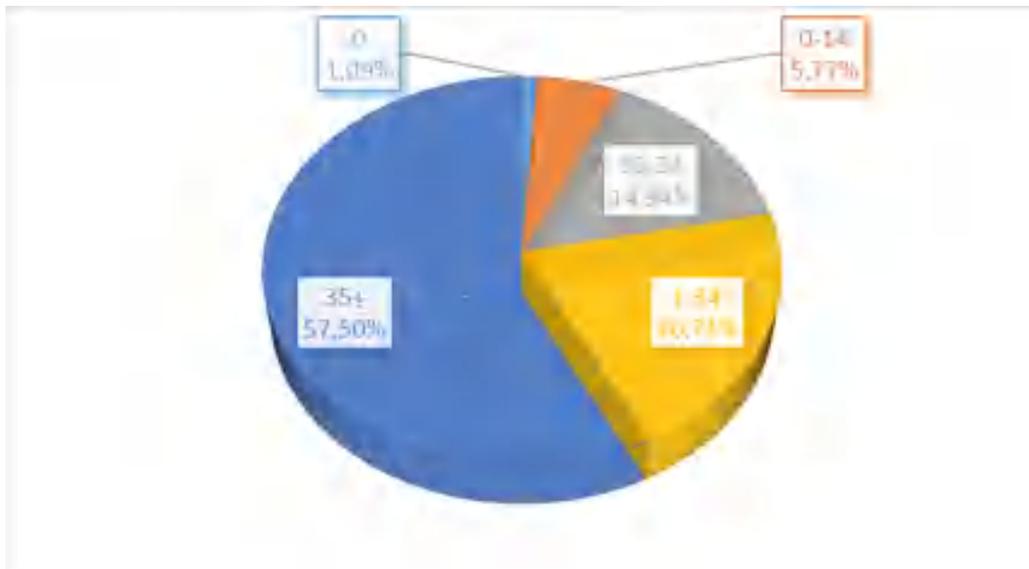
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa tenaga kerja dapat ditinjau berdasarkan jam kerjanya. Dimana jam kerja normal adalah minimal 35 jam per minggu.

**Tabel 4.7**  
**Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja Seluruhnya (Orang)**

Jam Kerja	Jumlah Penduduk yang Bekerja			
	2020	2021	2022	2023
0	90145	67271	27853	35929
0-14	268546	306625	166039	190415
15-34	623059	721893	709701	493197
1-34	891605	1028518	875740	683612
35+	1441669	1346065	1703477	1898275
<b>Jumlah</b>	<b>3315024</b>	<b>3470372</b>	<b>3482810</b>	<b>3301428</b>

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2024

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa tenaga kerja dengan jam kerja normal semakin meningkat, meskipun sempat mengalami penurunan signifikan akibat pandemi Covid-19.



**Gambar 4.7**  
**Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja Seluruhnya (Orang), Tahun 2023 (Persen)**

Sekitar 57,5 persen tenaga kerja dengan jam kerja normal, diikuti oleh 14,94 persen tenaga kerja dengan jam kerja yang mendekati jam kerja normal.

#### 4.8 Penduduk yang Bekerja pada Kegiatan Informal

Data mengenai penduduk yang bekerja di sektor formal dan informal di Provinsi Bali menunjukkan pergeseran dan dinamika yang mencerminkan kondisi ekonomi dan lapangan kerja di wilayah tersebut. Pada tahun-tahun terakhir, ada kecenderungan meningkatnya partisipasi tenaga kerja di sektor formal, yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang lebih teratur dan perkembangan sektor-sektor yang lebih terstruktur seperti industri pengolahan, jasa keuangan, dan administrasi pemerintahan.



Sektor informal memainkan peran penting, menyediakan pekerjaan bagi sejumlah besar penduduk terutama di sektor-sektor seperti pertanian, perdagangan kecil, dan jasa non-formal. Pergeseran ini juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang mendorong formalisasi pekerjaan dan perlindungan tenaga kerja, serta upaya peningkatan keterampilan dan pendidikan yang membuat lebih banyak pekerja mampu mengakses pekerjaan di sektor formal. Perbandingan antara sektor formal dan informal penting untuk memahami bagaimana tenaga kerja terdistribusi dan bagaimana kebijakan dapat diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Bali. Tabel 4.8 berikut menunjukkan kondisi penduduk yang bekerja di sektor formal dan informal di Provinsi Bali selama tahun 2019-2023.

**Tabel 4.8**  
**Penduduk yang bekerja di Sektor Formal dan Informal (persen)**

Kabupaten/Kota	Penduduk yang bekerja di Sektor Formal dan Informal (persen)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Formal	50,2	43,31	42,9	46,57	47,65
Informal	49,8	56,69	57,1	53,43	52,35
<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

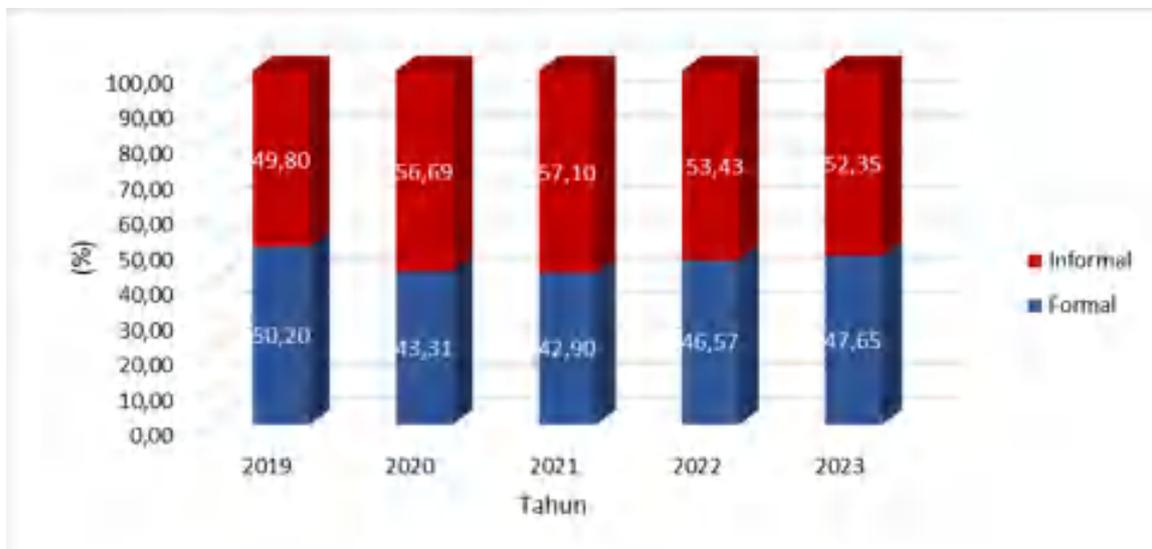
Sumber: BPS Provinsi Bali, 2024

Data mengenai penduduk yang bekerja di sektor formal dan informal di Provinsi Bali selama periode 2019 hingga 2023 menunjukkan pergeseran yang signifikan dalam komposisi tenaga kerja. Pada tahun 2019, tenaga kerja di sektor formal mencapai 50,2%, sedikit lebih tinggi daripada sektor informal yang sebesar 49,8%. Namun, pada tahun 2020, proporsi tenaga kerja formal menurun drastis menjadi 43,31%, sementara sektor informal meningkat tajam menjadi

56,69%. Tren ini berlanjut pada tahun 2021, dengan sektor formal hanya mencakup 42,9% dan sektor informal 57,1% dari total tenaga kerja.

Pada tahun 2022, terjadi pemulihan di sektor formal, yang meningkat menjadi 46,57%, dan sektor informal menurun menjadi 53,43%. Pada tahun 2023, sektor formal terus mengalami peningkatan menjadi 47,65%, sedangkan sektor informal menurun lagi menjadi 52,35%. Perubahan ini mencerminkan adaptasi pasar tenaga kerja terhadap kondisi ekonomi yang berubah, termasuk dampak pandemi COVID-19 yang memaksa banyak pekerja untuk berpindah ke sektor informal pada puncak krisis, dan kemudian perlahan-lahan kembali ke sektor formal seiring dengan pemulihan ekonomi.

Secara keseluruhan, data ini menggambarkan dinamika ketenagakerjaan di Bali, di mana sektor formal dan informal saling beralih dominasi dalam menghadapi tantangan ekonomi. Hal ini menyoroti pentingnya kebijakan yang mendukung stabilisasi dan formalitas pekerjaan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja di Bali.



**Gambar 4.8**

**Komparasi Penduduk yang bekerja di Sektor Formal dan Informal (persen), Tahun 2019-2023 (Persen)**



#### **4.9 Pengangguran**

Pengangguran adalah kondisi ketika seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja aktif tidak memiliki pekerjaan meskipun sedang mencari pekerjaan. Ini merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kesehatan ekonomi suatu wilayah. Tingkat pengangguran yang tinggi menunjukkan adanya masalah dalam ekonomi yang dapat berakibat pada peningkatan kemiskinan dan ketimpangan sosial. Pengangguran dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk ketidakcocokan antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan pasar, perubahan teknologi, serta kondisi ekonomi global dan lokal. Pengangguran yang tinggi menggambarkan kondisi perekonomian yang tidak baik, dimana berarti banyak penduduk yang berada pada usia kerja tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan, dengan demikian akan berdampak terhadap konsumsi dan produksi secara agregat. Konsumsi dan produksi yang menurun dapat berdampak pada penurunan tingkat kesejahteraan dan rentan memunculkan permasalahan keamanan.

Di Bali, tingkat pengangguran sangat dipengaruhi oleh ketergantungan yang tinggi pada sektor pariwisata. Ketika sektor ini mengalami gangguan, seperti yang terjadi selama pandemi COVID-19, banyak pekerja di industri pariwisata yang kehilangan pekerjaan. Hal ini menunjukkan betapa rentannya perekonomian Bali terhadap fluktuasi eksternal. Selain itu, musim pariwisata yang berfluktuasi juga dapat menyebabkan tingkat pengangguran musiman, di mana pekerja hanya bekerja selama musim puncak pariwisata dan menganggur selama musim sepi.



**Tabel 4.9**  
**Persentase Pengangguran Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota (Persen)**

Kabupaten/Kota	Persentase Pengangguran Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota (Persen)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jembrana	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44
Tabanan	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29
Badung	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Gianyar	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46
Klungkung	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57
Bangli	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
Karangasem	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62
Buleleng	3.12	3.12	3.12	3.12	3.12
Denpasar	2.29	2.29	2.29	2.29	2.29
<b>Provinsi Bali</b>	<b>1.57</b>	<b>1.57</b>	<b>1.57</b>	<b>1.57</b>	<b>1.57</b>

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2024

Tabel 4.9 menunjukkan data persentase pengangguran di Provinsi Bali menurut kabupaten/kota dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan fluktuasi yang signifikan, yang mencerminkan berbagai dinamika ekonomi dan sosial yang terjadi di daerah tersebut. Pada tahun 2019, tingkat pengangguran di Bali cukup rendah, dengan kabupaten Bangli dan Karangasem mencatat tingkat pengangguran terendah masing-masing sebesar 0,75% dan 0,62%, sementara Buleleng memiliki tingkat pengangguran tertinggi sebesar 3,12%.

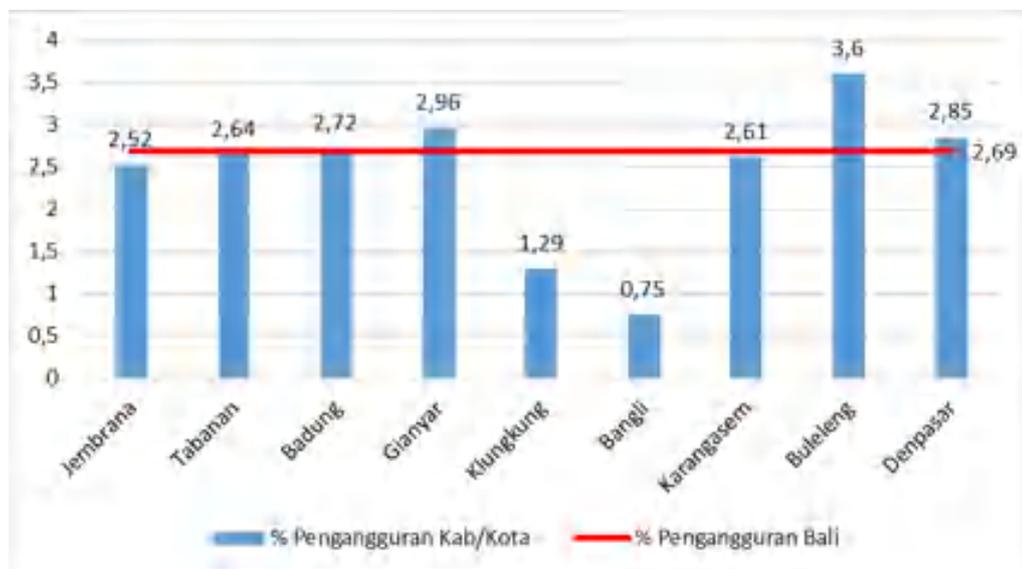
Pada tahun 2020, pandemi COVID-19 mulai memberikan dampak yang signifikan, menyebabkan lonjakan tingkat pengangguran di hampir seluruh wilayah. Kabupaten Badung, Gianyar, dan Kota Denpasar mengalami kenaikan tajam hingga mencapai 6,92%, 7,53%, dan 7,62% secara berturut-turut. Hal ini disebabkan oleh ketergantungan tinggi wilayah-wilayah tersebut pada sektor pariwisata, yang sangat terdampak oleh pembatasan perjalanan dan penurunan jumlah wisatawan.

Tahun 2021 masih menunjukkan tingkat pengangguran yang tinggi di banyak daerah, meskipun ada sedikit penurunan dibandingkan dengan 2020.

Namun, di tahun 2022, beberapa kabupaten mulai menunjukkan pemulihan, dengan tingkat pengangguran di Kabupaten Klungkung turun drastis menjadi 1,96% dari sebelumnya 5,35% pada tahun 2021.

Pada tahun 2023, data menunjukkan penurunan yang signifikan dalam tingkat pengangguran di seluruh kabupaten/kota di Bali, menandakan pemulihan ekonomi yang lebih kuat. Kabupaten Jembrana dan Tabanan mencatat penurunan tingkat pengangguran menjadi 2,52% dan 2,64% secara berturut-turut. Kota Denpasar, meskipun tetap tinggi dibandingkan dengan kabupaten lain, berhasil menurunkan tingkat penganggurannya dari 7,62% pada tahun 2020 menjadi 2,85% pada tahun 2023. Provinsi Bali secara keseluruhan juga menunjukkan penurunan yang signifikan dari 5,63% pada puncak pandemi di tahun 2020 menjadi 2,69% pada tahun 2023.

Deskripsi ini menggambarkan bagaimana Bali telah mengalami tantangan ekonomi yang besar akibat pandemi, namun juga menunjukkan kemampuan untuk pulih dan mengurangi tingkat pengangguran dengan cukup cepat seiring dengan pemulihan sektor-sektor ekonomi utama.



**Gambar 4.9**  
**Persentase Pengangguran Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2023 (Persen)**



#### 4.10 Pengangguran Menurut Pendidikan

Tingkat pengangguran menurut pendidikan memberikan gambaran penting tentang bagaimana berbagai tingkat pendidikan mempengaruhi peluang kerja di masyarakat. Data pada tabel 4.10 berikut ini menunjukkan hubungan antara pendidikan dan pengangguran, yang dapat mengarahkan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan dan lapangan kerja.

**Tabel 4.10**  
**Tingkat Pengangguran Provinsi Bali Menurut Pendidikan**

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	TPAK (Persen)			
	Tingkat Pengangguran Provinsi Bali Menurut Pendidikan			
	2020	2021	2022	2023
Jembrana	1.67	1.64	7.31	1.48
Tabanan	2.04	4.71	5.01	2.04
Badung	3.6	5.59	5.24	2.33
Gianyar	7.79	6.47	4.71	3.76
Klungkung	10.12	8.02	3.66	3.7
Bangli	13.15	6.91	3.91	3.26
Karangasem	7.95	3.65	4.31	3.81
Buleleng	5.1	4.07	3.34	1.98
Denpasar	5.63	5.37	4.8	2.69
<b>Provinsi Bali</b>	<b>1.67</b>	<b>1.64</b>	<b>7.31</b>	<b>1.48</b>

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2024

Secara umum, tingkat pengangguran cenderung lebih tinggi di kalangan mereka yang memiliki pendidikan yang lebih rendah. Misalnya, mereka yang hanya memiliki pendidikan dasar atau menengah pertama sering kali menghadapi tantangan lebih besar dalam menemukan pekerjaan yang stabil dan layak. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki, yang seringkali tidak memenuhi persyaratan pasar tenaga kerja yang terus berkembang. Namun beda halnya dengan kondisi di Provinsi Bali, dimana presentase pengangguran cenderung lebih tinggi pada pendidikan yang lebih tinggi, yaitu SMA ke atas.



Pada tahun 2019, tingkat pengangguran tertinggi tercatat pada lulusan program diploma I/II/III sebesar 13.15%, diikuti oleh lulusan SMK sebesar 10.12%. Sementara itu, tingkat pengangguran terendah terlihat pada kategori yang tidak atau belum tamat SD sebesar 1.67%. Secara keseluruhan, tingkat pengangguran di Provinsi Bali pada tahun 2019 adalah 5.63%.

Pada tahun 2020, tingkat pengangguran meningkat di semua tingkat pendidikan, kemungkinan besar disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19. Lulusan SMK dan diploma I/II/III kembali menunjukkan tingkat pengangguran yang tinggi masing-masing sebesar 8.02% dan 6.91%. Lulusan SD juga mengalami peningkatan signifikan dengan tingkat pengangguran sebesar 4.71%. Total tingkat pengangguran di Provinsi Bali pada tahun ini adalah 5.37%.

Tahun 2021 memperlihatkan penurunan tingkat pengangguran di hampir semua kategori pendidikan, meskipun masih ada tingkat pengangguran tinggi di kalangan lulusan SMK (4.71%) dan diploma I/II/III (3.91%). Tingkat pengangguran tertinggi tetap ada pada kategori tidak atau belum tamat SD dengan 7.31%. Namun, secara keseluruhan, tingkat pengangguran sedikit menurun menjadi 4.8%.

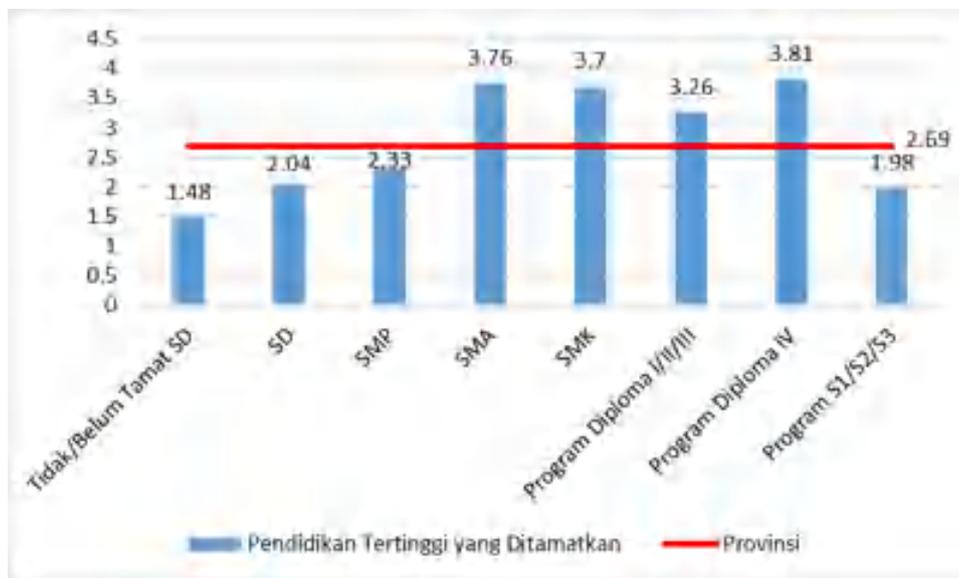
Pada tahun 2022, tingkat pengangguran menurun lebih lanjut. Lulusan diploma I/II/III dan lulusan SMK masing-masing mengalami penurunan tingkat pengangguran menjadi 3.26% dan 3.66%. Lulusan SMA menunjukkan penurunan signifikan dengan tingkat pengangguran 3.76%. Tingkat pengangguran terendah pada kategori pendidikan tinggi (S1/S2/S3) mencapai 3.34%. Total tingkat pengangguran pada tahun ini adalah 4.8%.

Pada tahun 2023, tingkat pengangguran di semua kategori pendidikan menunjukkan penurunan yang signifikan. Lulusan diploma I/II/III memiliki tingkat pengangguran sebesar 3.26%, dan lulusan SMK 3.7%. Lulusan S1/S2/S3 mencatat tingkat pengangguran terendah sebesar 1.98%. Secara keseluruhan, tingkat pengangguran di Provinsi Bali mencapai titik terendah dalam lima tahun terakhir, yaitu 2.69%.

Data di atas menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di kalangan lulusan pendidikan tinggi yang tinggi, khususnya perguruan tinggi menunjukkan bahwa masalah pengangguran di Bali jika ditinjau dari segi pendidikan disebabkan oleh ketidaksesuaian antara kualifikasi pendidikan dan permintaan pasar kerja, dimana terjadi ketidakseimbangan antara jumlah lulusan dan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia.

Tingkat pengangguran menurut pendidikan juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti akses ke pendidikan berkualitas, kebijakan pendidikan dan ketenagakerjaan, serta perkembangan ekonomi regional. Oleh karena itu, upaya untuk mengurangi pengangguran harus mencakup peningkatan kualitas dan akses pendidikan, penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja, serta pengembangan program pelatihan dan sertifikasi yang relevan.

Apabila ditinjau berdasarkan kondisi TPAK terkini (tahun 2023), Gambar 4.1 berikut memberikan gambaran komparasi antara TPAK Kabupaten/Kota dengan TPAK Provinsi Bali.



**Gambar 4.10**  
**Tingkat Pengangguran Provinsi Bali Menurut Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2023 (%)**



#### 4.11 Pengangguran pada Kelompok Umur

Tingkat pengangguran di Provinsi Bali bervariasi menurut kelompok umur, mencerminkan dinamika yang berbeda dalam pasar tenaga kerja di berbagai usia. Berikut kondisi pengangguran di provinsi Bali selama tahun 2019 sampai 2023 yang ditunjukkan oleh Tabel 4.11.

**Tabel 4.11**  
**Tingkat Pengangguran Provinsi Bali Menurut Kelompok Umur (Persen)**

Golongan Umur (Age Group)	Tingkat Pengangguran Provinsi Bali Menurut Kelompok Umur (persen)			
	2020	2021	2022	2023
15-19	9.97	14.07	14.54	9.53
20-24	15.42	11.05	10.26	7.97
25-29	8.38	7.17	3.7	4.45
30-34	6.78	7.87	2.71	3.18
35-39	5.53	4.31	2.28	1.95
40-44	3.23	4.88	2.34	0.86
45-49	2.77	4.05	2.06	1.2
50-54	3.19	2.65	2.91	0.62
55-59	2.93	1.45	3.49	0.55
60+	0.71	1.3	9.13	1.29
<b>Jumlah</b>	<b>5.63</b>	<b>5.37</b>	<b>4.8</b>	<b>2.69</b>

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2024

Pada kelompok umur 15-19 tahun, tingkat pengangguran cenderung tinggi. Pada tahun 2020, tingkat pengangguran di kelompok ini mencapai 9,97% dan meningkat signifikan pada tahun 2021 hingga mencapai 14,07%. Tahun 2022 mencatat sedikit peningkatan menjadi 14,54%, namun pada tahun 2023 terjadi penurunan yang cukup besar hingga 9,53%. Hal ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh kelompok muda dalam transisi dari pendidikan ke dunia kerja, di mana sering kali kurangnya pengalaman menjadi penghambat utama.



Kelompok umur 20-24 tahun juga menghadapi tingkat pengangguran yang relatif tinggi. Pada tahun 2020, tingkat pengangguran di kelompok ini mencapai 15,42%, menurun menjadi 11,05% pada tahun 2021, dan terus turun ke 10,26% pada tahun 2022. Pada tahun 2023, tingkat pengangguran menurun lebih lanjut ke 7,97%. Penurunan ini menunjukkan perbaikan dalam penyerapan tenaga kerja di kalangan pemuda yang mulai memasuki pasar kerja dengan kualifikasi yang lebih baik.

Untuk kelompok umur 25-29 tahun, terjadi penurunan tingkat pengangguran dari 8,38% pada tahun 2020 menjadi 7,17% pada tahun 2021, dan turun drastis ke 3,7% pada tahun 2022. Pada tahun 2023, terjadi sedikit kenaikan menjadi 4,45%. Kelompok usia ini biasanya terdiri dari individu yang sudah mulai meniti karir, namun masih rentan terhadap perubahan ekonomi.

Kelompok umur 30-34 tahun mengalami fluktuasi kecil dengan tingkat pengangguran 6,78% pada tahun 2020, naik menjadi 7,87% pada tahun 2021, dan turun ke 2,71% pada tahun 2022. Pada tahun 2023, tingkat pengangguran sedikit naik menjadi 3,18%. Stabilitas relatif dalam kelompok ini mencerminkan keamanan yang lebih tinggi dalam pekerjaan dibandingkan kelompok yang lebih muda.

Kelompok umur 35-39 tahun menunjukkan penurunan tingkat pengangguran yang stabil dari 5,53% pada tahun 2020 menjadi 4,31% pada tahun 2021, dan turun lebih jauh ke 2,28% pada tahun 2022. Pada tahun 2023, tingkat pengangguran turun ke 1,95%, menunjukkan keamanan karir yang lebih baik di kelompok usia ini.

Untuk kelompok umur 40-44 tahun, tingkat pengangguran menurun dari 3,23% pada tahun 2020 menjadi 4,88% pada tahun 2021, kemudian turun ke 2,34% pada tahun 2022 dan menjadi 0,86% pada tahun 2023. Penurunan ini mengindikasikan stabilitas pekerjaan yang lebih tinggi di usia paruh baya.

Kelompok umur 45-49 tahun menunjukkan tingkat pengangguran sebesar 2,77% pada tahun 2020, naik menjadi 4,05% pada tahun 2021, dan turun ke



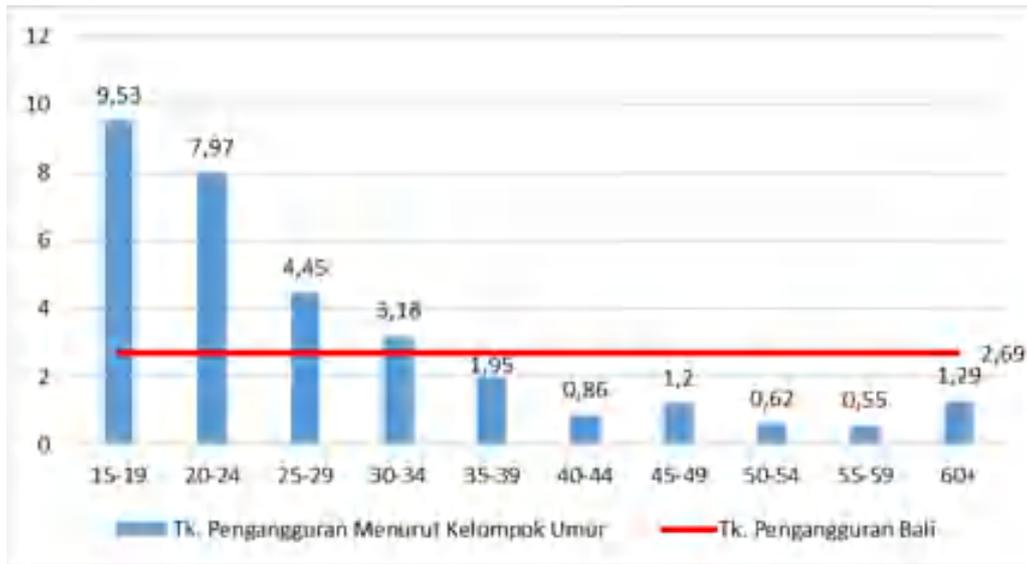
2,06% pada tahun 2022. Pada tahun 2023, tingkat pengangguran sedikit naik ke 1,2%, menunjukkan tingkat stabilitas yang baik dalam kelompok ini.

Kelompok umur 50-54 tahun menunjukkan tingkat pengangguran yang relatif rendah, yaitu 3,19% pada tahun 2020, menurun menjadi 2,65% pada tahun 2021, naik sedikit ke 2,91% pada tahun 2022, dan turun signifikan ke 0,62% pada tahun 2023. Untuk kelompok umur 55-59 tahun, tingkat pengangguran adalah 2,93% pada tahun 2020, menurun menjadi 1,45% pada tahun 2021, naik ke 3,49% pada tahun 2022, dan turun drastis ke 0,55% pada tahun 2023.

Kelompok umur 60 tahun ke atas menunjukkan fluktuasi besar dengan tingkat pengangguran 0,71% pada tahun 2020, naik menjadi 1,3% pada tahun 2021, melonjak ke 9,13% pada tahun 2022, dan turun kembali ke 1,29% pada tahun 2023. Ini mencerminkan ketidakpastian yang lebih tinggi dalam kelompok usia lanjut.

Secara keseluruhan, tingkat pengangguran di Provinsi Bali menurun dari 5,63% pada tahun 2020 menjadi 5,37% pada tahun 2021, dan turun lebih jauh ke 4,8% pada tahun 2022 serta 2,69% pada tahun 2023. Penurunan ini mencerminkan perbaikan dalam kondisi pasar tenaga kerja di Bali, meskipun beberapa kelompok umur masih menghadapi tantangan signifikan.

Analisis tingkat pengangguran berdasarkan kelompok umur di Provinsi Bali menunjukkan perlunya kebijakan yang disesuaikan untuk berbagai kelompok usia. Untuk kelompok usia muda, program pelatihan dan magang dapat membantu mereka mendapatkan keterampilan yang dibutuhkan dan pengalaman kerja yang relevan. Bagi kelompok usia menengah, pelatihan berkelanjutan dan peningkatan keterampilan dapat membantu mereka beradaptasi dengan perubahan di pasar kerja. Sementara itu, untuk kelompok usia yang lebih tua, dukungan dalam bentuk pelatihan ulang dan perlindungan terhadap diskriminasi usia sangat penting untuk memastikan mereka tetap memiliki peluang kerja yang baik.



**Gambar 4.11**  
**Tingkat Pengangguran Provinsi Bali Menurut Kelompok Umur Tahun 2023 (Persen)**

#### 4.12 Pencapaian Pendidikan

Penduduk usia 15 tahun ke atas menurut pendidikan tinggi yang ditamatkan menunjukkan variasi dalam tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan selama periode 2019 hingga 2023. Tabel 4.14 berikut ini menunjukkan kondisi di Provinsi Bali, yaitu penduduk dengan pendidikan SD atau lebih rendah mengalami fluktuasi dengan peningkatan dari 825.045 orang pada 2019 menjadi 839.488 orang pada 2023, meskipun sempat menurun pada 2020 dan 2021.

**Tabel 4.12**  
**Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Bali (Orang), 2019-2023**

Pendidikan	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
SD / Lebih Rendah	825.045	788.555	751.711	807.727	839.488
SLTP	338.119	357.244	342.359	347.872	372.196
SMU	550.097	529.168	534.257	570.882	554.982
SMK	327.201	336.977	360.537	402.015	392.853
Diploma I/II/III/Akademi	120.674	108.932	122.212	148.007	135.214
Universitas	307.870	302.543	330.778	330.567	323.083

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2024



Jumlah penduduk dengan pendidikan SLTP juga meningkat dari 338.119 orang pada 2019 menjadi 372.196 orang pada 2023, menunjukkan peningkatan akses pendidikan menengah pertama. Pada tingkat pendidikan menengah atas, penduduk yang menamatkan SMU menunjukkan peningkatan dari 550.097 orang pada 2019 menjadi 570.882 orang pada 2022, namun sedikit menurun menjadi 554.982 orang pada 2023. Sementara itu, jumlah penduduk dengan pendidikan SMK meningkat signifikan dari 327.201 orang pada 2019 menjadi 392.853 orang pada 2023, menunjukkan daya tarik pendidikan kejuruan.

Untuk pendidikan tinggi, penduduk yang menamatkan Diploma I/II/III/Akademi mengalami peningkatan dari 120.674 orang pada 2019 menjadi 148.007 orang pada 2022, namun menurun sedikit menjadi 135.214 orang pada 2023. Penduduk dengan pendidikan universitas (S1/S2/S3) juga meningkat dari 307.870 orang pada 2019 menjadi 330.778 orang pada 2021, namun menurun menjadi 323.083 orang pada 2023.

Secara keseluruhan, jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas di Provinsi Bali meningkat dari 2.469.006 orang pada 2019 menjadi 2.617.816 orang pada 2023. Peningkatan ini mencerminkan perkembangan positif dalam akses dan pencapaian pendidikan di Provinsi Bali selama lima tahun terakhir, meskipun ada fluktuasi di beberapa kategori pendidikan. Perkembangan ini mencerminkan upaya yang berkelanjutan dalam meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan formal, yang diharapkan dapat berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial di provinsi Bali.

Apabila ditinjau berdasarkan kondisi TPAK terkini (tahun 2023), Gambar 4.1 berikut memberikan gambaran komparasi antara TPAK Kabupaten/Kota dengan TPAK Provinsi Bali.

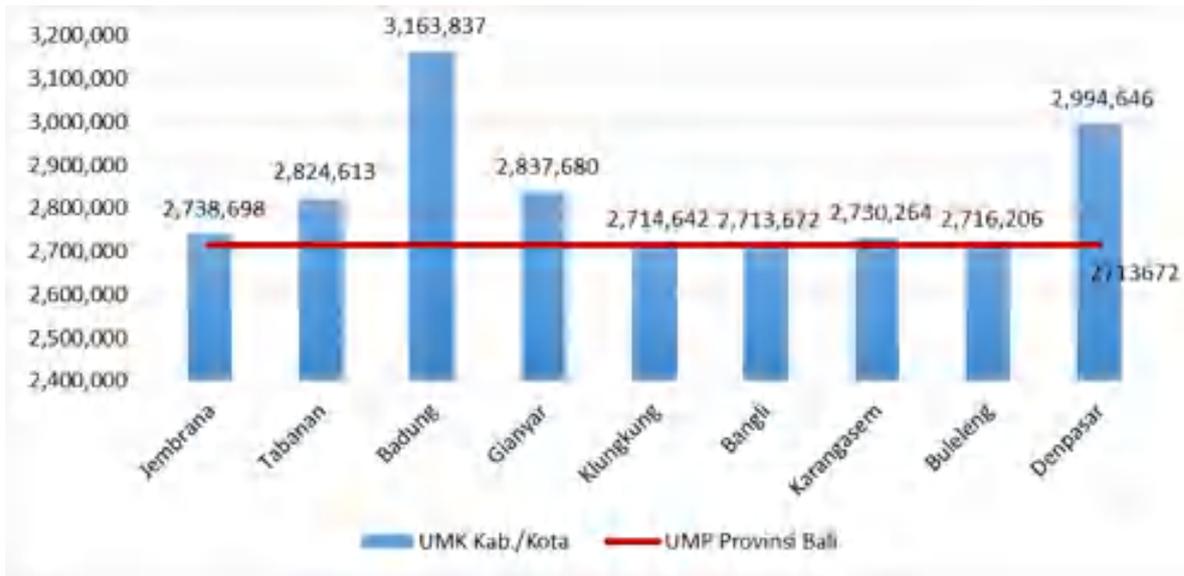


**Gambar 4.14**  
**Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Bali, Tahun 2023 (Persen)**

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa dominan Pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk Bali dalam usia 15 tahun ke atas adalah SD/Lebih rendah. Penduduk usia 15 tahun ditinjau dari usia sekolah, memang wajar menamatkan Pendidikan SD. Sementara itu, dominasi berikutnya adalah tenaga kerja dengan pendidikan tertinggi SMA/SMK.

### 4.13 Upah Minimum

Upah minimum adalah upah terendah (termasuk tunjangan teratur tetapi tidak termasuk upah lembur) yang dibayarkan kepada karyawan (per jenis jabatan/pekerjaan). Perhitungan penyesuaian upah minimum mengacu pada pasal 6 Ayat 3 Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023. Pertimbangan utama dalam kenaikan upah minimum didasarkan pada naiknya harga kebutuhan pokok, termasuk kondisi ekonomi Indonesia, serta adanya inflasi.



**Gambar 4.13**  
**Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Provinsi Bali, Tahun 2023**

Berdasarkan Gambar 4.13 diketahui bahwa Upah Minimum Kabupaten tertinggi adalah Kabupaten Badung, diikuti oleh Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Tabanan. Sedangkan Kabupaten dengan upah minimum terendah adalah Kabupaten Bangli.



## BAB V

### PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA PROVINSI BALI

Produktivitas tenaga kerja merupakan rata-rata tingkat output yang dihasilkan oleh setiap unit tenaga kerja. Dimana produktivitas tenaga kerja juga merupakan salah satu ukuran dari tingkat efisiensi penggunaan tenaga kerja dalam menghasilkan barang dan jasa. Produktivitas tenaga kerja umumnya dihitung dengan membandingkan output dengan jumlah tenaga kerja. Ukuran output yang umumnya digunakan adalah PDB/PDRB.

#### 5.1 Produktivitas Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor/Lapangan Usaha

Produktivitas tenaga kerja berdasarkan sektor/lapangan usaha mengukur efisiensi dan efektivitas tenaga kerja dalam menghasilkan output di berbagai sektor ekonomi. Di sektor manufaktur, produktivitas tenaga kerja sering diukur melalui jumlah barang yang dihasilkan per pekerja atau per jam kerja, yang dapat ditingkatkan melalui otomatisasi dan pelatihan keterampilan teknis. Dalam sektor pertanian, produktivitas tenaga kerja diukur dari hasil panen per petani atau per jam kerja, yang dapat ditingkatkan dengan penggunaan teknologi modern dan praktik pertanian yang lebih efisien. Di sektor jasa, produktivitas tenaga kerja mungkin diukur melalui jumlah layanan yang diselesaikan per pekerja atau tingkat kepuasan pelanggan, dengan peningkatan produktivitas dicapai melalui pelatihan layanan pelanggan dan adopsi teknologi digital untuk mempercepat proses kerja. Setiap sektor memiliki karakteristik unik yang mempengaruhi cara pengukuran dan peningkatan produktivitas tenaga kerja, namun tujuan utamanya adalah meningkatkan output dengan efisiensi yang lebih tinggi.

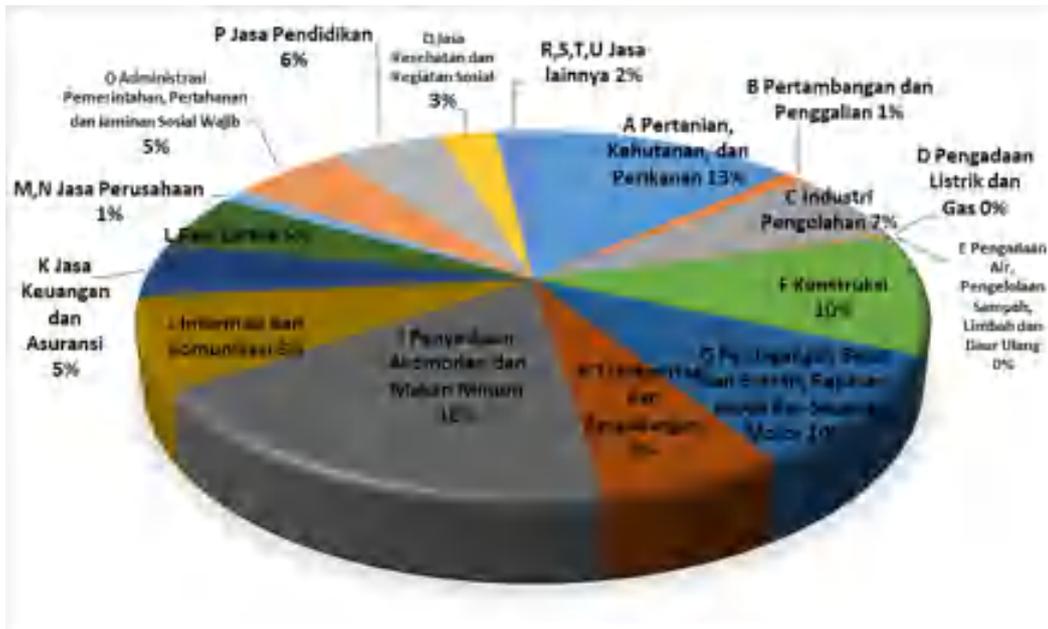
Berdasarkan Tabel 5.1, dapat dilihat bahwa PDRB tahunan Provinsi Bali berfluktuasi dan cenderung meningkat dari tahun 2022. Capaian PDRB yang tinggi didukung oleh pengoptimalan ke-17 sektor yang ada di Provinsi Bali, walaupun masih terlihat perbedaan jumlah kontribusi dari masing-masing sektor untuk mendukung ketercapaian PDRB Bali lebih tinggi.



**Tabel 5.1**  
**PDRB Tahunan Provinsi Bali**  
**Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2019-2023 (Juta Rupiah)**

Lapangan Usaha	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	21,479,547.23	21,269,187.73	21,338,451.58	21,146,423.90	21,022,072.03
B Pertambangan dan Penggalian	1,423,737.85	1,362,771.04	1,363,738.43	1,426,411.88	1,447,479.87
C Industri Pengolahan	10,359,040.02	9,694,782.42	9,701,452.16	10,240,993.51	10,472,563.50
D Pengadaan Listrik dan Gas	338,639.22	282,807.27	268,432.56	311,445.52	354,558.01
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,	338,976.17	337,261.52	323,911.00	322,251.82	333,695.66
F Konstruksi	16,305,005.10	15,856,017.26	15,843,028.75	16,439,958.81	16,589,352.70
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,297,790.49	14,219,219.02	14,016,090.67	14,817,390.21	15,616,978.01
H Transportasi dan Pergudangan	11,872,270.54	8,062,814.56	6,638,325.10	8,070,176.32	10,110,816.13
I Penyediaan Akomodasi dan Makan	32,970,993.96	23,902,892.38	21,460,209.09	24,441,901.31	28,391,842.75
J Informasi dan Komunikasi	11,657,324.61	12,375,042.02	12,713,885.43	12,639,597.68	12,858,499.21
K Jasa Keuangan dan Asuransi	6,759,770.13	6,456,680.58	6,244,502.04	6,750,327.70	7,651,310.48
L Real Estate	7,468,383.20	7,504,590.21	7,541,644.84	7,716,792.68	7,756,109.51
M,N Jasa Perusahaan	1,810,447.86	1,736,624.24	1,681,047.78	1,824,127.85	1,949,663.11
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,955,575.14	8,921,600.56	8,973,814.86	8,632,766.73	8,539,731.05
P Jasa Pendidikan	8,991,010.62	8,916,706.34	8,987,386.85	8,989,232.81	8,976,159.14
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,930,788.43	4,042,261.33	4,269,264.85	4,314,725.92	4,410,788.71
R,S,T,U Jasa lainnya	2,734,056.74	2,557,684.70	2,506,491.91	2,745,881.03	2,965,958.39
<b>PDRB Bali</b>	<b>162,693,357.31</b>	<b>147,498,943.17</b>	<b>143,871,677.91</b>	<b>150,830,405.67</b>	<b>159,447,578.27</b>

Dari ke-17 sektor/lapangan usaha, sektor tertinggi yang memberikan kontribusi tertinggi ada pada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum dengan kontribusi di tahun 2023 sebesar Rp28,391 Miliar. Dari tahun 2019-2023, sektor ini mengalami penurunan hanya pada tahun 2020-2021 akibat adanya pandemi Covid-19 dan berangsur membaik hingga saat ini. Sektor kedua yang memberikan kontribusi tinggi selain penyediaan akomodasi makan dan minum adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan kontribusi capaian sebesar Rp21,022 Miliar pada tahun 2023. Namun, kontribusi ini cenderung mengalami penurunan walaupun tidak signifikan. Beberapa sektor lainnya juga mengalami peningkatan, seperti sektor informasi dan komunikasi, yang meningkat signifikan selama masa pandemi Covid-19. Dimana sarana informasi dan komunikasi menjadi sangat penting selama periode tersebut untuk melaksanakan aktivitas pendidikan maupun pekerjaan. Sementara sektor konstruksi, industri pengolahan, serta transportasi dan pergudangan sempat mengalami penurunan selama pandemi Covid-19 akibat adanya berbagai pembatasan, namun kembali bertumbuh setelah masa *recovery post-Covid-19*.



**Gambar 5.1**  
**Distribusi PDRB Provinsi Bali Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2023 (%)**

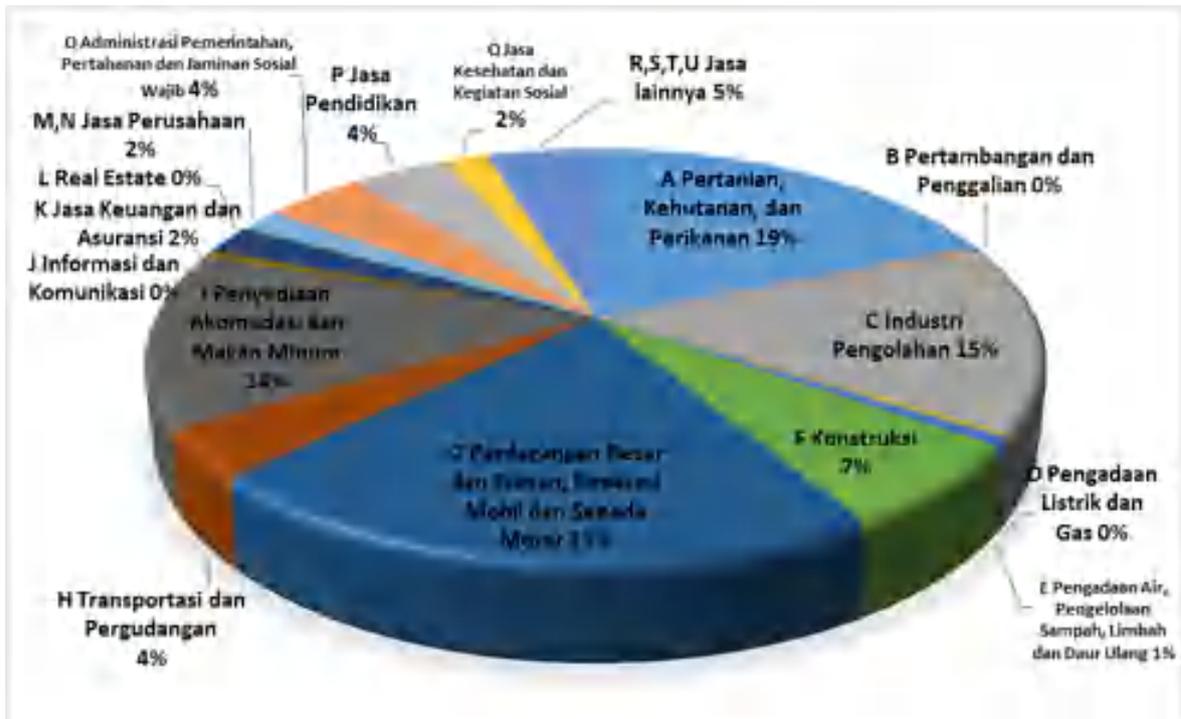
Berdasarkan Gambar 5.1, distribusi PDRB Bali pada tahun 2023 terlihat jelas bahwa persentase tertinggi terdapat pada sektor persediaan akomodasi dan makan minum dengan kontribusi sebesar 18 persen untuk ketercapaian PDRB Provinsi Bali. Dua sektor lainnya dengan perolehan yang tinggi secara berurutan ada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi sebesar 13 persen dan dua sektor dengan besaran kontribusi yang sama sekitar 10 persen pada sektor konstruksi dan sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda. Selain itu, beberapa sektor lainnya yang juga memiliki kontribusi penting dalam perekonomian Bali saat ini yaitu sektor informasi dan komunikasi, industri pengolahan, transportasi dan pergudangan, serta jasa pendidikan. Namun memang sektor-sektor tersebut saling terkait satu sama lain dan dominan untuk menunjang sektor pariwisata maupun MICE yang kembali marak dilaksanakan di Bali, baik berskala nasional maupun internasional.



**Tabel 5.2**  
**Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Bali, Tahun 2019-2023 (Orang)**

Lapangan Usaha	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	462,871.00	545,533.00	534,705.00	518,584.00	495,732.00
B Pertambangan dan Penggalian	9,627.00	9,013.00	7,859.00	6,250.00	6,093.00
C Industri Pengolahan	368,947.00	381,746.00	394,125.00	403,698.00	384,323.00
D Pengadaan Listrik dan Gas	5,709.00	5,473.00	3,703.00	6,480.00	5,202.00
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,	11,870.00	8,324.00	6,486.00	8,928.00	18,255.00
F Konstruksi	162,469.00	159,554.00	155,461.00	176,488.00	174,496.00
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	480,622.00	495,533.00	511,721.00	553,557.00	559,836.00
H Transportasi dan Pergudangan	77,347.00	59,540.00	57,669.00	85,949.00	99,521.00
I Penyediaan Akomodasi dan Makan	327,609.00	236,386.00	233,811.00	314,733.00	357,657.00
J Informasi dan Komunikasi	12,805.00	14,360.00	16,494.00	16,943.00	12,649.00
K Jasa Keuangan dan Asuransi	71,061.00	62,230.00	62,708.00	62,632.00	55,658.00
L Real Estate	4,092.00	3,094.00	2,738.00	3,559.00	4,629.00
M,N Jasa Perusahaan	58,490.00	42,832.00	33,764.00	51,297.00	46,330.00
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	125,316.00	114,051.00	136,969.00	125,737.00	114,436.00
P Jasa Pendidikan	100,014.00	103,537.00	109,449.00	97,073.00	109,176.00
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	54,886.00	51,303.00	56,262.00	60,284.00	49,101.00
R,S,T,U Jasa lainnya	135,271.00	130,910.00	117,930.00	114,878.00	124,722.00
<b>PDRB Bali</b>	<b>2,469,006.00</b>	<b>2,423,419.00</b>	<b>2,441,854.00</b>	<b>2,607,070.00</b>	<b>2,617,816.00</b>

Berdasarkan Tabel 5.2, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan usaha di Provinsi Bali tahun 2019-2023 berfluktuasi dan cenderung meningkat dari tahun 2020. Jumlah penduduk yang terseraap di pasar kerja berbeda di setiap sektornya. Adanya variasi dalam ketertarikan dan jumlah lapangan usaha yang memberikan peluang penyerapan kerja dapat menjadi salah satu alasan adanya perbedaan kontribusi dalam jumlah penyerapan tenaga kerja antar sektor di Provinsi Bali. Sektor yang menyerap tenaga kerja tertinggi ada pada sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor dengan penyerapan yang terus meningkat hingga 559.836 orang di tahun 2023. Sektor kedua yang mampu menyerap tenaga kerja cukup banyak antara lain sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan penyerapan sebanyak 495.732 orang, walaupun angka ini sudah menunjukkan terjadi penurunan daya serap sebanyak 22.852 di sektor tersebut.



**Gambar 5.2**  
**Distribusi Tenaga Kerja Provinsi Bali Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2023 (%)**

Berdasarkan Gambar 5.2, dapat dilihat bahwa distribusi tenaga kerja Provinsi Bali menurut lapangan usaha paling besar ada di sektor perdagangan besar dan eceran dengan distribusi sebesar 21 persen. Selisih dua persen dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan persentase sebesar 19 persen berada di peringkat kedua. Diikuti oleh banyaknya tenaga kerja di sektor industri pengolahan (15 persen) dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (14 persen) yang merupakan proxy sektor pariwisata. Selain itu, sektor konstruksi juga menyerap tenaga kerja sebesar 7 persen. Sebaran tenaga kerja sisanya berada pada sektor jasa, baik jasa pendidikan, jasa perusahaan, jasa keuangan, maupun jasa kesehatan. Sehingga Gambar 5.2 menunjukkan bahwa empat sektor utama yang menyerap tenaga kerja adalah sektor perdagangan besar dan eceran, pertanian, industri pengolahan, serta penyediaan akomodasi makan dan minum. Hal ini belum meninjau secara spesifik terkait dengan usia maupun pendidikan tenaga kerja pada sektor-sektor dominan tersebut.

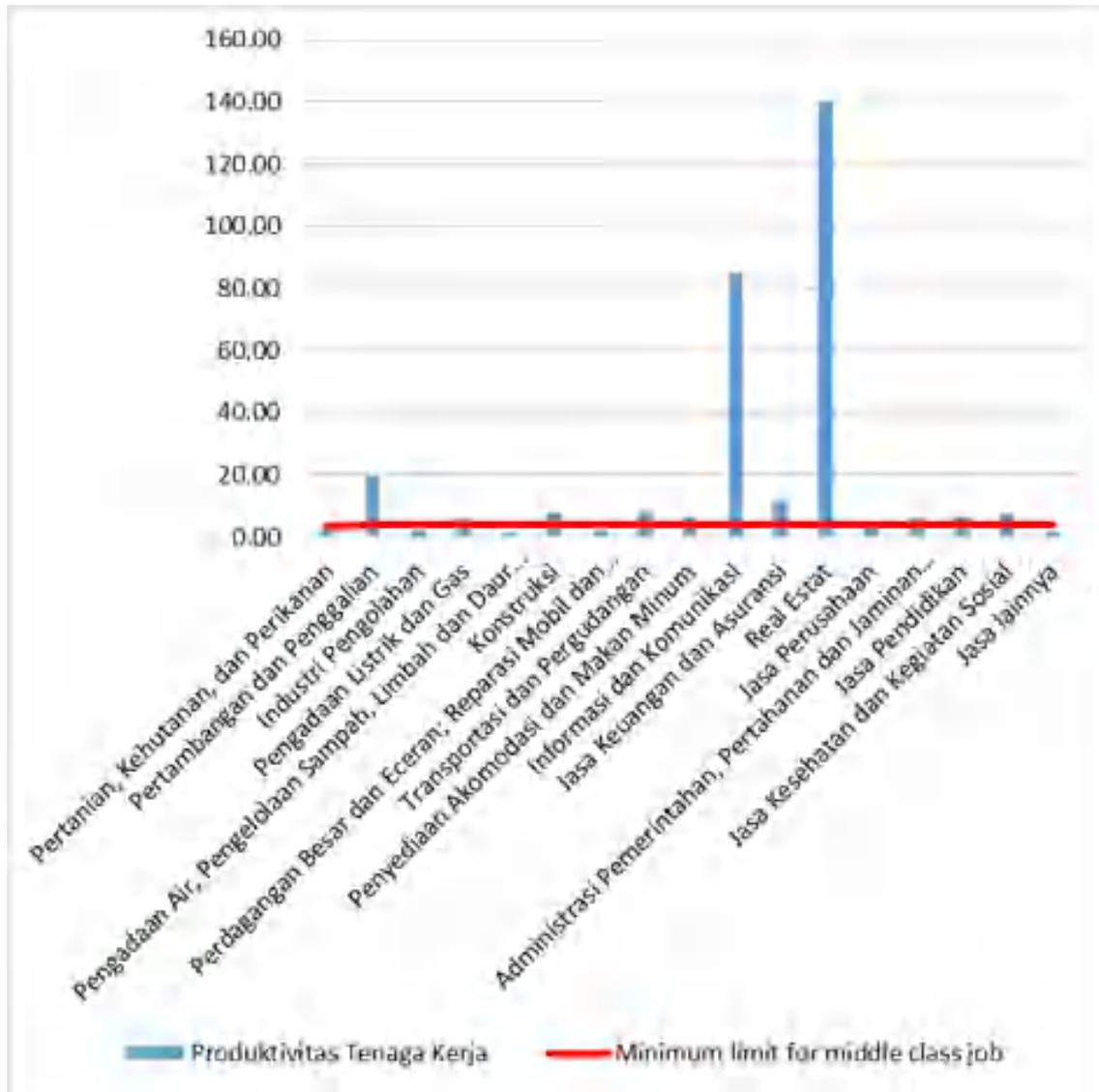


**Tabel 5.3**  
**Produktivitas Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Bali,**  
**Tahun 2019-2023 (Juta Rp/Bulan/Orang)**

No.	Lapangan Usaha (17 Kategori/Sektor)	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.87	3.25	3.33	3.40	3.53
B	Pertambangan dan Penggalian	12.32	12.60	14.46	19.02	19.80
C	Industri Pengolahan	2.34	2.12	2.05	2.11	2.27
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4.94	4.31	6.04	4.01	5.68
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2.38	3.38	4.16	3.01	1.52
F	Konstruksi	8.36	8.28	8.49	7.76	7.92
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.65	2.39	2.28	2.23	2.32
H	Transportasi dan Pergudangan	12.79	11.28	9.59	7.82	8.47
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8.39	8.43	7.65	6.47	6.62
J	Informasi dan Komunikasi	75.86	71.81	64.23	62.17	84.71
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7.93	8.65	8.30	8.98	11.46
L	Real Estat	152.09	202.13	229.54	180.69	139.63
M,N	Jasa Perusahaan	2.58	3.38	4.15	2.96	3.51
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.96	6.52	5.46	5.72	6.22
P	Jasa Pendidikan	7.49	7.18	6.84	7.72	6.85
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5.97	6.57	6.32	5.96	7.49
R,S,T,U	Jasa lainnya	1.68	1.63	1.77	1.99	1.98
	<b>Jumlah</b>	<b>5.49</b>	<b>5.07</b>	<b>4.91</b>	<b>4.82</b>	<b>5.08</b>

Produktivitas tenaga kerja sektor real estat memiliki produktivitas tertinggi, diikuti berturut-turut oleh sektor dengan produktivitas dua digit, yaitu sektor informasi dan komunikasi, sektor pertambangan dan penggalian, sektor jasa keuangan dan asuransi. Sedangkan sektor dengan produktivitas terendah adalah sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang.

Apabila dibandingkan dengan batas bawah produktivitas tenaga kerja kelas menengah (**Lampiran 4**), maka Gambar 5.3 berikut menyajikan komparasi produktivitas tenaga kerja di Provinsi Bali saat ini (tahun 2023) pada tiap sektor/lapangan usaha dengan *cut-off* tersebut.



**Gambar 5.3**  
**Komparasi Produktivitas Tenaga Kerja di Provinsi Bali dengan *cut-off Middle Class Job Income*, Tahun 2023 (Juta Rp/bulan/orang)**

Berdasarkan Gambar 5.3 diketahui bahwa produktivitas tenaga kerja pada beberapa sektor masih merupakan tenaga kerja kelas rendah (*low class job income*), yaitu tenaga kerja pada sektor: (1) pertanian, kehutanan, dan perikanan; (2) industri pengolahan; (3) pengadaan airm pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang; (4) perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; (5) jasa perusahaan; dan (6) jasa lainnya.



## 5.2 Produktivitas Tenaga Kerja Berdasarkan Wilayah

Produktivitas tenaga kerja berdasarkan wilayah menunjukkan variasi dalam efisiensi dan output tenaga kerja di berbagai daerah, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, akses terhadap teknologi, infrastruktur, dan kebijakan lokal. Di wilayah perkotaan, produktivitas tenaga kerja cenderung lebih tinggi karena adanya akses yang lebih baik ke pendidikan, pelatihan, dan teknologi modern, serta infrastruktur yang lebih baik yang mendukung operasional bisnis. Sebaliknya, di wilayah pedesaan, produktivitas tenaga kerja mungkin lebih rendah karena keterbatasan dalam akses ke sumber daya tersebut, meskipun sektor-sektor tertentu seperti pertanian bisa menunjukkan produktivitas tinggi jika didukung oleh praktik pertanian yang efisien dan teknologi pertanian modern. Perbedaan ini menunjukkan pentingnya kebijakan yang mendukung peningkatan produktivitas di seluruh wilayah, seperti investasi dalam infrastruktur, pendidikan, dan teknologi, untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan.

**Tabel 5.4**  
**PDRB, Tenaga Kerja, dan Produktivitas Tenaga Kerja**  
**Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, Tahun 2023**

Kabupaten/Kota	PDRB (Milyar Rp.)	Jumlah Tenaga Kerja (orang)	Produktivitas Tenaga Kerja (Juta Rp./bulan/orang)
Jembrana	9,492.38	197,832	4.00
Tabanan	15,472.12	277,112	4.65
Badung	35,554.32	324,403	9.13
Gianyar	18,865.02	317,231	4.96
Klungkung	6,041.65	129,864	3.88
Bangli	4,665.10	171,097	2.27
Karangasem	11,179.22	321,506	2.90
Buleleng	23,281.43	456,389	4.25
Denpasar	36,004.30	422,382	7.10

Berdasarkan Tabel 5.4 dapat dilihat bahwa produktivitas tenaga kerja di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Bali memiliki variasi yang cukup signifikan. Kabupaten Badung menjadi peringkat pertama untuk tingkat produktivitas tenaga kerja dengan besaran Rp 9,13 Juta per bulan/orang. Berbeda halnya dengan Kabupaten Karangasem dengan capaian produktivitas terendah dari kesembilan kabupaten/kota dengan capaian sebesar Rp 2,27 Juta per bulan/orang.



**Gambar 5.4**  
**Komparasi Produktivitas Tenaga Kerja di Kabupaten/Kota dengan *cut-off Middle Class Job Income*, Tahun 2023 (Rp/bulan)**

Berdasarkan Gambar 5.4 diketahui bahwa produktivitas tenaga kerja pada beberapa sektor masih termasuk produktivitas yang berada di bawah minimum limit untuk tenaga kerja kelas rendah. Terdapat empat kabupaten di Provinsi Bali yang berada di bawah minimum limit, diantaranya: (1) Kabupaten Bangli, (2) Kabupaten Karangasem, (3) Kabupaten Klungkung, dan (4) Kabupaten Jembrana.



## REFERENSI

- Aísa, R., Pueyom F., & Sanso, M. (2012). Life Expectancy and Labor Supply of The Elderly, *Journal of Population Economics* Vol. 25 (2), pp: 545 - 568.
- Al-Zawahreh, A. & Al-Madi, F. (2012). *The utility of equity theory in enhancing organizational effectiveness*. *European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences*, 46, 158-170.
- Annabi, N., Harvey,, S. & Lan., M. (2011). Public Expenditures on Education, Human Capital and Growth in Canada: An OLG Model Analysis. *Journal of Policy Modeling*, Vol. 33 (6), pp: 852 - 865.
- Arsyad, L. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta:STIM-YKPN
- BAPPENAS. (2021). *Transformasi Ekonomi Bali - Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali Menuju Bali Era Baru: Hijau, Tangguh, Sejahtera*.
- Bloom, D., Canning, D., Mansfield, RK. & Moore, M. (2007). Demographic Change, Social Security Systems and Savings, *Journal of Monetary Economics*, Vol, 54 (1), pp: 92 - 114.
- Boldin, M. & Horvath, M. (1995). Labor Contracts and Business Cycles, *Journal of Political Economy*, Vol. 103 (5), pp: 972 - 1004.
- Fadilah, F., Ananda, CF. & Kaluge, D. 2018. A Panel Approach: How Does Government Expenditure Influence Human Development Index?, *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Vol. 10 (2), pp: 130 - 139.
- Fauzi, A. (2019). *Teknik Analisis Keberlanjutan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Feldstein, M. (2008). Did Wages Reflect Growth in Productivity?, *Journal of Policy Modeling*, Vol, 30 (4), pp: 591-594.
- Hatfield, E, Forbes, M., Rapson, R.L. (2012). Marketing Love and Sex. *Business Media New York*.
- Holman, C., Joyeux, B. & Kask, C. (2008). Labor Productivity Trends Since 2000, By Sector and Industry, *Monthly Labor Review*, Vol. 7 (1), pp. 64-82
- Kim, D.H., Lin, S.C., Suen, Y.B. (2012). The simultaneous evolution of economic growth, financial development, and trade openness. *Journal of International Trade and Economic Development*, 21(4):513-537. DOI:[10.1080/09638199.2010.497933](https://doi.org/10.1080/09638199.2010.497933)



- Kuncoro, Mudrajad. 2006. *Ekonomika Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) STIM YKPN d/h AMP YKPN
- Meer, J. & West, J. (2016). Effects of the Minimum Wage on Employment Dynamics, *Journal of Human Resources*, Vol. 51 (2 ), pp: 500 - 522.
- Ramstetter, D. (2004). Labor Productivity, Wages, Nationality, and Foreign Ownership Shares in Thai Manufacturing, 1996-2000, *Journal of Asian Economics*, Vol. 14 (6), pp: 861 - 884.
- Restuccia, D. Tao, D. & Zhu, (2008). Agriculture and Aggregate Productivity: A Quantitative Cross-Country Analysis, *Journal of Monetary Economics*, Vol. 55 (2), pp: 234 - 250.
- Todaro, M.P. & Smith, S.C. (2012). *Economic Development* (11th ed). New York: Pearson.
- United Nations Population Fund (UNFPA). (2014). Indonesia on the Threshold of Population Ageing. *UNFPA Indonesia Monograph Series: No.1*. Jakarta: UNFPA Representative in Indonesia.
- Ozturk, I. (2001). The Role of Education in Economic Development: a Theoretical Perspective, *Journal of Rural Development and Administration*, Vol. 33 (1), pp. 39 - 47.



# **LAMPIRAN - LAMPIRAN**

## **LAPORAN BULAN MEI**

### **KAJIAN STRATEGI PENINGKATAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA MENUJU PEKERJA KELAS MENENGAH KE ATAS UNTUK MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI BALI**



## Lampiran 1

### Kuesioner Penelitian

#### SURVEI TENAGA KERJA KRAMA BALI

NAMA:	
No. HP:	
ALAMAT LENGKAP:	
KRAMA DESA ADAT:	
STATUS KRAMA:	
JENIS KELAMIN:	
BULAN DAN TAHUN LAHIR (MM/YYYY):	
USIA:	
PEKERJAAN:	
SEKTOR:	PERTANIAN / MANUFAKTUR / PARIWISATA (coret yang tidak sesuai)

1	Apakah status perkawinan (NAMA)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum kawin</li> <li>2. Kawin</li> <li>3. Cerai Hidup</li> <li>4. Cerai Mati</li> </ol>
2	Apakah pendidikan tertinggi yang (NAMA) tamatkan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak/belum tamat SD</li> <li>2. SD/MI/SDLB/Paket A</li> <li>3. SMP/MTs/SMPLB/Paket B</li> <li>4. SMA/MA/SMLB/Paket C</li> <li>5. SMK</li> <li>6. MAK</li> <li>7. Diploma I/II/III</li> <li>8. Diploma IV</li> <li>9. S1</li> <li>10. S2</li> <li>11. S2 Terapan</li> <li>12. S3</li> </ol>
3	Kapan (NAMA) lulus sekolah/kuliah pada pendidikan tertinggi yang ditamatkan?	MM/YYYY
4	Apakah (NAMA) pernah mengikuti pelatihan/kursus/training?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ya</li> <li>2. Tidak → lanjut ke No. 8</li> </ol>

5	Apakah dari pelatihan/kursus/training tersebut (NAMA) memperoleh sertifikat?	1. Ya 2. Tidak
6	Apakah pelatihan/kursus/training tersebut dilaksanakan dalam setahun terakhir?	3. Ya 4. Tidak → lanjut ke No.
7	Jenis pelatihan/kursus/training yang (NAMA) ikuti dalam setahun terakhir ( <i>sebutkan nama pelatihan dan penyelenggara pelatihan</i> )	1. .... ..... 2. .... ..... 3. .... .....
8	Apakah saat ini (NAMA) sedang mengikuti pelatihan/kursus/training (tidak harus bersertifikat)?	1. Ya 2. Tidak
10	Dalam seminggu terakhir, apakah (NAMA) membantu kegiatan usaha atau pekerjaan keluarga/orang lain? (Dilakukan baik dibayar maupun tidak dibayar, misalnya membantu orang tua jaga warung, membantu orang tua bertani, atau membantu pekerjaan keluarga/orang lainnya)	1. Ya 2. Tidak → lanjut ke No.
11	Apa yang dikerjakan (NAMA) di tempat kerja? (Contoh: mencangkul dan mencabut rumput, mengemudi ojek motor, menjual bubur ayam keliling, melakukan pekerjaan tukang bangunan, mengajar les piano, staf tata usaha, dll)	
12	Apakah status pekerjaan (NAMA)?	1. Berusaha sendiri 2. Berusaha dibantu pekerja tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar 3. Berusaha dibantu pekerja tetap dan dibayar 4. Buruh/karyawan/pegawai 5. Pekerja bebas di pertanian 6. Pekerja bebas di nonpertanian 7. Pekerja keluarga/tidak dibayar
13	Berapakah pendapatan/penghasilan/gaji/upah bersih yang (NAMA) terima selama sebulan terakhir dari pekerjaan atau kegiatan usaha ini?	Uang: Rp.....  Barang senilai: Rp.....
14	Berapakah jumlah jam kerja biasanya dalam seminggu?	... jam

15	Selama seminggu terakhir apakah (NAMA) menggunakan teknologi digital pada pekerjaan ini?	
	a. Komputer (PC, notebook, laptop, tablet atau PDA)	1. Ya 2. Tidak
	b. Smartphone/Handphone (HP)	1. Ya 2. Tidak
	c. Teknologi digital lain (kamera digital, alat perekam suara, alat hitung digital, alat kesehatan digital, dan alat digital lainnya)	1. Ya 2. Tidak
16	Di mana tempat (NAMA) bekerja pada pekerjaan utama dalam seminggu terakhir? - Untuk pedagang (keliling), isikan tempat biasanya mulai menjual dagangan. - Untuk driver/supir/tukang ojek, isikan tempat pangkalan/ bandara/pul taksi/terminal/stasiun, atau tempat biasanya mulai ambil penumpang. - Untuk wartawan dan kurir, isikan lokasi kantor.	
17	Apakah (NAMA) melakukan perjalanan pergi dan pulang dari rumah/tempat tinggal ke kantor/tempat kerja secara rutin?	1. Ya, setiap hari 2. Ya, setiap minggu 3. Ya, setiap bulan 4. Tidak rutin
18	Apa moda transportasi <u>utama</u> yang (NAMA) gunakan untuk berangkat ke tempat kerja?	1. Transportasi pribadi/dinas 2. Transportasi umum 3. Transportasi online 4. Jalan kaki/tidak menggunakan
18	Bagaimana sistem pembayaran/pengupahan dari pekerjaan utama (NAMA)?	1. Bulanan 2. Mingguan 3. Harian 4. Per jam 5. Borongan 6. Dibayar per satuan hasil 7. Komisi
19	Apakah instansi/perusahaan/usaha tempat kerja (NAMA) memberikan/menyediakan? a. Jaminan kesehatan b. Jaminan kecelakaan kerja c. Jaminan kematian (hanya diisi jika Nomor 12 = 4) d. Jaminan hari tua e. Jaminan pensiun	1. Ya            2. Tidak 1. Ya            2. Tidak 1. Ya            2. Tidak 1. Ya            2. Tidak 1. Ya            2. Tidak

	<p>f. Cuti tahunan/cuti sakit/istirahat haid/cuti bersalin tanpa memotong upah/gaji pokok</p> <p>g. Jaminan kehilangan pekerjaan</p> <p>h. Upah sesuai dengan Aturan Upah Minimum Provinsi/ Kabupaten/Kota</p>	<p>1. Ya            2. Tidak</p> <p>1. Ya            2. Tidak</p> <p>1. Ya            2. Tidak</p>
20	<p>Apakah (NAMA) memiliki perjanjian/kontrak kerja/surat keputusan? (Contoh: - PKWTT: PNS/TNI/POLRI, pegawai BUMN, pegawai tetap, dll - PKWT: outsourcing, kontrak kerja kurang dari 5 tahun, dll)</p>	
21	<p>Dalam seminggu terakhir, apakah (NAMA) memiliki lebih dari satu pekerjaan?</p>	
22	<p>Kapan (NAMA) memperoleh pekerjaan/memulai usaha setelah lulus dari pendidikan tertinggi yang ditamatkan?</p>	
23	<p>Berapa jumlah anggota keluarga (NAMA)? (dalam satu pengelolaan keuangan/dapur)</p>	... orang
24	<p>Dari jumlah tersebut berapa orang yang bekerja?</p>	... orang
25	<p>Dari jumlah tersebut berapa orang yang masih bersekolah?</p>	... orang
26	<p>Berapa total penghasilan keluarga dalam sebulan?</p>	Rp.....
27	<p>Bagaimana alokasi pengeluaran keluarga (NAMA)?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebutuhan pokok (makanan/dapur): Rp.....</li> <li>- Pendidikan: Rp.....</li> <li>- Kesehatan: Rp.....</li> <li>- Rutin lainnya (listri/air/iuran sampah/dll): Rp.....</li> <li>- Adat/Agama: Rp.....</li> <li>- Rekreasi: Rp.....</li> <li>- Lainnya: Rp.....</li> </ul>



## Lampiran 2

### Instrumen Observasi Lapangan

#### **KAJIAN STRATEGI PENINGKATAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA MENUJU PEKERJA KELAS MENENGAH KE ATAS UNTUK MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI BALI (Kerjasama Antara BRIDA Provinsi Bali dengan LPPM Universitas Udayana)**

Kajian/penelitian ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan transformasi ekonomi Bali sesuai buku Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali. Tujuan pelaksanaan kajian/penelitian adalah merumuskan strategi dan roadmap peningkatan produktivitas tenaga kerja menuju tenaga kerja kelas menengah ke atas. Wilayah kajian meliputi wilayah administrasi Provinsi Bali yang terdiri dari 9 kabupaten/kota. Adapun output dari kajian ini adalah:

- 1) Profil ketenagakerjaan Provinsi Bali saat ini.
- 2) Standar kompetensi dan kebutuhan tenaga kerja kelas menengah di Provinsi Bali.
- 3) Strategi peningkatan produktivitas tenaga kerja (optimis, moderat, dan pesimis).
- 4) Peta jalan (roadmap) peningkatan produktivitas tenaga kerja menuju pekerja kelas menengah ke atas (2025-2030).

Sehingga untuk melengkapi analisis data sekunder, diperlukan informasi dari stakeholders terkait di kabupaten/kota.

#### **Informasi Pelaksanaan Pengumpulan Data di Kabupaten/Kota:**

Kabupaten/Kota : .....

Waktu pelaksanaan : .....

#### *Interviewee*

1. Nama : .....

Instansi : .....

2. Nama : .....



Instansi : .....

3. Nama : .....

Instansi : .....

### Item Pertanyaan/Keterangan/Data

#### ▪ Informasi kualitatif terkait kondisi ketenagakerjaan

1. Bagaimana **ketersediaan** tenaga kerja di Kabupaten/Kota bersangkutan? Terutama pada tiga sektor utama (pertanian, pariwisata, manufaktur)? Apakah ada *gap* antara *supply* dan *demand* tenaga kerja?

2. Bagaimana **peluang/kesempatan kerja** di Kabupaten/Kota bersangkutan? Terutama pada tiga sektor utama (pertanian, pariwisata, manufaktur)?

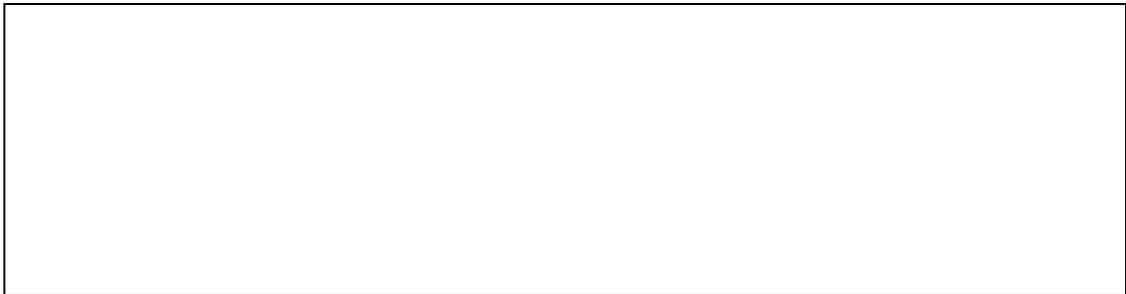
3. Bagaimana **tantangan** yang dihadapi dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja di Kabupaten/Kota bersangkutan? Terutama pada tiga sektor utama (pertanian, pariwisata, manufaktur)?

4. Bagaimana **ketersediaan lapangan kerja** di Kabupaten/Kota bersangkutan?  
Terutama pada tiga sektor utama (pertanian, pariwisata, manufaktur)?

5. Bagaimana **ketersediaan pasar tenaga kerja** di Kabupaten/Kota bersangkutan? Terutama pada tiga sektor utama (pertanian, pariwisata, manufaktur)?

6. Bagaimana **daya saing tenaga kerja** di Kabupaten/Kota bersangkutan?  
Terutama pada tiga sektor utama (pertanian, pariwisata, manufaktur)?

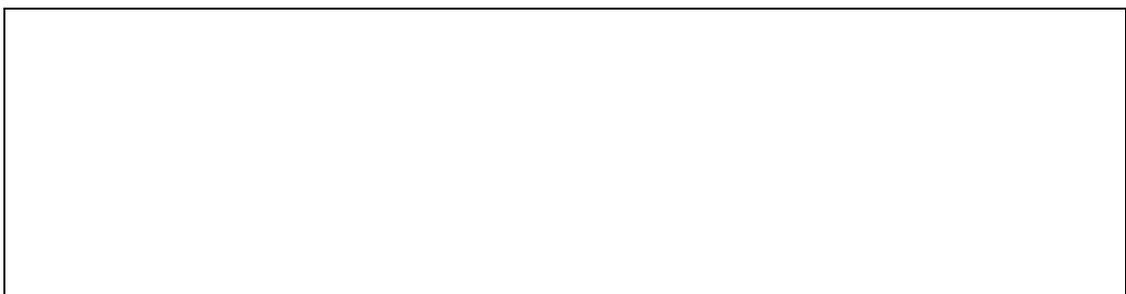
7. Apakah ada kecenderungan **migrasi tenaga kerja** dari Kabupaten/Kota bersangkutan? Apabila ada, apakah kecenderungannya migrasi sirkuler/permanen?



- **Informasi kualitatif penyebab rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja**

Produktivitas tenaga kerja merupakan **perbandingan antara output yang dicapai dengan peran serta tenaga kerja per satuan waktu** (umumnya satuan juta/orang/tahun). Sehingga peningkatan produktivitas tenaga kerja diharapkan dapat meningkatkan kelas tenaga kerja menjadi pekerja kelas menengah. Menurut laporan Bank Dunia dalam *Pathways to Middle-Class Jobs in Indonesia* (2021), pekerja kelas menengah (*middle class jobs*) adalah pekerja yang terbebas dari ancaman kemiskinan dengan penghasilan cukup untuk menghidupi 4 (empat) orang anggota keluarga yang mengkonsumsi gaya hidup kelas menengah atau 3,5 kali garis kemiskinan per kapita dikali 4.

8. Produktivitas tenaga kerja Bali cenderung rendah bila dibandingkan dengan daerah lain yang sebanding. Apalagi pandemi Covid-19 juga berdampak signifikan pada produktivitas tersebut. Menurut Bapak/Ibu, apa yang menyebabkan rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja di Kabupaten/Kota bersangkutan?



9. Bagaimana kecenderungan fluktuasi **kebutuhan tenaga kerja** di Kabupaten/Kota bersangkutan? Apakah tenaga kerja yang tersedia telah mampu memenuhi kebutuhan tersebut?

▪ **Informasi kualitatif kompetensi tenaga kerja**

10. Mohon berikan gambaran terkait dengan **kesenjangan kompetensi tenaga kerja** saat ini dengan prediksi kebutuhan kompetensi di masa depan! Dapat ditambahkan keterangan ilustrasi pada tiga sektor utama (pertanian, pariwisata, dan manufaktur).

11. **Program** apa yang dilakukan pemerintah daerah setempat dalam mengurangi gap kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar?



12. Apakah dilakukan **evaluasi terhadap efektivitas program** pengembangan kompetensi tenaga kerja yang telah dilakukan? Apabila ada mohon jelaskan hasil evaluasi tersebut dan tindak lanjut yang dilakukan?

13. Apakah kabupaten/kota bersangkutan memiliki **roadmap peningkatan kompetensi** dan/atau **produktivitas** tenaga kerja? Apabila ada, mohon berikan gambaran umum terkait roadmap tersebut!

Mohon informasi program/kegiatan pengembangan kompetensi tenaga kerja di OPD termasuk realisasinya, kajian sebelumnya, serta data-data terkait, mohon dapat dikirimkan kepada tim peneliti, melalui email: [renisuasih@unud.ac.id](mailto:renisuasih@unud.ac.id). Apabila ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi dapat menghubungi perwakilan tim peneliti an. Dr. Ni Nyoman Reni Suasih, S.IP., M.Si. (Hp/WA: 082144183939).

Atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu disampaikan Terima Kasih.



### Lampiran 3

#### *Minimum Limit for Middle-Class Job Income*

Province	Minimum Income Limit (Indonesian Rupiah)			
	2015		2020	
	Urban	Rural	Urban	Rural
Aceh	3,923,024	3,681,244	5,074,393	4,803,521
Sumatera Utara	3,545,715	3,291,279	4,858,271	4,541,992
Sumatera Barat	3,951,164	3,650,995	5,278,289	4,943,615
Riau	3,899,168	3,889,947	5,346,656	4,934,860
Jambi	3,955,980	3,079,020	5,156,648	4,244,371
Sumatera Selatan	3,534,897	2,986,611	4,394,133	3,960,777
Bengkulu	3,972,659	3,772,337	5,384,596	4,755,212
Lampung	3,609,461	3,230,155	4,707,080	4,079,665
Kep. Bangka Belitung	4,823,793	5,065,499	6,686,960	6,877,267
Kep. Riau	4,531,296	4,264,708	5,781,636	5,580,391
DKI Jakarta	4,695,021	-	6,377,831	-
Jawa Barat	2,970,772	2,979,461	3,889,191	3,839,192
Jawa Tengah	2,876,188	2,896,087	3,774,876	3,680,683
DI Yogyakarta	3,355,053	3,027,603	4,558,969	3,770,993
Jawa Timur	2,933,653	2,972,135	4,000,201	3,791,256
Banten	3,412,939	3,141,525	4,966,229	4,428,545
Bali	3,187,837	2,932,701	4,215,251	3,801,616
Nusa Tenggara Barat	3,129,317	2,925,683	3,919,291	3,700,667
Nusa Tenggara Timur	3,493,980	2,710,055	4,631,110	3,520,963
Kalimantan Barat	3,243,483	3,148,021	4,708,153	4,279,557
Kalimantan Tengah	3,166,231	3,499,421	4,469,481	4,656,951
Kalimantan Selatan	3,470,068	3,294,405	4,749,285	4,626,673
Kalimantan Timur	4,709,143	4,448,397	6,303,724	6,123,311
Kalimantan Utara	4,715,779	4,458,020	6,752,461	6,064,436
Sulawesi Utara	2,822,195	2,903,301	3,756,685	3,666,301
Sulawesi Tengah	3,513,963	3,295,413	4,599,075	4,467,745
Sulawesi Selatan	2,558,640	2,375,557	3,504,321	3,274,049
Sulawesi Tenggara	2,634,147	2,467,463	3,582,497	3,361,148
Gorontalo	2,562,756	2,568,188	3,506,907	3,489,836
Sulawesi Barat	2,511,413	2,809,544	3,331,692	3,287,844
Maluku	3,779,337	3,784,685	5,451,236	5,287,305
Maluku Utara	3,533,021	3,325,700	4,617,228	4,289,413
Papua Barat	4,467,857	4,267,405	5,931,697	5,621,373
Papua	4,153,865	3,662,829	5,808,563	5,249,179

Source: Sakernas.



**2024**